

**KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM  
DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI YANG BERKOMPETENSI  
DI KECAMATAN PATAMPA NUA KABUPATEN PINRANG**



Tesis

Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Magister  
dalam Bidang Pendidikan Kepengawasan Pendidikan Agama Islam  
Pada Program Pascasarjana UIN Alauddin  
Makassar

**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

Oleh;

**SUPARMAN TOAHA**

NIM: 80100212143

**PASCASARJANA  
UIN ALAUDDIN MAKASSAR  
2014**

## **PERNYATAAN KEASLIAN TESIS**

Mahasiswa yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Suparman Toaha  
NIM : 80100212143  
Tempat/Tgl. Lahir : Urung, 10 Nopember 1978  
Program Studi : Dirasah Islamiyah  
Konsentrasi : Pendidikan Kepengawas PAI  
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 63, Makassar  
Judul : Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam  
Mewujudkan Guru PAI yang Berkompetensi di  
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

Menyatakan dengan sesungguhnya dan penuh kesadaran bahwa tesis ini benar adalah hasil karya sendiri. Jika dikemudian hari terbukti bahwa ia merupakan duplikat, tiruan, plagiat, atau dibuat orang lain, sebagian atau seluruhnya maka tesis dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 2 Juni 2014

Penulis

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

**Suparman Toaha**  
**NIM: 80100212143**

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul, “**Kontribusi Pengawas Pendidikan Islam dalam Mewujudkan Guru PAI yang Berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**”. Yang disusun oleh **Suparman Toaha**, NIM: **80100212143**, mahasiswa konsentrasi **Pendidikan Kepengawasan PAI** pada program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang seminar hasil yang diselenggarakan pada hari selasa, tanggal 8 April 2014 bertepatan pada tanggal 7 Jumadil Akhir 1435 H. dipandang bahwa tesis tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk menempuh ujian sidang *Munaqasyah*

### Promotor

**Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A.** (.....)

### Kopromotor

**Dr. H. Syahrudin Usman, M.Pd.** (.....)

### Penguji:

**1. Prof. Dr. H. Nasir A. Baki, M.A.** (.....)

**2. Drs. Muhammad. Wayong, M.Ed.M., Ph.D.** (.....)

**3. Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A.** (.....)

**4. Dr. H. Syahrudin Usman, M.Pd.** (.....)

Makassar, 12 Mei 2014

Mengetahui;

Direktur PPs

UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.

Nip: 19540816 1983 1 004

## PENGESAHAN TESIS

Tesis yang berjudul, “**Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Guru PAI yang Berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**”. Yang disusun oleh **Suparman Toaha**, NIM: **80100212143**, telah diujikan dan dipertahankan dalam sidang ujian munaqasyah yang diselenggarakan pada hari Senin tanggal 2 bulan Juni tahun 2014 M. bertepatan dengan tanggal 3 Sya’ban 1435 H. dinyatakan telah dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister dalam bidang Pendidikan Kepengawas PAI pada Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.

### Promotor

**Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A.** (.....)

### Kopromotor

**Dr. H. Syahrudin Usman, M.Pd.** (.....)

### Penguji:

**1. Prof. Dr. H. Nasir A. Baki, M.A.** (.....)

**2. Drs. Muhammad. Wayong, M.Ed.M., Ph.D.** (.....)

**3. Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A.** (.....)

**4. Dr. H. Syahrudin Usman, M.Pd.** (.....)

Makassar, 2 Juni 2014  
Mengetahui;  
Direktur PPs  
UIN Alauddin Makassar

Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A.  
Nip: 19540816 1983 1 004

## KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلي اله واصحابه اجمعين اما

Segala puji bagi Allah swt., karena atas petunjuk dan segala nikmatnya sehingga tahapan panjang dan proses melelahkan telah Allah akhiri dengan lahirnya karya ini. Allah jugalah yang telah membimbing penulis, menunjukkan jalan kemudahan serta melapangkan segala rintangan sehingga dapat menyelesaikan tesis ini sebagai rangkaian tugas akhir perkuliahan. Salawat dan salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw., yang menjadi suri teladan manusia dalam kehidupan, beserta para keluarganya, sahabatnya dan para pengikutnya.

Selanjutnya, penulis pun menyadari bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan tesis ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak, baik secara moral maupun material. Kepada mereka patutlah kiranya penulis dengan penuh kerendahan hati menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya dan mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. H. A. Qadir Gassing HT, M.S., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Alauddin Makassar, Pembantu Rektor I, II, III, dan IV.
2. Prof. Dr. H. Moh. Natsir Mahmud, M.A., selaku Direktur Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar. Beserta para tim (9) sembilan dan jajarannya yang selama ini memberikan arahan dan petunjuk dalam menyelesaikan studi.
3. Prof. Dr. H. Mappanganro, M.A. dan Dr. H. Syahrudin Usman, M.Pd., selaku promotor dan kopromotor, atas saran-saran dan masukan serta bimbingan dan motivasi yang diberikan kepada penulis dalam penyelesaian tesis ini.

4. Prof. Dr. H. Nasir A. Baki, M.A. dan Drs. Muhammad Wayong, M.Ed.M., Ph.D., selaku penguji, atas saran-saran dan masukan serta bimbingan yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
5. Seluruh dosen Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar yang telah memberikan bimbingan, arahan motivasi dan sekaligus sebagai inspirasi penulis selama menuntut ilmu sampai menyelesaikan studi.
6. Seluruh karyawan/karyawati Tata Usaha Program Pascasarjana (PPs) UIN Alauddin Makassar, yang telah banyak membantu kami dalam pengurusan dan penyelesaian segala administrasi.
7. Pimpinan dan karyawan/karyawati perpustakaan, yang telah berkenan memberikan berbagai referensi untuk kepentingan studi kami.
8. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Unit Pelaksana Teknis – Pelayanan Perizinan Terpadu yang telah memberikan Izin Penelitian.
9. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Kabupaten Pinrang yang telah memberikan izin bagi pelaksanaan penelitian ini.
10. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, yang telah memberikan rekomendasi kepada penulis untuk melakukan penelitian di Kementerian Agama Kab. Pinrang.
11. Kepala UPTD Dinas Pendidikan Pemuda Olahraga Kec. Patampanua Kab. Pinrang yang telah memberikan izin melakukan penelitian pada sekolah menengah di wilayah Kec. Patampanua
12. Kepala SMPN, SMAN dan SMKN Negeri Kec. Patampanua, yang telah memberikan peluang dan berbagai masukan sehubungan dengan pembahasan hasil penelitian dalam penyelesaian tesis ini.

13. Kedua orang tua tercinta, Toaha (almarhum) dan Hj. Hanawiah, yang telah melahirkan, memelihara, memberikan landasan pendidikan dan mendoakan penulis hingga dapat menyelesaikan studi ini.
14. Kepada Istri tercinta Rafika, dan anak-anakku tersayang, Muhammad Chairul Qadry dan Ahmad Chaidir Mirza, yang dengan sabar dan penuh kerelaan untuk menunda segala kegembiraan dan kebersamaan, memberi lebih banyak waktu kepada penulis untuk tetap fokus selama masa perkuliahan dan penyelesaian tugas akhir studi ini. Tanpa dukungan serta ketulusan mereka niscaya sulit bagi penulis menyelesaikan tugas ini.
15. Keluarga dan kerabat serta teman-teman, yang telah mendoakan dan membantu baik berupa material maupun nonmaterial sehingga penulis dapat menyelesaikan karya tulis ini dan studi di Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar.
16. Semua pihak dan teman-teman, yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuan, motivasi, kritik, saran dan kerja samanya selama penyusunan tesis ini. Teman-teman angkatan 2012/2014 yang telah membantu penulis secara moral selama penulis menempuh pendidikan.

Penulis berharap semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi para pembaca dan kepada Allah jualah penulis memohon do'a dan *magfirah*-Nya. Amin.

Assalamu Alaikum Wr. Wb.

**Makassar, 2 Juni 2014**  
**Penulis**

**Suparman Toaha**  
**NIM: 80100212143**

## DAFTAR ISI

JUDUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PENGESAHAN TESIS .....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
PEDOMAN TRANSLITERASI DAN SINGKATAN .....	ix
ABSTRAK .....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xviii
DAFTAR LAMPIRAN .....	xix
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1-16</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus.....	11
C. Rumusan Masalah .....	12
D. Kajian Pustaka.....	13
E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	15
<b>BAB II TINJAUAN TEORETIS .....</b>	<b>17-77</b>
A. Konsep Dasar Supervisi .....	17
B. Teknik Supervisi Pendidikan .....	33
C. Pendekatan Supervisi Pendidikan.....	48
D. Profesi, Tugas dan Fungsi Guru .....	57
E. Kualifikasi dan Kompetensi Guru .....	63
F. Kerangka Konseptual .....	77
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN.....</b>	<b>78-88</b>
A. Jenis dan Lokasi Penelitian.....	78
B. Pendekatan Penelitian .....	80
C. Sumber Data.....	81
D. Metode Pengumpulan Data.....	82
E. Instrumen Penelitian .....	84



F. Pengolahan dan Analisis Data .....	85
G. Pengujian Keabsahan Data .....	87
<b>BAB IV PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI YANG BERKOMPETENSI .....</b>	<b>89-125</b>
A. Kompetensi Pengawas PAI di Kecamatan Patampanua.....	89
B. Kondisi Objektif Guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua.....	103
C. Upaya Pengawas PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam Mewujudkan Kompetensi Guru PAI.....	110
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>126-128</b>
A. Kesimpulan.....	126
B. Implikasi Penelitian .....	127
KEPUSTAKAAN .....	129-132
LAMPIRAN-LAMPIRAN .....	133-198
RIWAYAT HIDUP.....	199

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

### A. *Transliterasi Arab-Latin*

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada tabel berikut:

#### 1. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	ba	b	be
ت	ta	t	te
ث	sā	s\	es (dengan titik di atas)
ج	jim	j	je
ح	hā	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	zāl	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	r	er
ز	zai	z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	sād	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	dād	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	tād	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	zād	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	f	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	m	em
ن	nun	n	en
و	wau	w	we
ه	ha	h	ha
ء	hamzah	,	apostrof
ي	ya	y	ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

## 2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fathah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>ḍammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِي	<i>fathah dan ya'</i>	ai	a dan i
اُو	<i>fathah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*  
هَوْلَ : *hau-la*

## 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اِي ...   اِ ...	<i>fathah dan alif atau ya'</i>	a>	a dan garis di atas
اِي	<i>kasrah dan ya'</i>	i>	i dan garis di atas
اُو	<i>ḍammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ	: mata
رَمَى	: rama>
قِيلَ	: qila
يَمُوتُ	: yamutu

#### 4. Ta>marbutah

Transliterasi untuk ta>marbutah ada dua, yaitu: ta>marbutah yang hidup atau mendapat harakat fathah, kasrah, dan dhimmah, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan ta>marbutah yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Kalau pada kata yang berakhir dengan ta>marbutah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al- serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka ta>marbutah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	: raudh al-atfal>
الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ	: al-madinah al-fadilah
الْحِكْمَةُ	: al-hikmah

#### 5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau tasydid yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda tasydid ( ّ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda syaddah.

Contoh:

رَبَّنَا	: rabbana>
نَجِينَا	: najjaina>
الْحَقُّ	: al-haqq
نَعْم	: nu'ima
عَدُو	: 'aduwwun

Jika huruf ع ber-tasydid di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf kasrah ( ِ ), maka ia ditransliterasi seperti huruf maddah menjadi i>

Contoh:

عَلِي	: 'Ali>(bukan 'Aliyy atau 'Aly)
عَرَبِي	: 'Arabi>(bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ	: <i>al-syamsu</i> (bukan <i>asy-syamsu</i> )
الزَّلْزَلَةُ	: <i>al-zalzalah</i> ( <i>az-zalzalah</i> )
الْفَلَسَفَةُ	: <i>al-falsafah</i>
الْبِلَادُ	: <i>al-biladu</i>

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ	: <i>ta'muruṭṭa</i>
النَّوْعُ	: <i>al-nau'</i>
شَيْءٍ	: <i>syai'un</i>
أَمْرٌ	: <i>umirtu</i>

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'ān*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fiṣṭaḥ al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

### 9. *Lafz}al-Jalalah* (الله)

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudhaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

بِالله *billah* دِينَ الله *dimullah*

Adapun *ta>marbutah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz}al-jalalah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُمْ فِي رَحْمَةِ اللهِ *hum fi rahmatillah*

### 10. *Huruf Kapital*

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

Wa ma Muh}ammadun illa rasul>

Inna awwala baitin wud}a linnasi lallaz}bi Bakkata mubarakan

Syahru Ramadh}an al-laz}anzila fi} al-Qur'an

Nas} al-Din al-Tusi>

Abu Nas} al-Farabi>

Al-Gazali>

Al-Munqiz} min al-D}ala>

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu>al-Walid Muh>ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu>al-Walid Muh>ammad (bukan: Rusyd, Abu>al-Walid Muh>ammad Ibnu)

Nas> Hamid Abu>Zaid, ditulis menjadi: Abu>Zaid, Nas> Hamid (bukan: Zaid, Nas> Hamid Abu>)

## B. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh&gt;u&gt;hu&gt;wa ta'ala&gt;</i>
saw.	= <i>s&gt;allallahu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-salam</i>
r.a.	= <i>Rad&gt;allahu 'anhu</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
QS .../...: 4	= QS al-Anbiya'/21: 7 atau QS Al>'Imran/3: 4
HR	= Hadis Riwayat
NIM	= Nomor Induk Mahasiswa
NIP	= Nomor Induk Pegawai
Kec.	= Kecamatan
Kab.	= Kabupaten
Cet.	= Cetakan
h.	= Halaman
UKG	= Uji Kompetensi Guru
PNS	= Pegawai Negeri Sipil
PAI	= Pendidikan Agama Islam
SMPN	= Sekolah Menengah Pertama Negeri
SMAN	= Sekolah Menengah Atas Negeri
SMKN	= Sekolah Menengah Kejuruan Negeri
MAN	= Madrasah Aliyah Negeri
MTsN	= Madrasah Tsanawiyah Negeri
RI.	= Republik Indonesia
FKG	= Forum Komunikasi Guru
KKG	= Keleompok Kerja Guru
MGMP	= Musyawarah Guru Mata Pelajaran
RPP	= Rencana Pelaksanaan Pembelajaran
KKM	= Kriteria Ketuntasan Minimal
Protah	= Program Tahunan

Prose	= Program Semester
LKS	= Lembar Kerja Siswa
KTSP	= Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan
PTK	= Penelitian Tindakan Kelas
UU	= Undang-Undang
SISDIKNAS	= Sistem Pendidikan Nasional
PP	= Peraturan Pemenritah
PERMENAG	= Peraturan Menteri Agama
Kasi Pendis	= Kepala Seksi Pendidikan Islam
POKJAWAS	= Kelompok Kerja Pengawas
RKA	= Rencana Kerja pengawasan Akademik





## ABSTRAK

**Nama : Suparman Toaha**

**NIM : 80100212143**

**Judul : Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Guru PAI yang Berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**

---

Pokok masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana kontribusi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan guru PAI yang berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang? Pokok masalah tersebut dijabarkan ke dalam beberapa submasalah atau pertanyaan penelitian, yaitu 1) Bagaimana kompetensi pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?, 2) Bagaimana kondisi objektif guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?, 3) Bagaimana upaya pengawas Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan kompetensi guru PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

Jenis penelitian ini tergolong kualitatif dengan pendekatan penelitian yang digunakan adalah: teologis-normatif, pedagogis dan psikologis. Adapun sumber data dalam penelitian ini Kepala Seksi Pendidikan Islam, Ketua Kelompok Kerja Pengawas, Pengawas PAI, Kepala Sekolah, dan para guru Pendidikan Agama Islam serta dokumen-dokumen yang terkait. Selanjutnya, metode yang digunakan dalam mengumpulkan data adalah observasi, wawancara mendalam, dokumentasi dan penelusuran referensi. Kemudian instrumen dalam penelitian ini adalah penulis sendiri sebagai instrumen kunci. Lalu, pengolahan dan analisis data dilakukan dengan tiga tahapan, yaitu: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Kemudian untuk menguji keabsahan data digunakan dengan cara memperpanjang pengamatan, triangulasi (sumber dan teknik).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sudah memiliki kompetensi dasar, walaupun tidak semua komponen kompetensi terpenuhi secara utuh, namun demikian dari kondisi yang ada pengawas tetap melaksanakan tugasnya walaupun kurang maksimal karena tidak seimbang jumlah pengawas dengan guru PAI. Pelaksanaan tugas pengawas Pendidikan Agama Islam didukung dengan respon positif dari para guru PAI terhadap pelaksanaan tugas Pengawas. Pengawas dalam meningkatkan kompetensi para Guru PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dilakukan dengan berbagai upaya, seperti: melakukan kunjungan

sekolah/pertemuan pribadi secara rutin, terlibat dan melibatkan diri dalam berbagai kegiatan para guru PAI seperti MGMP. Hanya saja dalam penelitian ini ditemukan pula bahwa pengawas PAI dalam memberikan layanan supervisi cenderung berorientasi pada dokumen pembelajaran, dan belum sampai pada proses pembelajaran, karena selama ini pengawas belum melakukan observasi kelas/atau masuk dalam kelas memperhatikan proses pembelajaran

Implikasi dalam penelitian ini adalah: 1) Pihak yang berwenang seperti Kementerian Agama memberikan perhatian yang maksimal terhadap keberadaan pengawas yang sangat kurang jumlahnya, terutama memperjuangkan para guru PAI yang telah mengikuti seleksi kepengawasan di Makassar untuk diangkat menjadi pengawas, mengingat jumlah sekolah dan guru makin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk. 2) Pengawas perlu selalu memaksimalkan kerjanya dalam memberikan layanan supervisi kepada para Guru PAI. Pengawas perlu menerapkan berbagai teknik-teknik supervisi dan tidak hanya terfokus pada teknik pertemuan pribadi dan hanya sebatas pembinaan dalam pembuatan perangkat pembelajaran, akan tetapi sebaiknya ditingkatkan masuk dalam kelas melihat proses pembelajaran dan membuat langkah tindak lanjut pembinaan kepada para guru PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Selain itu pengawas juga perlu melakukan kerjasama yang intensif dengan para kepala sekolah yang juga sebagai supervisor di sekolah agar kerjasama antara mereka dapat menambah kualitas dari hasil supervisi mereka. 3) Guru Pendidikan Agama Islam tetap selalu meningkatkan kompetesinya seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain bantuan dari supervisor, para guru juga harus berupaya sendiri untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Walaupun mereka selalu mendapat layanan supervisi dari pengawas atau kepala sekolah mereka, namun itu tidak berarti sudah cukup. Memadukan antara apa yang didapat dari supervisor dan kepala sekolah dengan apa yang didapat sendiri akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Martiks Fokus .....	12
Tabel 3.1	Daftar sekolah menengah Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.....	79
Tabel 4.1	Daftar nama pengawas PAI sekolah menengah Kabupaten Pinrang .....	90
Tabel 4.2	Observasi realisasi kompetensi Akademik pengawas PAI pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang .....	94
Tabel 4.3	Wilayah kerja pengawas PAI pada sekolah menengah .....	97
Tabel 4.4	Wilayah kerja/jumlah supervisee pengawas PAI pada sekolah menengah.....	98
Tabel 4.5	Daftar nama guru PAI pada Sekolah Menengah Pertama wilayah II .....	98
Tabel 4.6	Daftar nama guru PAI pada Sekolah Menengah Atas wilayah II .....	101
Tabel 4.7	Daftar nama guru PAI pada Sekolah Menengah Kejuruan wilayah II.....	102
Tabel 4.8	Daftar nama guru PAI pada sekolah menengah di Kecamatan Patampanua .....	103
Tabel 4.9	Observasi perangkat pembelajaran guru PAI .....	106
Tabel 4.10	Beban kerja guru PAI SMPN 2 Patampanua.....	109
Tabel 4.11	Beban kerja guru PAI SMAN 1 Patamanua .....	109
Tabel 4.12	Beban kerja guru PAI SMPN 1 Patampanua.....	110
Tabel 4.13	Program kerja pengawas PAI pada sekolah menengah .....	112
Tabel 4.14	Penjabaran program kerja pengawas PAI .....	113
Tabel 4.15	Obsrvasi Penerapan program kerja pengawas PAI dengan berbagai teknik.....	120

## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat penunjukan promotor dan kopromotor .....	133
Lampiran 2	Surat izin penelitian .....	134-137
Lampiran 3	Surat keterangan wawancara .....	138-151
Lampiran 4	Surat keterangan wawancara II (perpanjangan pengamatan).....	152-153
Lampiran 5	Surat keterangan telah melaksanakan penelitian .....	154-159
Lampiran 6	Foto wawancara .....	160-169
Lampiran 7	Foto wawancara II (perpanjangan pengamatan).....	170
Lampiran 8	Foto proses pembelajaran .....	171-172
Lampiran 9	Pedoman wawancara .....	173-178
Lampiran 10	Pedoman observasi penelitian .....	179-182
Lampiran 11	Instrumen observasi pengawas .....	183-185
Lampiran 12	Perangkat Pembelajaran .....	186-197
Lampiran 13	Jadwal penelitian.....	198



## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Sudah menjadi kesepakatan bahwa pendidikan merupakan sarana dalam peningkatan taraf kualitas hidup. Banyak hal yang dapat diperoleh manusia dengan pendidikan. Pendidikan akan memudahkan manusia untuk meraih apa yang dicita-citakannya. Melalui pendidikan pula, manusia mampu menyelesaikan berbagai persoalan hidupnya dengan mudah.

Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses pematangan kualitas hidup. Melalui proses tersebut diharapkan manusia mampu memahami apa arti dan hakikat hidup. Melalui pendidikan pula manusia akan mengetahui untuk apa dan bagaimana menjalankan tugas hidup dan kehidupan dengan benar.<sup>1</sup> Sejalan dengan itu, dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dikemukakan bahwa;

Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara.<sup>2</sup>

Selain itu, pendidikan dimaknai sebagai semua tindakan yang mempunyai dampak pada perubahan watak, kepribadian, pemikiran dan perilaku. Dengan demikian, pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu, teori, dan fakta-fakta akademik semata, atau bahkan sekedar urusan ujian, penetapan kriteria kelulusan, serta pencetakan ijazah semata. Pendidikan pada hakikatnya merupakan proses

---

<sup>1</sup>Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing* (Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 2.

<sup>2</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. IV; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3.

pembebasan peserta didik dari ketidaktahuan, ketidakmampuan, ketidakberdayaan, ketidakbenaran, ketidakjujuran, dan dari buruknya hati, akhlak, dan keimanan.<sup>3</sup>

Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia asing terhadap dirinya dan asing terhadap hati nuraninya. Pendidikan tidak boleh melahirkan sikap, pemikiran, dan perilaku yang semu. Pendidikan tidak boleh menjadikan manusia di luar dirinya, akan tetapi pendidikan harus mampu menyatukan sikap, pemikiran, perilaku, hati nurani dan keimanan menjadi satu kesatuan yang utuh.

Dalam QS al-Jumu'ah/62: 2 Allah swt. berfirman sebagai berikut;

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ  
الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ

Terjemahnya

Dialah yang mengutus seorang rasul kepada kaum yang buta huruf dari kalangan mereka sendiri, yang membacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, menyucikan (jiwa) mereka, dan mengajarkan kepada mereka kitab dan hikmah (sunnah), meskipun sebelumnya, mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata.<sup>4</sup>

Quraish Shihab dalam menjelaskan ayat tersebut mengemukakan bahwa makna dua kata yakni *yuzakkihim* wa *yu'allimuhum* (menyucikan dan mengajarkan), *yuzakkihim* menyucikan diidentikkan dengan mendidik, sedangkan *yu'allimuhum* (mengajar), tidak lain kecuali mengisi benak peserta didik dengan pengetahuan yang berkaitan dengan alam metafisika dan fisika.<sup>5</sup>

Manusia yang dibina merupakan makhluk yang memiliki unsur-unsur material (jasmani) dan imaterial (akal dan jiwa). Pembinaan akalnya menghasilkan ilmu. Pembinaan jiwanya menghasilkan kesucian dan etika sedangkan pembinaan

<sup>3</sup>Dedi Mulyasana, *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*, h. 2.

<sup>4</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Syamil Quran: Bandung, 2010), h. 553.

<sup>5</sup>Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran* (Cet. XXVII; Bandung: Mizan, 2004), h. 172.

jasmaninya menghasilkan keterampilan. Dengan penggabungan tersebut maka akan lahir manusia dwidimensi dalam satu keseimbangan dunia dan akhirat, ilmu dan iman.<sup>6</sup>

Sementara Abd. Al-Rahman Shaleh yang dikutip oleh Abdul Mujib bahwa tujuan pendidikan berorientasi pada pendidikan jasmani, rohani, pendidikan akal dan pendidikan sosial.<sup>7</sup>

Untuk itu, proses pembelajaran tidak hanya menekankan pada hafalan dan latihan penguasaan soal-soal ujian. Proses pembelajaran juga tidak seperti mengibaratkan peserta didik sebagai botol kosong, yang artinya guru mengisi pengetahuan kepada peserta didiknya yang bersumber dari pengetahuan sang guru, akan tetapi makna pendidikan lebih menekankan pada bagaimana peserta didik menemukan jati dirinya dan mampu menggali berbagai potensi yang dimilikinya dan mampu memanfaatkan kemampuannya dalam kehidupan mereka.

Wina Sanjaya mengemukakan bahwa salah satu masalah yang dihadapi dunia pendidikan Indonesia adalah lemahnya proses pembelajaran. Dalam pembelajaran anak kurang diarahkan untuk mengembangkan kemampuan berfikir peserta didik. Proses pembelajaran justru cenderung diarahkan kepada kemampuan peserta didik untuk menghafal berbagai informasi. Otak peserta didik dipaksa untuk mengingat dan menimbun berbagai informasi tanpa dituntut untuk memahami informasi yang diingatnya untuk menghubungkan dengan kehidupan sehari-hari.

---

<sup>6</sup>Quraish Shihab, *Membumikan al-Quran*, h. 173.

<sup>7</sup>Lihat Abdul Mujib dan Jusuf Mudzakkir, *Ilmu Pendidikan Islam*, dengan kata pengantar oleh Suyanto (Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010), h. 78-79.



Akibatnya ketika peserta didik lulus dari sekolah, mereka kaya akan teori, tetapi miskin dalam aplikasi.<sup>8</sup>

Dalam mewujudkan pendidikan sebagaimana yang dimanahkan undang-undang maka harus dikelola secara profesional dengan cara menyerahkan pengelolaannya kepada orang yang profesional pula. Pendidikan harus dikelola dengan serius dan tidak setengah hati. Semua unsur yang terkait harus mampu berperan aktif pada porsi dan proporsinya masing-masing. Karena pendidikan merupakan suatu sistem yang tidak hanya diserahkan kepada satu kelompok manusia saja. Hal ini sebagaimana dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional yang mengemukakan bahwa “sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”.<sup>9</sup> Di antara komponen pendidikan termasuk *stakeholder* maka gurulah yang pada hakikatnya memiliki porsi yang lebih besar, hal ini dikarenakan gurulah yang berhadapan langsung dengan peserta didik. Selain itu, guru juga sebagai operasional pelaksana lapangan dalam menjalankan kebijakan-kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Dengan demikian, kualitas suatu pendidikan sangat ditentukan seberapa besar kualitas dan kompetensi yang dimiliki oleh para pendidik.

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 diungkapkan bahwa “Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih menilai dan mengevaluasi peserta

---

<sup>8</sup>Wina Sanjaya, *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan* (Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2012), h. 1. Lihat juga Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. III; Bandung, Alfabeta, 2011), h. iv.

<sup>9</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional*, h. 3.



didik...”.<sup>10</sup> Kemudian lebih lanjut dalam undang-undang dikemukakan pula bahwa yang dimaksud dengan profesional adalah pekerjaan atau kegiatan dan menjadi sumber penghasilan yang memerlukan keahlian, kemahiran atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>11</sup>

Begitu besar tanggung jawab yang dibebankan kepada guru dalam hal peningkatan kualitas pendidikan, sehingga ketika terjadi berbagai ketimpangan dalam pendidikan, seperti menurunnya prestasi akademik peserta didik atau sampai pada perilaku amoral dari peserta didik maka gurulah yang menjadi sasaran untuk dipersalahkan.<sup>12</sup> Padahal semestinya semua kesalahan tidak sepenuhnya bersumber dari guru, walaupun berbagai penelitian menunjukkan bahwa memang ada korelasi antara kinerja guru dengan prestasi belajar peserta didik. Namun yang perlu menjadi catatan bahwa saling menyalahkan atau saling tuding menuding terhadap siapa yang paling bertanggung jawab bukanlah jalan terbaik, karena tidak akan menyelesaikan masalah. Bahkan saling menyalahkan akan menimbulkan banyak masalah baru, karena energi akan habis dalam perdebatan saling menyalahkan dan tidak ada waktu lagi untuk mencari solusi penyelesaian masalah yang ada.

Tidak dapat dipungkiri bahwa kualitas pendidikan di Indonesia masih diramaikan dengan berbagai perspektif negatif. Hal ini diperkuat dengan pernyataan mantan Menteri Pendidikan Nasional Wardiman Djoyonogoro yang dikutip E. Mulyasa mengemukakan bahwa hanya 43% guru di Indonesia yang memenuhi

---

<sup>10</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *tentang Guru dan Dosen* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), h. 3.

<sup>11</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 *tentang Guru dan Dosen*, h. 4.

<sup>12</sup>Sudarwan Danim, *Pedagogik, Adragogi, dan Heutagogi* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2013), h. iii.

syarat dalam mengajar. Artinya sebagian besar atau 57% guru yang tidak memenuhi syarat atau tidak kompeten dan profesional dalam mengajar.<sup>13</sup>

Pernyataan dari Wardiman tersebut ternyata terbukti dari hasil Uji Kompetensi Guru (UKG) yang dilaksanakan pada tahun 2012 gelombang pertama, peserta UKG hanya mendapat nilai rata-rata 4,45 jauh dari batas minimal yang ditetapkan yakni 7 (tujuh), itu untuk daerah Yogyakarta yang mendapat nilai tertinggi. Bahkan dalam tahap pertama tersebut malah ada peserta UKG yang mendapat nilai nol.<sup>14</sup> Pernyataan Wardiman dan data UKG tersebut menjadi dasar bahwa perlu adanya peningkatan kualitas profesional guru.

Profesi guru merupakan bidang pekerjaan khusus, sehingga untuk menjadi guru harus memiliki bakat, minat, panggilan jiwa dan idealisme.<sup>15</sup> Sehingga sangat keliru bila diasumsikan bahwa pekerjaan guru itu mudah dan siapa saja boleh menjadi guru asalkan mengetahui materi yang akan diajarkan. Menjadi guru harus total, tidak bisa setengah-tengah, apalagi menjadikan guru sebagai batu loncatan dalam mencapai suatu tujuan yang lebih tinggi.

Guru dalam mengembangkan tugas yang sangat mulia tapi juga sangat berat itu tidak bisa dibiarkan bekerja sendiri, walaupun pada hakikatnya dia sudah memiliki kualifikasi pendidikan. Guru perlu mendapat bantuan moril, spirit, dukungan dalam meningkatkan profesionalnya, sehingga menjadi seorang guru yang profesional.

Ilmu mendidik yang diperoleh guru di bangku kuliah merupakan modal berharga dalam menggeluti profesinya. Namun itu tidak berarti bahwa ilmu yang didapat sudah cukup atau sempurna. Ilmu yang diperoleh di bangku kuliah harus

---

<sup>13</sup> E. Mulyasa, *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan* (Cet. XI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3.

<sup>14</sup> Momon Sudarma, *Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci* (Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), h. 24.

<sup>15</sup> Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 9.

selalu dikembangkan dan ditingkatkan. Guru seharusnya tidak puas dengan apa yang telah diperoleh, tapi harus selalu merespon segala perkembangan dan kemajuan zaman, terutama perkembangan dan kemajuan dalam bidang pendidikan. Karena terkadang teori yang diperoleh di bangku kuliah berbeda dengan realitas di lapangan. Seorang guru dituntut aktif dalam meningkatkan kualitas dan kapabilitas serta kapasitas ilmu mendidiknya, karena salah satu kompetensi yang wajib dimiliki guru adalah kompetensi profesional dimana guru dituntut untuk selalu mengembangkan potensi dirinya.

Hal senada dikemukakan oleh Syaiful Sagala bahwa peningkatan kemampuan profesional guru akan berhasil apabila dilakukan oleh guru dengan kemauan dan usaha mereka sendiri. Namun, seringkali guru masih membutuhkan bantuan orang lain karena belum mengetahui atau memahami jenis, prosedur dan mekanisme memperoleh berbagai sumber yang sangat diperlukan dalam usaha meningkatkan kemampuan profesional mereka dan bantuan yang diperlukan guru adalah dalam bentuk supervisi.<sup>16</sup>

Guru perlu dibantu dalam menjalankan tugasnya. Pada dasarnya rancangan teoritik pihak yang diharapkan memberikan bantuan melalui supervisi kepada guru adalah kepala sekolah dan pengawas. Hanya saja fungsi ini terkadang tidak terlaksana dengan efektif.<sup>17</sup> Tidak efektifnya fungsi pengawas dilatarbelakangi berbagai faktor, seperti ketidak mampuan pengawas menjalankan tugasnya dengan baik karena tidak memiliki kompetensi atau tidak tersedianya sarana dan prasarana yang mendukung tugas kepengawasan.

---

<sup>16</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 88.

<sup>17</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 4.

Pada dasarnya pengawas merupakan sebuah jabatan fungsional yang turut berkontribusi dan berperan aktif dalam menentukan kualitas pendidikan. Sepakterjang pengawas dalam melakukan layanan supervisi kepada pendidik memberikan kontribusi besar terhadap peningkatan mutu pendidikan. Berbagai persoalan yang dialami oleh guru dalam melaksanakan proses pembelajaran dapat diselesaikan dengan bantuan pengawas.

Hal tersebut sesuai dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pada bab I pasal 1 butir 2 mengemukakan bahwa:

Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.<sup>18</sup>

Keberadaan pengawas dalam dunia pendidikan merupakan suatu hal yang sangat dibutuhkan. Pengawas sangat diharapkan dapat membantu guru dalam meningkatkan profesionalnya. Selain pengawas dapat meningkatkan profesional guru, pengawas juga dapat menjadi mediator dan fasilitator dalam pengadaan berbagai kebutuhan guru bahkan kebutuhan-kebutuhan sekolah, seperti sarana dan prasarana.

Pengawas tidak sebagai unsur pelengkap dalam dunia pendidikan. Pengawas juga bukan merupakan tempat perkumpulan orang-orang yang akan menghabiskan masa dinasny, akan tetapi pengawas merupakan kebutuhan pokok dalam peningkatan kualitas pendidikan. Pengawas merupakan tenaga kependidikan yang

---

<sup>18</sup> Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, *tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya* (Cet. II; Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP Kemeterian Pendidikan Nasional, 2011), h. 34.

sangat diharapkan dan seharusnya berperan aktif dalam peningkatan kualitas pendidikan.

Pengawas merupakan tempat pemecahan masalah bagi para guru. Berbagai persoalan yang dihadapi guru ketika mengajar dapat dikonsultasikan kepada pengawas untuk dicarikan solusi. Dengan demikian, pengawas seyogyanya memiliki pengetahuan lebih, karena akan selalu dimintai bantuan dari guru. Hal ini sejalan dengan firman Allah dalam QS al-Anbiya 21: 7 sebagai berikut:

...فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

Terjemahnya

...maka tanyakanlah kepada orang yang berilmu, jika kamu tidak mengetahui.<sup>19</sup>

Ayat tersebut memberikan gambaran bahwa pengawas merupakan tempat bertanya para guru ketika menghadapi persoalan yang tidak diketahuinya. Hanya saja di satu sisi, justru sebagian pengawas merasa kurang percaya diri mensupervisi para guru disebabkan karena kurang memiliki kemampuan. Mereka terkadang berasumsi bahwa kemampuan pedagogik yang dimiliki guru melebihi kemampuannya sebagai pengawas. Sementara di sisi lain, supervisor memiliki tugas berat yaitu bagaimana membongkar stigma klasik dari para guru tentang keberadaan pengawas. Selama ini, sebagian besar guru menganggap bahwa keberadaan pengawas hanya akan mengebiri profesionalnya sebagai guru. Cara-cara negatif yang diterapkan pengawas membuat guru kaku dalam menjalankan tugasnya. Guru merasa didikte oleh pengawas, sehingga guru merasa sangat sulit mengembangkan dirinya sendiri.

---

<sup>19</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*, h. 322.

Untuk menjadi seorang pengawas dibutuhkan berbagai kompetensi yang akan menjadi penunjang dalam pelaksanaan tugas kepengawasan. Sebagaimana halnya guru, pengawas juga tidak bisa dipercayakan kepada sembarang orang. Karena untuk menjadi pengawas memiliki berbagai persyaratan yang harus terpenuhi. Selain persyaratan kualifikasi maka kompetensi kepengawasan juga menjadi salah satu syarat yang harus terpenuhi sebagai pengawas.

Kedudukan supervisor dalam dunia pendidikan sangat penting, sehingga orang yang diberikan amanah mengembangkan tugas supervisi adalah orang-orang yang profesional di bidang kepengawasan. Tugas kepengawasan tidak boleh diamanahkan kepada orang yang tidak kompeten, karena tidak akan membawa dampak positif kepada guru, bahkan akan membawa dampak negatif. Hal tersebut sejalan dengan sabda Nabi Muhammad saw. sebagai berikut:

عَلَيْهِ : غَيْرُ أَهْلِهِ فَنُظَرُ  
 20( )

Artinya

Dari Abu Hurairah r.a. Rasulullah saw. bersabda apabila suatu perkara diserahkan kepada yang bukan ahlinya maka tunggulah kehancurannya (HR. Bukhari nomor 57)

Kompetensi kepengawasan merupakan syarat utama di samping syarat-syarat lain yang harus dimilikinya. Karena sebagaimana hadis tersebut memberikan gambaran negatif yang akan ditimbulkan terhadap penyerahan tugas kepada seseorang yang tidak dibarengi dengan kompetensi, termasuk pengawas di dalamnya.

---

<sup>20</sup>Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Isma'il Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, Bardizbah al Bukhari al Jaffi, *Shahih Bukhari* Juz I (Beirut: Dar-al-Kutb al-Ilmiyah, 1992), h. 26.

Selain kualifikasi dan kompetensi yang menjadi syarat utama menjadi pengawas maka pengawas tidak cukup hanya teruji kapabilitas dan kapasitasnya, akan tetapi pengawas juga terpuji, dalam artian memiliki perilaku etik sehingga dapat menjadi teladan para guru. Selain teruji dan terpuji pengawas dalam menjalankan tugasnya harus percaya diri dan dapat dipercaya.

Made Pidarta mengemukakan bahwa dalam mempercayakan seseorang menjadi pengawas haruslah dipersiapkan lebih matang. Sebelum mengembangkan tugas kepengawasan maka calon pengawas perlu dibekali dengan ilmu kepengawasan yang memadai. Para calon pengawas perlu ditingkatkan kualifikasi pendidikannya yang khusus konsentrasi kepengawasan. Sehingga kemudian sebelum mengembangkan tugas mereka sudah betul-betul memiliki kemampuan yang memadai.<sup>21</sup>

Begitu pentingnya kedudukan kepengawasan, sehingga diharapkan para pengawas betul-betul dapat memberikan bantuan atau layanan supervisi kepada para guru. Supervisi akan mudah menjalankan tugasnya apabila mampu menempatkan diri sebagai pengawas profesional yang orientasinya mengembangkan profesional guru. Pengawas sebaiknya tidak terlalu memperbesar masalah-masalah kecil yang dihadapi guru, akan tetapi bagaimana pengawas membantu guru dalam menyelesaikan atau keluar dari berbagai masalah yang dihadapinya.

### **B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus**

Untuk mengarahkan penelitian ini maka perlu menetapkan fokus penelitian. Hal ini penting agar dalam penelitian, penulis terarah dan terfokus dalam melaksanakan penelitian serta menjadi panduan dalam penelitian. Selain itu fokus penelitian juga bertujuan agar penulis tidak terjebak pada hal-hal yang tidak

---

<sup>21</sup>Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 30.

berhubungan dengan substansi penelitian atau hal-hal di luar konteks penelitian.

Adapun fokus penelitian ini akan dijabarkan dalam bentuk matriks sebagai berikut:

Tabel 1.1

Matriks Fokus Penelitian

No.	Fokus	Deskripsi Fokus
1	Kompetensi pengawas PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang	a. Kompetensi Akademik b. Kompetensi Profesional
2	Kondisi objektif guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang	a. Kualifikasi b. Kompetensi guru PAI c. Cakupan tugas dan beban kerja
3	Upaya pengawas PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam mewujudkan kompetensi guru PAI	a. Penyusunan program kerja b. Melakukan pendekatan-pendekatan c. Realisasi program kerja

Berdasarkan matriks di atas maka fokus penelitian ini adalah perwujudan guru PAI yang kompeten melalui bantuan pengawas PAI yang terencana dalam program kerja sesuai dengan kebutuhan guru.

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang dan fokus penelitian di atas maka penulis merumuskan masalah pokok yaitu “Bagaimana Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Guru Pendidikan Agama Islam yang



Berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang”. Dari pokok masalah tersebut, dijabarkannya dalam beberapa sub masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana kompetensi pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?
2. Bagaimana kondisi objektif guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?
3. Bagaimana upaya pengawas Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan kompetensi guru PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang?

#### **D. *Kajian Pustaka***

Penelitian ini spesipik mengkaji tentang Kontribusi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan guru Pendidikan Agama Islam yang berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Dalam penelusuran penulis pada dasarnya penelitian tentang pengawas atau supervisor dalam kaitannya dengan guru sudah banyak dikaji dan dibahas oleh penulis sebelumnya. Banyak karya tulis yang relevan dengan objek penelitian yang dilakukan oleh penulis sebelumnya. Di antara literatur yang ditemukan dari beberapa sumber pustaka yang relevan dengan penelitian ini sebagaimana dikemukakan di bawah ini.

Sunaryo dengan hasil penelitiannya mengemukakan bahwa strategi yang dilakukan pengawas di SMK Muhammadiyah Kabupaten Tolitoli adalah dengan melakukan pembaruan program sekolah secara profesional dengan mengacu pada delapan standar nasional pendidikan.<sup>22</sup>

Idris dengan hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pengaruh supervisi pendidikan dalam meningkatkan kemampuan profesional guru pada Madrasah

---

<sup>22</sup>Sunaryo, Strategi Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan dalam Upaya Peningkatan Mutu SMK Muhammadiyah Tolitoli di Kabupaten Tolitoli *Tesis*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.

Aliyah Negeri (MAN) 2 dan Madrasah Aliyah Negeri (MAN) 1 di Watampone sangat besar utamanya dalam mengelola kegiatan belajar mengajar yang akan berdampak pada proses belajar siswa yang efektif dan efisien.<sup>23</sup>

Ismail Huntua dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa implementasi supervisi menunjukkan arah pengawasan yang baik, meskipun pelayanan supervisi terhadap sekolah binaan belum terjangkau secara merata.<sup>24</sup>

Arsyad Parenrengi dalam hasil penelitiannya mengungkapkan bahwa kinerja pengawas di Kabupaten Sinjai sangat tinggi, sehingga kinerja pengawas guru PAI di Kabupaten Sinjai berpengaruh positif terhadap kinerja guru Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah (SMA dan MA) di Kabupaten Sinjai.<sup>25</sup>

Musdalifa dalam penelitiannya mengemukakan hasil yang berbeda, dalam penelitiannya berkesimpulan bahwa implementasi tugas pengawas Pendidikan Agama Islam dalam pelaksanaan supervisi pendidikan di Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) Model Makassar menunjukkan ketidakmampuan dan rendahnya kinerja pengawas. Hasil penelitian Musdalifa juga mengemukakan bahwa guru MTs Negeri Model Makassar dalam melaksanakan tugas pokoknya menunjukkan kinerja tinggi sesuai dengan standar kerja yang telah ditetapkan.<sup>26</sup>

---

<sup>23</sup>Idris, Pengaruh Supervisi Terhadap Peningkatan Kemampuan Profesionalisme Guru pada Madrasah Aliyah di Watampone, *Tesis*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008.

<sup>24</sup>Ismail Huntua, Kinerja Supervisor dalam Meningkatkan Kreativitas Guru PAI SMP Negeri di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo, *Tesis*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013

<sup>25</sup>M. Arsyad Parenrengi, Pengaruh Kinerja Pengawas Terhadap Kinerja Guru PAI pada Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Sinjai, *Disertasi*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2007.

<sup>26</sup>Musdalifa, Implementasi Tugas Pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar, *Disertasi*, Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.

Berdasarkan dari berbagai penelitian sebelumnya, pada dasarnya penelitian tersebut relevan dengan yang akan diteliti penulis, terutama pada sasaran penelitian yaitu pengawas Pendidikan Agama Islam dan guru Pendidikan Agama Islam. Akan tetapi penelitian sebelumnya belum ada yang membahas secara spesifik tentang kontribusi pengawas dalam mewujudkan guru Pendidikan Agama Islam yang berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

#### **E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

##### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari tesis ini adalah sebagai berikut:

- a. Untuk mengetahui dan menggambarkan kompetensi pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
- b. Untuk mengetahui dan menggambarkan kondisi objektif baik kualifikasi maupun kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.
- c. Untuk mengetahui upaya pengawas dalam mewujudkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

##### **2. Kegunaan Penelitian**

###### **a. Kegunaan Ilmiah**

Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber bacaan yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya terutama *stakeholder* dan para pendidik serta tenaga kependidikan terutama bagi pengawas dan guru Pendidikan Agama Islam. Selain itu, penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya khazanah ilmu intelektual terutama dalam bidang kepengawasan dalam peningkatan kompetensi guru, sehingga dapat terwujud tujuan pendidikan sebagaimana dalam amanah al-Qur'an dan hadis serta undang-undang.

b. Kegunaan Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan atau sumbangsih pemikiran positif kepada pendidik dan tenaga kependidikan terutama pengawas dan para guru Pendidikan Agama Islam khususnya dalam peningkatan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.



## BAB II

### TINJAUAN TEORETIS

#### ***A. Konsep Dasar Supervisi***

##### **1. Pengertian Supervisi**

Supervisi dan pengawas merupakan dua kata yang sampai sekarang masih dalam berdebatan. Berbagai alasan yang dikemukakan untuk saling menguatkan pendapat masing-masing. Namun yang pasti bahwa tujuan dari apa yang mereka maknai dengan kedua kata tersebut pada dasarnya sama, yakni orientasinya pada pengembangan kualitas pendidikan. Untuk tidak larut dalam perdebatan yang hanya akan menghabiskan energi dan waktu, penulis akan menguraikan definisi kedua kata tersebut.

Secara etimologi supervisi berasal dari bahasa Inggris dan terdiri dua kata yaitu *super* yang berarti orang yang lebih di atas dan *vision* berarti melihat.<sup>1</sup> Jadi supervisi dapat dimaknai sebagai orang yang memiliki kapasitas dan kapabilitas lebih dalam melihat atau memberikan penilaian terhadap orang yang berada di bawahnya.

Sementara secara terminologi istilah supervisi banyak didefinisikan oleh para tokoh di antaranya N.A. Ametembun merumuskan bahwa “supervisi pendidikan adalah supervisi kearah perbaikan situasi pendidikan...”.<sup>2</sup> Sementara menurut M. Ngalim Purwanto bahwa supervisi adalah “suatu aktivitas pembinaan

---

<sup>1</sup>Suharsimi Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004), h. 2.

<sup>2</sup>Pupuh Fathurrohman dan AA Suryana, *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran* (Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2011), h. 7.

yang direncanakan untuk membantu para guru dan pegawai sekolah lainnya dalam melakukan pekerjaan mereka secara efektif”.<sup>3</sup>

Lebih lanjut Soetopo mengemukakan bahwa supervisi pembelajaran adalah;

Usaha menstimulir, mengkordinir, dan membimbing pertumbuhan para guru di sekolah, baik secara individual maupun kelompok, dengan tenggang rasa dan tindakan-tindakan pedagogis yang efektif, sehingga mereka lebih mampu menstimulir dan membimbing pertumbuhan masing-masing siswa....<sup>4</sup>

Hal senada pula dikemukakan oleh Kimbal Wiles yang mengatakan bahwa:

*“Supervision is a service activity that exists to help teachers do their job better.”*<sup>5</sup>

Artinya: Supervisi adalah suatu kegiatan pelayanan yang berlangsung untuk membantu guru melakukan pekerjaan yang lebih baik.

Makna supervisi mempunyai pengertian yang luas yakni segala layanan supervisor dalam bentuk supervisi yang diberikan kepada supervisee. Layanan tersebut bisa berupa bimbingan, bantuan, petunjuk dalam peningkatan atau perbaikan, baik dalam perencanaan, proses sampai kepada penilaian dan evaluasi pembelajaran. Selain itu, makna supervisi bisa juga sebagai memotivasi para tenaga pendidik untuk selalu meningkatkan profesionalitasnya dalam pembelajaran.

Sementara secara etimologi kata pengawas berasal dari kata “awas” yang berarti dapat melihat baik-baik: tajam penglihatan<sup>6</sup>, kemudian dari kata “awas” diawali dengan awalan “peng” sehingga menjadi pengawas yang berarti orang yang melihat dan memperhatikan (tingkah laku orang). Dengan demikian ketika kata

---

<sup>3</sup>M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* (Cet. XXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 76.

<sup>4</sup>Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru Memberdayakan Pengawas Sebagai Gurunya Guru* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 3.

<sup>5</sup>Kimbal Wiles, *Supervision for Better School* (New Jersey: Englewood Cliffs Prentice Hall, 1983), h. 53.

<sup>6</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia* Edisi Ketiga (Cet. IV; Bandung: Balai Pustaka, 2007), h. 79.

pengawas di arahkan ke dunia pendidikan maka dapat diartikan sebagai orang yang memperhatikan atau melihat tingkah laku guru dalam melaksanakan pembelajaran, baik dalam perencanaan, proses sampai pada hasil yang dicapai.

Menurut Siagian pengawas secara terminologi, pada umumnya diartikan dengan proses pengamatan dan pencermatan kritis dari pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar semua pekerjaan yang sedang dilaksanakan berjalan sesuai dengan rencana yang ditetapkan.<sup>7</sup>

Sementara dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya pada bab I pasal 1 butir 2 dikemukakan bahwa:

Pengawas sekolah adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diberi tugas, tanggung jawab dan wewenang untuk melaksanakan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan.<sup>8</sup>

Kemudian lebih lanjut Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam Kementerian Agama RI. Mengemukakan bahwa secara sederhana, pengawasan dapat diartikan sebagai suatu proses (kegiatan) mengamati, mendata (kekuatan, kelemahan, peluang, tantangan), membandingkan, memengaruhi atau mengarahkan dan menilai pelaksanaan kegiatan agar dapat berjalan sesuai dengan rencana dan tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks itu, pengawasan sangat erat kaitannya

---

<sup>7</sup>Departemen Agama RI., *Pedoman Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA dan SMK)* (Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, 2009), h. 5.

<sup>8</sup>Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, *tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya* (Cet. II; Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP Kemeterian Pendidikan Nasional, 2011), h. 34.

dengan analisa proses perencanaan, sasaran dan kebijakan-kebijakan yang telah ditentukan dan ditetapkan.<sup>9</sup>

Dari definisi-definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa pengawas pendidikan adalah sebuah jabatan fungsional yang memiliki kapasitas dan kapabilitas dalam tugas kepengawasan untuk melakukan pengamatan secara mendalam terhadap perencanaan, proses dan evaluasi pembelajaran untuk peningkatan kualitas proses pembelajaran yang kemudian menghasilkan peserta didik yang bermutu.

Kalau dibandingkan antara definisi supervisi dengan pengawas secara etimologi maka pada dasarnya terdapat perbedaan, terutama kata awas yang seakan-akan mengingatkan akan sesuatu yang berbahaya atau ditakuti, akan tetapi kalau menyimak definisinya secara terminologi maka pada hakikatnya tidak ada perbedaan yang mendasar, karena keduanya berorientasi kepada layanan pengawas dalam memberikan bantuan peningkatan pembelajaran yang dilakukan guru, mulai dari perencanaan, proses, penilaian dan evaluasi.

Dadang Suhardan mengemukakan hal yang sama, dia justru mendefinisikan supervisi sebagai kegiatan akademik berupa pengawasan yang dijalankan oleh orang yang memiliki pengetahuan lebih tinggi dan lebih dalam dengan tingkat kepekaan yang tajam dalam memahami objek pekerjaannya dengan hati yang jernih. Atau supervisi dapat pula diartikan sebagai pengawasan profesional dalam bidang akademik, dijalankan berdasarkan kaidah-kaidah keilmuan tentang bidang kerjanya, memahami tentang pembelajaran lebih mendalam dari sekedar pengawas biasa.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Departemen Agama RI., *Pedoman Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA dan SMK)* , h. 4-5.

<sup>10</sup> Dadang Suhardan, *Supervisi Profesional Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah* (Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 35-36.



Kata supervisi lebih populer dikalangan akademisi. Hal ini dapat dilihat dari berbagai literatur yang cenderung menggunakan kata supervisi dari pada pengawas. Mereka beralasan istilah pengawas merupakan turunan dari istilah klasik seperti inspeksi atau penilikan. Sementara istilah pengawas populer dikalangan birokrasi. Hal ini dapat dilihat dari produk regulasi yang dibuat selalu menggunakan istilah pengawas.

Dalam perjalanan sejarah kepengawasan sudah dikenal berbagai istilah-istilah, mulai dari *paidonomos* (digunakan sebelum abad 18) yang bertugas untuk mengontrol pendidikan secara ketat karena berorientasi pada pendidikan kemiliteran.<sup>11</sup> Kemudian ada istilah inspeksi yang mengandung makna melihat untuk mencari-cari kesalahan. Kemudian ada juga pemeriksaan yang berarti melihat apa yang terjadi dalam kegiatan. Kemudian istilah penilikan dan pengawasan yang orientasinya bermakna melihat apa yang positif dan yang negatif.<sup>12</sup> Kemudian dari istilah-istilah itulah yang menjadi alasan utama para akademisi lebih cenderung menggunakan kata supervisor dari pada kata pengawas.

Menurut penulis, perlu diadakan penelitian lebih mendalam lagi terhadap penggunaan kata yang tepat untuk profesi kepengawasan. Perlu pengkajian mendalam bahwa apakah penggunaan kata antara pengawas dan supervisi mempunyai pengaruh signifikan terhadap persepsi dalam keprofesionalan guru. Hal ini penting agar supaya para *stakeholder* tidak menghabiskan energi berdebat soal penggunaan kata yang pada dasarnya memiliki tujuan yang sama.

---

<sup>11</sup>Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual* (Cet. I: Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 64.

<sup>12</sup>Suharsimin Arikunto, *Dasar-dasar Supervisi*, h. 3.

## 2. Kompetensi Pengawas

Istilah kompetensi seringkali lebih populer dan lebih mudah memaknainya dibandingkan dengan istilah kinerja. Standar kompetensipun cenderung lebih mudah dibuat ketimbang standar kinerja yang cenderung subjektif. Kompetensi dan kinerja berbeda adanya. Kinerja cenderung dipersepsi sebagai tampilan riil di dunia kerja secara berbasis pada kompetensi dasar. Sementara kompetensi merupakan sebuah prakondisi, berupa penguasaan dasar teoritis tertentu untuk dapat tampil secara riil pada tempat unit-unit layanan yang diperlukan.

Kompetensi merupakan seperangkat pengetahuan, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang direpleksikan dalam kebiasaan berfikir dan bertindak. Kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kinerja yang dibutuhkan oleh masyarakat di dunia kerja.<sup>13</sup>

Kata kompetensi bisa juga diartikan sebagai kecakapan, kewenangan, kekuasaan dan kemampuan.<sup>14</sup> Selain itu, kompetensi dapat pula dimaknai sebagai seperangkat pengetahuan, keterampilan dan perilaku yang harus dimiliki, dihayati dan dikuasai oleh seseorang untuk dapat melaksanakan tugas-tugas profesionalnya.<sup>15</sup>

Kompetensi merupakan pengetahuan teori, atau pemahaman, atau wewenang yang kemudian siap diaplikasikan dalam dunia dimana seseorang bekerja. Kompetensi yang dimiliki seseorang akan bermanfaat besar apabila kompetensi

---

<sup>13</sup>Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 125.

<sup>14</sup>Pius A. Partanto dan M. Dahlan al Barry, *Kamus Ilmiah Populer* (Surabaya: Arkola, 2011), h. 358.

<sup>15</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 160.

yang dimilikinya sesuai dengan dunia kerja yang digelutinya. Begitupula sebaliknya, kompetensi tidak memiliki kontribusi besar apabila tidak sesuai dengan bidang pekerjaan yang digeluti seseorang.

Selanjutnya supervisor adalah orang yang bertugas melakukan supervisi atau yang lazim disebut pengawas.<sup>16</sup> Dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 tentang standar pengawas madrasah disebutkan bahwa pengawas sekolah dan madrasah memiliki 6 (enam) kompetensi yaitu, kompetensi kepribadian, kompetensi supervisi manajerial, kompetensi supervisi akademik, kompetensi evaluasi pendidikan, kompetensi penelitian dan pengembangan dan kompetensi sosial.<sup>17</sup>

Sementara dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah, bab VI pasal 8 butir (1) menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh pengawas madrasah dan Pengawas PAI pada sekolah meliputi:

- a. Kompetensi kepribadian
- b. Kompetensi supervisi akademik
- c. Kompetensi evaluasi pendidikan
- d. Kompetensi penelitian dan pengembangan
- e. Kompetensi sosial<sup>18</sup>

Menurut penulis, ada perbedaan pandangan yang mendasar tentang kompetensi manajerial antara menteri pendidikan nasional dan menteri agama. Hal ini dapat dilihat dari regulasi yang mereka produksi. Permendiknas tidak

---

<sup>16</sup>Maryono, *Dasar-dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan* (Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2011), h. 17.

<sup>17</sup>Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 tentang *Standar Pengawas Sekolah dan Madrasah*.

<sup>18</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang *Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*.

mencantumkan kompetensi manajerial ketika berbicara masalah kompetensi guru, tetapi ketika berbicara masalah kepengawasan mencantumkan kompetensi manajerial. Sementara permenag justru kebalikannya, permenag mencantumkan kompetensi manajerial atau kepemimpinan ketika berbicara masalah guru, tetapi ketika berbicara masalah kepengawasan justru hanya mengkhaskan kompetensi manajerial kepada pengawas madrasah dan tidak untuk pengawas Pendidikan Agama Islam. Sementara menurut penulis kedua posisi tersebut, baik itu guru maupun pengawas sama-sama membutuhkan kompetensi manajerial.<sup>19</sup> Untuk itu berikut ini diuraikan kompetensi-kompetensi pengawas;

a. Kompetensi Kepribadian

Keberhasilan pelaksanaan tugas pengawas erat kaitannya dengan pribadi pengawas itu sendiri, karena faktor individu merupakan kunci utama di balik kesuksesan suatu pekerjaan. Lebih lanjut Thomkins dan Bacley mengemukakan bahwa “kualitas pengawas penting bagi supervisor sebagai berikut: memiliki intuisi yang baik, kerendahan hati, keramah-tamahan, ketekunan, sifat humor dan kesabaran”.<sup>20</sup>

Dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2012 bab VI pasal 8 dikemukakan bahwa kompetensi kepribadian meliputi

- a. Memiliki akhlak mulia dan dapat diteladani;
- b. Memiliki tanggung jawab terhadap tugas;
- c. Memiliki kreatifitas dalam bekerja dan memecahkan masalah yang berkaitan dengan tugas dan jabatan;

---

<sup>19</sup>Bandingkan antara Undang-Undang RI. Nomor 14 Tahun 2005 *tentang Guru dan Dosen* dan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 *tentang Standar Pengawas Sekolah dan Madrasah*. Dengan Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*.

<sup>20</sup>M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan* , h. 85.

- d. Memiliki keinginan yang kuat untuk belajar hal-hal yang baru tentang pendidikan dan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni yang menunjang tugas pokok dan tanggung jawabnya; dan
- e. Memiliki motivasi yang kuat kerja pada dirinya dan pada pihak-pihak pemangku kepentingan.<sup>21</sup>

Dari komponen kompetensi kepribadian tersebut pada dasarnya berorientasi pada dua aspek, yaitu aspek perilaku yang dicerminkan dalam perbuatan sehari-hari dan aspek semangat, motivasi dan kreatifitas yang selalu terpelihara dalam diri seorang pengawas, baik itu semangat dalam menjalankan tugas kepengawasannya maupun dalam mengembangkan kemampuan dan keterampilannya dengan selalu mengakses informasi-informasi baru tentang tugasnya.

#### b. Kompetensi Supervisi Manajerial.

Kompetensi supervisi manajerial merupakan kompetensi yang harus dimiliki oleh supervisor yang orientasi kerjanya pada keseluruhan komponen sekolah. Seorang supervisor sangat diharapkan memberikan layanan supervisi manajerial untuk menciptakan iklim sekolah yang kondusif.

Menurut Nana Sujana dkk, supervisi manajerial merupakan fungsi supervisi yang berkenaan dengan aspek pengelolaan sekolah yang terkait langsung dengan peningkatan efisiensi dan efektivitas sekolah yang mencakup perencanaan, koordinasi, pelaksanaan, penilaian, pengembangan kompetensi sumberdaya tenaga pendidik dan kependidikan....<sup>22</sup>

Orientasi kerja supervisi manajerial tidak hanya pada guru tertentu, tapi mencakup sekolah secara keseluruhan, termasuk pembinaan karir kepala sekolah dan membantu kepala sekolah dalam menjalankan tugasnya sebagai manajer di sekolah.<sup>23</sup> Dalam kompetensi manajerial, pengawas memiliki tanggung jawab besar

---

<sup>21</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*.

<sup>22</sup>Nana Sujana, dkk., *Buku Kerja Pengawas Sekolah* (Cet. II; Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP Kemeterian Pendidikan Nasional, 2011), h. 21.

<sup>23</sup>lihat Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 162.

dalam mewujudkan kondisi lingkungan sekolah yang sesuai dengan kebutuhan sebuah satuan pendidikan.

c. Kompetensi Supervisi Akademik

Kompetensi supervisi akademik merupakan kemampuan seorang pengawas dalam memberikan layanan supervisi yang bertujuan untuk perbaikan proses pembelajaran. Kehadiran pengawas diharapkan dapat membantu guru dalam setiap kesulitan yang dihadapi dalam pembelajaran, baik pada perencanaan, proses, sampai pada penilaian dan evaluasi. Hal ini sebagaimana dalam Peraturan Menteri Agama RI. No. 12 Tahun 2012 sebagai berikut:

- a. Mampu memahami konsep, prinsip, teori dasar, karakteristik, dan perkembangan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran Madrasah dan/atau PAI di sekolah
- b. Mampu memahami konsep, prinsip, teori/teknologi, karakteristik, dan perkembangan poroses pembelajaran/bimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah
- c. Mampu membimbing guru dalam menyusun silabus tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah berlandaskan standar isi, standar kompetensi dan kompetensi dasar, dan prinsip-prinsip pengembangan kurikulum....<sup>24</sup>

Oleh sebab itu, supervisor harus dibekali kompetensi akademik, sehingga kompetensinya melebihi kompetensi guru, dan selanjutnya dapat membantu berbagai kesulitan guru dalam proses pembelajaran. Oleh karena itu, sebelum menjadi pengawas, harus menjadi guru minimal delapan tahun yang kemudian diharapkan memiliki pengetahuan dasar yang berkaitan dengan kompetensi akademik. Pengawas yang tidak berlatar belakang guru akan sangat kesulitan dalam memahami tugas akademik sebagai supervisor. Kemudian jika itu terjadi maka

---

<sup>24</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.*

harapan peningkatan kompetensi guru melalui bantuan/layanan yang diberikan supervisor tidak akan dapat terwujud.

Menurut penulis, dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010, tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya hanya mencantumkan Pengawas adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa menyebutkan guru, hal tersebut dapat menjadi cela bagi pemangku jabatan mengangkat pengawas yang tidak berlatar belakang guru, yang walaupun ada regulasi lain yang mencantumkan 8 (delapan) tahun menjadi guru sebagai syarat minimal untuk menjadi pengawas. Oleh karena itu, sebaiknya kata guru dicantumkan dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur dan birokrasi, sehingga tidak adalagi cela untuk mengangkat pengawas yang hanya bermodalkan PNS, karena tidak akan mampu berbuat apa-apa dalam memberikan layanan supervisi kepada guru.

#### d. Kompetensi Evaluasi Pendidikan

Evaluasi suatu bagian dari sistem pendidikan nasional. Evaluasi sebagai alat yang digunakan untuk mengukur keberhasilan pendidikan sekaligus untuk mengendalikan mutu pendidikan.<sup>25</sup>

Dengan demikian, sebagai supervisor maka seyogyanya juga memiliki kompetensi evaluasi pendidikan yang meliputi;

- a. Mampu menyusun kriteria dan indikator keberhasilan peserta didik dan pembelajaran/pembimbingan madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- b. Mampu membimbing guru dalam menentukan aspek-aspek yang penting dinilai dalam pembelajaran/pembimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah;
- c. Mampu menilai kinerja kepala madrasah, guru, staf madrasah dalam melaksanakan tugas pokok dan tanggung jawabnya untuk meningkatkan

---

<sup>25</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 37.



mutu pendidikan dan pembelajaran/pembimbingan tiap bidang pengembangan atau mata pelajaran di madrasah dan/atau PAI pada sekolah....<sup>26</sup>

Supervisor yang memiliki kompetensi evaluasi yang memadai, akan mampu berkontribusi besar dalam pengendalian mutu pendidikan. Karena dari hasil evaluasi yang dilakukan terhadap proses pembelajaran maka akan terlihat kelebihan dan kekurangan proses pendidikan yang telah dikerjakan. Selanjutnya dari temuan kekurangan tersebut akan dicarikan solusi atau alternatif pemecahannya dan mengembangkan kelebihan-kelebihan yang ada.

e. Kompetensi Penelitian dan Pengembangan

Perbaikan dalam proses pembelajaran tidaklah cukup hanya dengan evaluasi, melainkan perlu penelitian yang mendalam tentang apa dan bagaimana suatu permasalahan yang terjadi dalam pembelajaran. Sebagai supervisor seyogyanya juga memiliki kompetensi penelitian dan pengembangan untuk mengetahui secara ilmiah tentang masalah yang dihadapi guru.

Adapun aspek-aspek kompetensi penelitian dan pengembangan meliputi;

- a. Mampu menguasai berbagai pendekatan, jenis, dan metode penelitian dalam pendidikan;
- b. Mampu menentukan masalah kepengawasan yang penting diteliti, baik untuk keperluan pengawasan maupun untuk pengembangan karir;
- c. Mampu menyusun proposal penelitian baik proposal penelitian kualitatif maupun penelitian kuantitatif;
- d. Mampu melaksanakan penelitian pendidikan untuk pemecahan masalah pendidikan yang bermanfaat bagi tugas pokok dan tanggung jawabnya....<sup>27</sup>

---

<sup>26</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.*

<sup>27</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah.*



Melalui kompetensi penelitian dan pengembangan yang dimiliki supervisor maka berbagai masalah yang dialami dalam proses pembelajaran bisa dengan mudah teratasi dan tepat sasaran yang kemudian untuk dikembangkan.

#### f. Kompetensi Sosial

Tugas pengawas dalam memberikan layanan supervisi kepada guru sangatlah berat, sehingga apabila dikerjakan sendiri maka akan sangat sulit dalam pencapaian tujuan. Supervisor dalam menjalankan supervisinya perlu bantuan dari pihak-pihak lain. Pengawas diharapkan mampu bersosialisasi dengan baik dengan segenap *stakeholder* guna pencapaian tujuan supervisi yang sebenarnya.

Pengawas diharapkan mampu bekerja sama dengan pihak-pihak lain terutama yang bisa berkontribusi terhadap tugas kepengawasannya. Selain itu pengawas juga diharapkan aktif dalam organisasi kepengawasan guna menambah wawasan keilmuannya tentang kepengawasan.

### 3. Perilaku Etik yang Perlu dimiliki Supervisor

Supervisor yang sukses melaksanakan tugasnya adalah supervisor yang memiliki sifat-sifat kepribadian yang diterima dalam pergaulan sesama kerabat kerja. Ia bisa menjaga etik pekerjaannya. Kunci utama yang harus dimiliki supervisor agar berhasil dalam melaksanakan supervisi terletak pada diri supervisor itu sendiri. Pemahaman akan perilaku supervisor ditampakkan pada kemampuannya akan memahami dirinya sendiri. Hal ini penting, karena faktor manusia di belakang tugas mempunyai pengaruh besar dalam keberhasilan misi supervisi.

Perilaku etik supervisi perlu selalu menyertai diri supervisor dalam menjalankan supevisi. Mulai dari sifat yang berhubungan dengan kepribadiannya

maupun sifat-sifat yang berhubungan dengan profesinya serta apa yang dikehendaki oleh supervisee.<sup>28</sup> Berikut akan diuraikan ketiga sifat tersebut.

a. Sifat yang Berhubungan dengan Kepribadian Pengawas.

Karakteristik merupakan sesuatu yang menjadi ciri khas seseorang dalam mengecap, merasa, meyakini atau bertindak. Carl Jung mengemukakan bahwa karakteristik sebagai sebuah bawaan yang secara genetik menentukan berbagai karakteristik atau yang biasa disebut tempramen. Perangkat karakteristik adalah introversi dan ekstrasversi. Aspek-aspek yang lebih jelas dari introversi adalah malu, tidak suka pada fungsi-fungsi sosial dan menyukai privasi. Sedangkan ekstrasversi adalah kecenderungan untuk melihat dunia luar, khususnya orang lain demi kesenangan sendiri. Orang yang memiliki karakteristik ekstrasversi biasanya mudah bersahabat dan menikmati aktivitas sosial, tetapi merasa tidak nyaman ketika sendirian.<sup>29</sup>

Secara umum supervisi pendidikan menuntut kepribadian ekstavert, jika ada supervisor berkepribadian introvert, sebaiknya ia memilih pekerjaan lain, karena orang bertipe introvert akan lebih tertutup dan kurang komunikatif. Oleh karena itu, supervisor dengan karakter introvert cenderung gagal melakukan supervisi. Sementara supervisor yang berkepribadian ekstravert lebih terbuka dan komunikatif dan mudah bergaul, sehingga supervisor lebih mudah menggali data dan informasi yang diperlukan yang kemudian mencari solusi apabila ditemukan masalah.

Selain ekstravert dan intravert, maka ada lagi sifat yang menyertai karakteristik manusia adalah pemikir dan perasa. Ciri-ciri orang yang berfikir adalah

---

<sup>28</sup> Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 220-221.

<sup>29</sup> Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 227.

dalam mengambil keputusan, mereka berdasarkan pemikiran, penalaran logika, dan pemecahan masalah setahap demi setahap. Sementara orang perasa mengambil keputusan berdasarkan perasaan mereka.

Carl Jung mengemukakan bahwa pria cenderung memecahkan masalah setahap demi setahap secara lebih baik, khususnya menyangkut hal-hal yang bersifat mekanis. Sedangkan wanita cenderung lebih bagus dalam urusan sosial. Namun ditambahkan Carl Jung bahwa tidak ada alasan menilai pemikiran di atas perasaan, masing-masing baik, orang yang bertipe pemikir dan perasa memiliki kekuatan dan kelemahannya sendiri. Karena hasil penelitian Carl Jung menyatakan sepertiga pria bagus dalam perasaan dan sepertiga wanita bagus dalam berfikir.<sup>30</sup>

Seperti itulah karakteristik manusia pemikir dan perasa. Namun yang perlu dicermati adalah para supervisor belajar untuk bagaimana cara berfikir logis dan rasional serta bertindak objektif dalam memecahkan masalah, kemudian mampu membangun hubungan baik antara sesama manusia terutama yang seprofesi. Hubungan baik tersebut akan membangun intraksi dalam suasana yang akrab dan komunikatif yang menggambarkan karakteristik ektravert dimana aspek sosial meningkatkan kualitas supervisi dan mampu mengatasi berbagai problem dalam proses pembelajaran.

Selain sifat-sifat tersebut perlu juga menyertakan sifat-sifat seperti jujur, tegas, konsekuen, ramah dan rendah hati dan mempunyai kemauan keras.<sup>31</sup> Sehingga dengan demikian dari sifat-sifat tersebut yang kemudian menjadi pendukung utama pengawas dalam menjalankan profesinya, karena dengan mudah dapat diterima supervisee.

---

<sup>30</sup>Lihat Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 228.

<sup>31</sup>M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, h. 86.

b. Sifat yang Berhubungan dengan Profesi

Sikap yang ditampilkan supervisor harus menunjukkan semangat ingin mengetahui dengan lebih mendalam perihal profesinya. Di samping memiliki kepribadian yang terpuji, supervisor juga harus teruji kemampuan profesionalnya merumuskan hipotesis-hipotesis yang bermutu.

Edger H. Schein mengemukakan bahwa ada beberapa hal yang berkaitan dengan profesional supervisor sebagai berikut;

- a. Bekerja *full time* di bidang profesinya dan sebagai sumber kehidupan
- b. Memiliki motivasi yang kuat
- c. Memiliki pengetahuan dan keterampilan yang memadai
- d. Mampu membuat keputusan dan tindakan yang tepat demi klien
- e. Pelayanannya murni terhadap klien tanpa ditunggangi motif-motif lain
- f. Mempunyai otonomi atas dasar ilmu pengetahuan
- g. Aktif dalam organisasi kepengawasan
- h. Tidak mengiklankan profesionalnya untuk mendapatkan pasaran luas.<sup>32</sup>

Sementara Ngalim Purwanto mengemukakan bahwa supervisor harus memiliki sifat-sifat sebagai berikut;

- a. Berpengetahuan luas tentang seluk beluk semua pekerjaan yang berada di bawah pengawasannya
- b. Menguasai/memahami benar-benar rencana dan program yang telah digariskan
- c. Berwibawa, dan memiliki kecakapan praktis tentang teknik-teknik kepengawasan, terutama *human relation*.<sup>33</sup>

Dari kesemua sifat-sifat yang dimiliki supervisor maka dapat dipastikan bahwa supervisor yang profesional adalah supervisor yang mampu menunjukkan kemampuan di atas rata-rata kemampuan yang dimiliki guru. Oleh karena itu, supervisor yang profesional akan mendapatkan pengakuan kekuasaan (*power*) dari

---

<sup>32</sup>Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, h. 221.

<sup>33</sup>M. Ngalim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, h. 85-86.

keahliannya. Pengakuan tersebut akan ditandai dengan keinginan masyarakat menggunakan jasa supervisi pendidikannya.

d. Sifat-sifat Supervisor yang Dikehendaki Supervisee

Supervisor yang profesional adalah supervisor yang mampu berhasil dalam memberikan layanan supervisi terhadap supervisee. Supervisor mampu membantu guru dalam mengatasi kesulitan dalam proses pembelajaran dan masalah-masalah lain yang berhubungan dengan pembelajaran.

Adapun yang diharapkan oleh supervisee terhadap supervisor adalah;

- a. Mempunyai perhatian terhadap segala aktivitas sekolah
- b. Bersifat simpatik dan mempunyai kepedulian terhadap peserta didik dan guru
- c. Terbuka dan lugas, tidak apriori menolak pendapat orang lain
- d. Mempunyai daya humor yang mendidik dan tidak cepat tersinggung
- e. Percaya diri dan dapat dipercaya
- f. Tidak terlalu mencari masalah-masalah kecil, tapi menyelesaikan masalah-masalah besar
- g. Dapat memotivasi rasa ingin tahu guru
- h. Kritis, tapi bersifat membangun dan dapat memberikan saran-saran
- i. Berpengetahuan luas masalah pendidikan
- j. Dapat mengemukakan ide-ide baru yang konstruktif
- k. Fisik sehat dan terpelihara, serta berpakaian rapih dengan tampilan yang menarik.<sup>34</sup>

Dari kesebelas harapan tersebut merupakan sesuatu yang sangat situasional, artinya tidaklah secara simultan ditampakkan. Meskipun penonjolan dari kesebelas harapan ini berbeda bagi setiap supervisor, akan tetapi harus dapat menunjukkan ciri khasnya yang menggambarkan kualitasnya.

**B. Teknik Supervisi Pendidikan**

Supervisi merupakan satu kesatuan dari sistem pendidikan. Supervisi termasuk unsur penting dalam peningkatan profesional guru dalam melaksanakan

---

<sup>34</sup>Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, h. 222.

tugas mendidiknya. Oleh karena itu, Pencapaian tujuan dalam pelaksanaan kepengawasan perlu didukung berbagai unsur. Dari berbagai unsur-unsur itulah yang kemudian dipadukan dalam menjalankan tugas yang diembangkannya. Pengawas dalam menjalankan profesinya tidak cukup hanya dibekali berbagai kompetensi dan perilaku etik atau niat yang baik. Akan tetapi pengawas juga perlu dibekali dengan berbagai teknik dalam menjalankan misi kepengawasannya.

Salah satu unsur yang menjadi tidak maksimalnya pencapaian tujuan kepengawasan dalam meningkatkan kompetensi guru adalah karena dalam memberikan layanan supervisi kepada guru tidak disertai dengan teknik yang jitu dan efektif. Bahkan penyampaian yang monoton yang dilaksanakan secara rutinitas malah terkadang menimbulkan kejenuhan, sehingga kemudian hasil yang diharapkan tidak maksimal. Dengan demikian sebelum supervisi memberikan layanan kepada guru, maka terlebih dahulu supervisor mendiagnosa atau melakukan penelusuran mendalam tentang apa sebenarnya permasalahan yang dihadapi oleh para guru. Setelah ditemukan permasalahannya maka kemudian menentukan bentuk layanan yang sesuai dengan permasalahan yang dihadapi guru dan sekaligus menentukan teknik dalam menyampaikan bentuk layanan tersebut.

Supervisor dalam memberikan layanan supervisi kepada para guru dapat memilih berbagai teknik yang sesuai dengan materi dan permasalahan yang dihadapi para guru. Dari berbagai teknik-teknik supervisi maka dapat dikelompokkan dalam dua teknik yaitu teknik kelompok dan teknik individual.

Sahertian dan Mateheru yang dikutip Syaiful Sagala membedakan teknik-teknik supervisi pengajaran menjadi dua, yaitu teknik kelompok dan teknik individual. Teknik kelompok dapat digunakan apabila banyak guru mengalami masalah yang sama baik pada mata pelajaran yang sama ataupun mata pelajaran yang

berbeda. Teknik kelompok yang dapat digunakan antara lain rapat guru, *workshop*, seminar, kepemimpinan, konseling kelompok, penataran dan penyegaran. Kemudian teknik individual dapat digunakan apabila guru menghadapi masalah khusus atau guru meminta bimbingan secara tersendiri dari supervisor. Adapun teknik yang dapat digunakan adalah orientasi guru baru, kunjungan kelas, *individual confrens*, kunjungan rumah atau saling mengujungi.<sup>35</sup> Berikut diuraikan secara rinci teknik kelompok dan individual

### 1. Teknik Individual

Teknik supervisi individual yang dimaksud adalah pelaksanaan supervisi yang diberikan kepada guru tertentu yang mempunyai masalah khusus dan bersifat perorangan. Supervisor di sini hanya berhadapan dengan seorang guru yang dipandang memiliki persoalan tertentu. Teknik-teknik supervisi yang dikelompokkan sebagai teknik individual meliputi: kunjungan kelas, observasi kelas, pertemuan individual, kunjungan antar kelas, dan menilai diri sendiri. Adapun bentuk-bentuk teknik individual sebagai berikut:

#### a. Kunjungan dan Observasi Kelas

Observasi kelas dan kunjungan kelas nampak seperti berbaur dan tidak mudah dibedakan. Ada ahli yang menyamakan antara observasi kelas dengan kunjungan kelas, sebab cara kerja supervisor pada kedua teknik tersebut sama. Namun, ada pula yang membedakan antara keduanya karena menilai cara yang digunakan berbeda.<sup>36</sup> Namun yang terpenting, lagi-lagi tidak perlu membesarkan perbedaan. Oleh karena itu, di sini penulis merangkumnya menjadi satu dalam pembahasan.

<sup>35</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 173.

<sup>36</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 187.



Kunjungan kelas adalah teknik pembinaan guru oleh pengawas, kepala sekolah dan pembina lainnya dalam rangka mengamati atau mengobservasi pelaksanaan proses pembelajaran sehingga memperoleh data yang diperlukan dalam rangka pembinaan guru. Tujuan kunjungan ini adalah semata-mata untuk menolong guru dalam mengatasi kesulitan atau masalah mereka di dalam kelas. Melalui kunjungan kelas, para guru dibantu melihat dengan jelas masalah-masalah yang mereka alami. Menganalisisnya secara kritis dan mendorong mereka untuk menemukan alternatif pemecahannya. Kunjungan kelas ini bisa dilaksanakan dengan pemberitahuan atau tanpa pemberitahuan terlebih dahulu, dan bisa juga atas dasar undangan dari guru itu sendiri.<sup>37</sup>

Dalam kunjungan kelas, atau ketika pengawas berada dalam kelas mengamati proses pembelajaran maka perlu dibekali dengan instrumen penilaian. Instrumen penilaian itu digunakan untuk mengukur atau menilai indikator-indikator proses pembelajaran. Hasil dari penilaian yang berdasarkan instrumen itu yang akan menjadi dasar kajian pengawas bersama guru untuk menilai kondisi objektif proses pembelajaran yang sedang berlangsung. Perbaikan pengawas tidak dilakukan saat kunjungan kelas karena akan mengganggu proses pembelajaran, tapi melainkan hanya mengamati dengan berpedoman pada instrumen penilaian yang ada. Selain itu pengawas dalam melakukan kunjungan kelas memiliki tujuan yang jelas dan mampu mencari solusi alternatif dari berbagai persoalan yang diperoleh saat kunjungan kelas.

Ada empat tahap kunjungan kelas. Pertama, tahap persiapan. Pada tahap ini, supervisor merencanakan waktu, sasaran, dan cara mengobservasi selama kunjungan

---

<sup>37</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Metode dan Teknik Supervisi* (Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2008), h. 22.



kelas. Kedua, tahap pengamatan selama kunjungan. Pada tahap ini, supervisor mengamati jalannya proses pembelajaran berlangsung. Ketiga, tahap akhir kunjungan. Pada tahap ini, supervisor bersama guru mengadakan perjanjian untuk membicarakan hasil-hasil observasi, sedangkan tahap terakhir adalah tahap tindak lanjut.<sup>38</sup>

Inti dari kunjungan kelas adalah perbaikan atau peningkatan kualitas proses pembelajaran. Oleh karena itu, hal terpenting dari hasil yang diperoleh adalah tindak lanjut dalam artian pengawas dan guru bersama-sama melakukan berbagai upaya dalam perbaikan atau peningkatan kualitas proses pembelajaran.

Kunjungan kelas dapat dilakukan dengan empat macam cara, yaitu

- 1) Kunjungan kelas tanpa pemberitahuan
- 2) Kunjungan kelas dengan pemberitahuan
- 3) Kunjungan kelas dengan undangan guru
- 4) Saling mengunjungi kelas.<sup>39</sup>

Di antara keempat cara tersebut maka yang lebih efektif adalah ketika kunjungan kelas dilakukan atas permintaan guru. Guru yang mengundang supervisor berarti guru tersebut memiliki kemauan untuk selalu memperbaiki kualitas mengajarnya. Oleh sebab itu, pengawas perlu merespon positif terhadap guru yang mengundang pengawas untuk mensupervisi guru.

#### b. Inter Visitasi

Inter visitasi atau kunjungan antar kelas dalam satu sekolah atau antar sekolah sejenis merupakan suatu kegiatan yang bertujuan untuk saling tukar

---

<sup>38</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Metode dan Teknik Supervisi*, h. 22.

<sup>39</sup>Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 177.

pengalaman sesama guru. Dalam kegiatan ini, antara guru yang dikunjungi dengan yang mengunjungi bisa saling tukar pengalaman mengajar dan saling mengutarakan persoalan yang biasa dihadapi, sehingga bisa saling mengisi dan mencari solusi.

Agar kunjungan antar kelas ini betul-betul bermanfaat bagi pengembangan kemampuan guru maka sebelumnya harus direncanakan dengan sebaik-baiknya. Ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh supervisor apabila menggunakan teknik ini dalam melaksanakan supervisi bagi para guru.

- a. Menyeleksi para guru yang akan dikunjungi.
- b. Menentukan para guru yang akan mengunjungi.
- c. Menyediakan segala fasilitas yang diperlukan dalam kunjungan kelas.
- d. Supervisor hendaknya mengikuti acara ini dengan cermat. Amatilah apa-apa yang ditampilkan secara cermat, dan mencatatnya pada format-format tertentu.
- e. Mengadakan tindak lanjut setelah kunjungan antar kelas selesai. Misalnya dalam bentuk percakapan pribadi, penegasan, dan pemberian tugas-tugas tertentu.
- f. Segera aplikasikan ke sekolah atau ke kelas guru bersangkutan, dengan menyesuaikan pada situasi dan kondisi yang dihadapi.
- g. Adakan perjanjian-perjanjian untuk mengadakan kunjungan antar kelas berikutnya.<sup>40</sup>

Inter visitasi atau kunjungan kelas baik itu dalam satu satuan pendidikan atau antar satuan pendidikan betul-betul perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Supervisor dituntut untuk kerjasama dengan para kepala sekolah dalam mengatur teknis pelaksanaan sehingga mampu mencapai hasil yang maksimal dan yang terpenting tidak mengganggu proses pembelajaran.

#### c. Menilai Diri Sendiri

Menilai diri sendiri merupakan kegiatan supervisi dimana guru menilai diri sendiri. Menilai diri sendiri merupakan hal yang tidak mudah bagi guru, hal ini karena kebiasaan guru hanya menilai peserta didiknya dan jarang menilai dirinya sendiri.

---

<sup>40</sup>Departemen Pendidikan Nasional, *Metode dan Teknik Supervisi*, h. 24-25.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan guru untuk membantu menilai dirinya sendiri, seperti membuat daftar pandangan atau pendapat (bisa berupa angket) yang diberikan kepada peserta didik untuk menilai suatu aktivitas atau kegiatan guru di dalam kelas. Daftar pandangan atau pendapat bisa berupa pertanyaan tertutup atau pertanyaan terbuka.<sup>41</sup> Agar peserta didik bisa objektif dalam menilai gurunya tanpa rasa takut maka daftar pertanyaan tidak perlu menulis identitas peserta didik.

Selain itu, menilai diri sendiri dapat juga melalui panduan pengawas. Kegiatan ini bisa melalui percakapan pribadi.<sup>42</sup> Artinya guru dan pengawas melakukan dialog secara pribadi dengan guru dari hati-kehati yang memungkinkan terjalin suasana kebatinan antara pengawas dan guru yang menyebabkan tidak ada jarak antara guru dan pengawas, sehingga kemudian guru dengan mudah mengungkapkan berbagai kekurangannya atau keluhan-keluhan yang selama ini dipendam. Kemudian dari percakapan tersebut, pengawas dapat membantu guru untuk keluar dari berbagai keluhan/persoalan yang dihadapi dalam proses pembelajaran.

#### d. Demonstrasi Mengajar

Demonstrasi mengajar adalah salah satu upaya supervisor membantu guru yang disupervisi. Dalam hal ini supervisor mendemonstrasikan cara mengajar yang baik kepada guru. Sementara guru yang disupervisi mengamati dengan baik cara mengajar yang dipraktikkan oleh supervisor. Guru yang disupervisor mencatat kemudian mendiskusikan kepada pengawas setelah proses demonstrasi mengajar. Selain supervisor, kepala sekolah atau guru yang dianggap lebih profesional bisa

---

<sup>41</sup>Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 119.

<sup>42</sup>Syaiful sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 190.

mempraktekkan cara mengajar yang baik kepada guru yang dinilai masih kurang profesional dalam mengajar.<sup>43</sup>

Dalam menggunakan teknik ini, supervisor dituntut untuk memiliki kompetensi dalam mengajar. Supervisor seyogyanya mahir dalam menggunakan multi media dan berbagai metode pembelajaran yang disesuaikan dengan materi ajar dalam pembelajaran. Kemampuan supervisor mengajar harus mahir dan di atas rata-rata dari kemampuan mengajarnya guru yang disupervisi.

#### e. Buletin Supervisi

Buletin supervisi adalah salah satu bentuk komunikasi dalam bentuk tulisan yang dikeluarkan oleh staf supervisor yang digunakan sebagai alat untuk membantu para guru memberikan informasi penting dalam meningkatkan kualitas pembelajaran. Supervisor dituntut untuk menjadi penggagas dan memotivasi para guru untuk berpartisipasi dalam penerbitan buletin supervisi dengan jalan menuangkan tulisannya dalam buletin tersebut.<sup>44</sup>

Buletin supervisi, selain dapat menambah informasi pendidikan, juga sebagai sarana bagi para guru untuk menuangkan konsep mereka tentang pendidikan, terutama peningkatan kualitas pembelajaran. Buletin supervisi juga dapat menjadi wahana para guru untuk meningkatkan wawasannya, karena sebelum menuangkan pikirannya dalam tulisan, para penulis dituntut untuk mencari informasi baru tentang apa yang akan ditulisnya.

Selain dari kelima teknik individual tersebut, maka penulis juga menawarkan satu metode individu yaitu pertukaran guru. Yang dimaksud dengan pertukaran guru

---

<sup>43</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 190.

<sup>44</sup>Engkoswara dan Aan Komariah, *Adminstrasi Pendidikan* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 230.

adalah guru bidang studi pada satu sekolah ditukar untuk sementara waktu dengan guru bidang studi yang sama dengan sekolah lain. Menurut penulis hal ini dapat dijadikan sebagai salah satu teknik dalam supervisi individual. Manfaatnya selain kepada guru juga dapat dirasakan oleh peserta didik secara langsung. Guru yang ketika diadakan pertukaran akan menemukan suasana baru dalam mengajar, begitu pula dengan peserta didik yang diajar oleh guru yang baru mengajar mereka. Peserta didik akan mendapatkan informasi baru dari guru barunya yang kemungkinan tidak diperoleh dari guru yang telah mengajarnya selama ini. Namun dalam metode ini, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh supervisor, terutama koordinasi yang baik dengan kepala sekolah sasaran agar supaya mendapat izin untuk melepaskan dan menerima dalam beberapa hari guru yang ditukar. Selain itu, kondisi sekolah tujuan juga perlu diperhatikan, agar supaya setelah guru kembali kesekolahnya masing-masing, betul-betul mendapat manfaat dari program tersebut.

## 2. Teknik Kelompok

Teknik supervisi kelompok adalah satu cara melaksanakan program supervisi yang ditujukan pada dua orang atau lebih. Para guru yang diduga sesuai dengan analisis kebutuhan memiliki masalah atau kebutuhan atau kelemahan-kelemahan yang sama dikelompokkan atau dikumpulkan menjadi satu/bersama-sama. Kemudian mereka diberikan layanan supervisi sesuai dengan permasalahan atau kebutuhan mereka.

Menurut Made Pidarta bahwa supervisi kelompok adalah suatu pembinaan terhadap sejumlah guru oleh satu atau beberapa supervisor. Sejumlah guru yang pada umumnya memiliki kualifikasi relatif sama mendapat bimbingan oleh seorang supervisor atau beberapa supervisor yang biasanya memiliki spesialis yang berbeda. Masing-masing supervisor memberikan materi atau membahas beberapa materi

yang kesemuanya bertalian dengan yang lain, atau dapat juga satu materi yang dibahas atau ditinjau dari berbagai aspek sesuai keahlian supervisor masing-masing.<sup>45</sup>

Supervisi dengan menggunakan teknik kelompok dapat dilakukan apabila pengawas sudah mengklasifikasi kualifikasi dan kompetensi guru. Data yang digunakan supervisor dalam mengklasifikasi guru dapat diambil dari teknik supervisi individual yaitu kunjungan observasi kelas dan hasil dialog pribadi. Dari data itulah yang kemudian supervisor dapat mengelompokkan guru yang relatif sama saat menghadapi berbagai persoalan dalam pembelajaran.

Ada beberapa teknik yang dapat digunakan dalam supervisi kelompok, di antaranya pertemuan ilmiah, rapat guru latih, studi kelompok antar guru, diskusi, seminar, simposium, *workshop*, dan lain-lain.<sup>46</sup> Untuk mengetahui lebih jauh tentang berbagai teknik kelompok tersebut maka berikut diuraikan secara rinci.

#### a. Pertemuan Ilmiah

Pertemuan ilmiah merupakan pertemuan yang dilakukan oleh sejumlah orang yang membahas hal-hal yang sifatnya ilmiah. Pertemuan ilmiah tidak sama dengan pertemuan lain seperti rapat kenaikan kelas atau rapat semesteran atau pertemuan-pertemuan biasa lainnya. Pertemuan ilmiah membahas materi-materi yang bersifat ilmiah, seperti konsep dan teori dari berbagai macam ilmu, hasil-hasil penelitian ilmiah, dan teknologi.

Adapun langkah-langkah proses teknik supervisi pertemuan ilmiah adalah sebagai berikut;

---

<sup>45</sup>Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual* (Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 165.

<sup>46</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 175.

- a. Supervisor membuat gagasan untuk melaksanakan pertemuan ilmiah
- b. Membuat rancangan kegiatan atau draf proposal kegiatan
- c. Membentuk penyelenggara (kepanitiaan)
- d. Mengundang para guru yang kualifikasinya relatif sama untuk mengikuti pertemuan ilmiah
- e. Menghadirkan para ahli sesuai dengan topik pembahasan dalam diskusi ilmiah
- f. Para guru diharapkan menyampaikan hasil pertemuan kepada teman guru yang tidak ikut.<sup>47</sup>

Selain bentuk pertemuan seperti di atas, pertemuan berbentuk orientasi juga diperlukan untuk para guru baru yang akan memulai menjalankan profesi sebagai guru. Pada pertemuan orientasi ini, supervisor mengumpulkan para guru baru untuk mendapat bimbingan tentang bagaimana menjadi guru yang profesional. Supervisi akan memperkenalkan tugas dan tanggung jawab sebagai guru.<sup>48</sup>

Pertemuan ilmiah atau pertemuan orientasi diharapkan akan menambah pengetahuan dan pengalaman guru, baik itu guru senior maupun guru yang baru memulai tugas keguruannya. Oleh karena itu, kegiatan seperti ini perlu dilaksanakan secara terprogram.

#### b. Rapat Guru

Rapat guru merupakan salah satu teknik supervisi kelompok. Rapat guru bisa dilakukan oleh kepala sekolah kepada para guru di bawah pimpinannya, bisa juga dilakukan oleh supervisor kepada para guru dalam wilayah kerjanya. Rapat guru dimaksudkan untuk membicarakan hal-hal penting atau yang berkenaan dengan informasi baru yang bertalian dengan pembelajaran, atau bisa juga berupa kesulitan-kesulitan yang dihadapi guru, dan bagaimana cara mengatasinya. Rapat guru dinilai lebih efisien karena dibahas secara berkelompok sehingga hasilnya lebih maksimal.<sup>49</sup>

---

<sup>47</sup>Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, h. 187-188.

<sup>48</sup>Lihat Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 175-176.

<sup>49</sup>Lihat Made Pidarta, *Supervisi Pendidikan Kontekstual*, h. 173.

Adapun tujuan dari rapat guru sebagai berikut

1. Menyatukan pandangan-pandangan guru terhadap masalah-masalah dalam mencapai tujuan pendidikan
2. Memberikan motivasi kepada guru untuk menerima dan melaksanakan tugas-tugasnya dengan baik guna mencapai pembelajaran yang maksimal
3. Menyatukan pendapat tentang metode kerja yang baik guna pencapaian pembelajaran yang baik....<sup>50</sup>

Sebagaimana dengan teknik-teknik lain rapat guru juga perlu perencanaan dan persiapan yang matang. Unsur-unsur dalam pelaksanaan rapat juga harus terpenuhi, seperti catatan hasil rapat. Kemudian hasil rapat tidak hanya berakhir pada buku agenda rapat, tetapi direalisasikan sebagaimana apa yang diputuskan dalam rapat.

#### c. Studi Kelompok Antar Guru

Hubungan kelompok antar guru yang dikembangkan menjadi studi kelompok yang terbangun dalam sistem pendidikan akan menciptakan komunitas belajar yang demokratik dan adil secara sosial. Studi kelompok antar guru adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh sejumlah guru yang memiliki keahlian bidang studi tertentu, seperti rumpun kelompok agama dan akhlak mulia. Studi kelompok sudah ada khususnya yang tergabung dalam organisasi keguruan seperti Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP) atau Kelompok Kerja Guru (KKG) atau Forum Komunikasi Guru (FKG) di sekolah masing-masing. Kelompok inilah yang melakukan pertemuan baik secara rutin maupun insidental, untuk mempelajari atau mengkaji berbagai masalah yang dihadapi dalam pembelajaran.<sup>51</sup>

Adapun tujuan pelaksanaan supervisi dengan menggunakan teknik ini adalah;

---

<sup>50</sup>Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 114.

<sup>51</sup>Lihat Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 178-179. Lihat juga M. Ngilim Purwanto, *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*, h. 122.



1. Meningkatkan kualitas penguasaan materi dan kualitas dalam memberi layanan belajar
2. Memberi kemudahan bagi para guru untuk mendapatkan bantuan pemecahan masalah pada materi pengajaran
3. Bertukar pikiran dan berbicara dengan sesama guru pada satu bidang studi atau bidang-bidang studi yang serumpun.<sup>52</sup>

Keberhasilan pada studi kelompok guru sangat ditentukan kemauan dan kemampuan supervisor menfasilitasi studi kelompok guru dengan menyediakan sumber-sumber seperti buku-buku, bahan ajar, media pembelajaran atau alat peraga dan segala hal yang berkaitan dengan kelengkapan pembelajaran. Selain itu, studi kelompok guru akan lebih berkualitas bila supervisor mampu menghadirkan para ahli sebagai nara sumber dalam kegiatan tersebut. Oleh karena itu, kemampuan sosial supervisor dituntut untuk melakukan berbagai pendekatan, sehingga mampu menghadirkan nara sumber yang kompeten.

#### d. Workshop

Workshop dalam kegiatan supervisi pendidikan dapat diartikan sebagai suatu kegiatan belajar kelompok yang terjadi dari sejumlah guru atau pendidik yang mempunyai masalah yang relatif sama. Dari masalah tersebut mereka secara bersama-sama pula mencari solusi terbaik.

Syaiful Sagala mengemukakan beberapa ciri-ciri workshop sebagai berikut;

- 1) Masalah yang dibahas bersifat *life contred* dan muncul dari peserta sendiri (guru latih)
- 2) Selalu menggunakan aktivitas mental dan fisik secara maksimal dalam kegiatan, sehingga tercapai taraf pertumbuhan profesi yang lebih tinggi dan lebih baik dari semula
- 3) Menggunakan metode pemecahan masalah, musyawarah, praktik dan penyelidikan
- 4) Diadakan berdasarkan kebutuhan bersama
- 5) Menggunakan nara sumber *resource person* <sup>53</sup> *theresource material* yang berkontribusi besar dalam pencapaian hasil....

---

<sup>52</sup>Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 115.

<sup>53</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 181.

Workshop dapat dilakukan jika sejumlah guru mempunyai problem yang relatif sama, misalnya dalam penyusunan perangkat pembelajaran seperti silabus, penentuan alokasi waktu efektif, program semester, kriteria ketuntasan minimal, RPP, penelitian tindakan kelas dan lain-lain. Dalam pelaksanaan workshop semua peserta diharapkan aktif dalam membahas materi yang ada, sehingga mampu menghasilkan sebuah produk atau karya dari kerja atau belajar kelompok dalam workshop. Kemudian setelah pelaksanaan workshop maka guru sudah memiliki pengetahuan dalam pembuatan perangkat pembelajaran.

e. Tukar Menukar Pengalaman

Tukar menukar pengalaman (*sharing of experience*) adalah suatu teknik kelompok dimana diadakan pertemuan antara guru yang saling memberi dan menerima, atau saling belajar antara satu dengan yang lainnya.<sup>54</sup> Dalam kegiatan tukar menukar pengalaman bisa dimanfaatkan oleh guru yang baru mengikuti pelatihan profesi keguruan untuk membagi pengalamannya kepada rekan guru lain, sehingga rekan guru yang belum mengikuti kegiatan serupa dapat pengetahuan baru. Agar supaya kegiatan *sharing of experience* bisa mencapai tujuan maka perlu menentukan pokok masalah yang akan dibahas, kemudian memberikan kesempatan kepada guru untuk mengutarakan pengetahuan dan pengalamannya kemudian dirumuskan hasil dari berbagai pendapat yang telah dikemukakan oleh para guru.

*Sharing of experience* selain menambah pengetahuan baru, dapat pula terjalin silaturahmi dan keakraban antara rekan guru. Komunikasi antara guru dapat terjalin bukan hanya pada saat kegiatan, tapi di luar kegiatanpun dapat terjalin. Oleh karena itu, ketika guru mendapat permasalahan baru dalam pembelajaran maka dia sudah

---

<sup>54</sup>Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 116.

tidak sungkan-sungkan lagi bertanya kepada sesama guru yang lebih tahu tanpa melalui kegiatan formal lagi karena antara mereka sudah terjalin keakraban.

#### f. Simposium

Simposium adalah suatu pertemuan dimana dalam pertemuan itu ada beberapa pembicara yang menyampaikan pikirannya secara singkat mengenai suatu topik pendidikan, atau topik yang berkaitan dengan problematika mengajar. Simposium dapat pula diartikan sebagai kesimpulan karangan pendek menjadi suatu buku.<sup>55</sup>

Mengacu pada pengertian pertama maka dalam simposium suatu masalah dapat dibahas terlebih dahulu dengan meminta pandangan mengenai berbagai persoalan pendidikan dari sejumlah ahli. Dari pandangan para ahli itulah yang kemudian dibahas oleh peserta dengan harapan dapat menemukan solusi dari berbagai permasalahan pendidikan yang telah dikemukakan.<sup>56</sup>

Dalam simposium, kehadiran nara sumber sangat dibutuhkan, karena untuk meluruskan atau mengarahkan ketika terdapat penyimpangan peserta dalam merumuskan pendapat mereka. Nara sumber yang dihadirkan oleh penyelenggara (supervisor) bisa dari akademisi bisa pula dari supervisor atau bahkan guru yang punya kapabilitas dan kompetensi yang memadai.

Pada dasarnya teknik kelompok yang dikemukakan para ahli terdiri dari sekian banyak teknik, namun dalam tulisan ini hanya dikemukakan enam diantara teknik-teknik yang ada. Dari sekian banyak teknik yang ditawarkan tidak berarti bahwa semuanya harus digunakan. Akan tetapi dari berbagai teknik itu menjadi alternatif pelatihan oleh supervisor untuk menggunakannya yang disesuaikan dengan

---

<sup>55</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 186.

<sup>56</sup>Syaiful Sagala, *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*, h. 186.

kebutuhan. Agar supaya dalam penggunaan teknik bisa efektif, maka dituntut kelihaian supervisor untuk menentukan teknik mana yang tepat digunakan dengan memperhatikan berbagai aspek seperti materi, peserta, nara sumber, biaya sampai pada geografis daerah tempat kegiatan.

### **C. Pendekatan Supervisi Pendidikan**

#### **1. Model-model Pendekatan Supervisi Pendidikan**

Tujuan utama supervisi adalah bagaimana meningkatkan kualitas pembelajaran. Untuk mencapai tujuan tersebut secara efektif bukan saja menyangkut penggunaan metode dan teknik supervisi tetapi juga menyangkut pilihan pola perilaku yang tepat yang tergambar dari pendekatan supervisi yang dipergunakan. Sehubungan dengan hal tersebut, Glickman mengemukakan tiga pendekatan yang diterapkan supervisor dalam melakukan supervisi terhadap supervisee, yakni pendekatan direktif, pendekatan nondirektif dan pendekatan kolaboratif.<sup>57</sup> Kemudian berikut akan dikemukakan ketiga pendekatan-pendekatan yang dimaksud.

##### **a. Pendekatan Direktif**

Pendekatan direktif adalah suatu cara pendekatan yang dilakukan secara langsung.<sup>58</sup> Dikatakan pendekatan langsung, karena peran pengawas dalam pendekatan ini sangat dominan. Pengawas berperan aktif dalam menentukan segala hal-hal yang berhubungan dengan peningkatan kualitas mengajar guru.

Pendekatan direktif pada dasarnya diadopsi dari teori belajar yang dilandasi psikologi behavioristik. Dalam teori belajar ini, dilakukan dengan kontrol instrumen

---

<sup>57</sup>Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 77.

<sup>58</sup>Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 110.

lingkungan. Penganut teori ini berpendapat bahwa peserta didik akan berhasil manakala waktu selalu dikondisikan dengan baik sesuai lingkungan tertentu. Pandangan behavioristik dapat diterapkan pada peserta didik yang masih baru, masih rendah kemampuannya dan peserta didik yang rendah tanggung jawabnya, sehingga diperlakukan kontrol lingkungan melalui pengkondisian, pembiasaan, modeling, sampai pada pemaksaan.<sup>59</sup>

Jika pandangan behavioristik diadopsi kedalam pelaksanaan supervisi maka pengawas menggunakan pendekatan direktif untuk membimbing guru. Dengan perilaku direktif maka tanggung jawab supervisor (pengawas) lebih tinggi daripada guru. Apabila tanggung jawab guru dalam mengembangkan profesinya sangat rendah maka dibutuhkan keterlibatan atau intervensi pengawas yang tinggi. Guru diupayakan agar dapat mengembangkan kompetensinya dengan baik.<sup>60</sup> Tanggung jawab pengawas lebih besar dari pada guru yang dimaksud adalah karena pengawaslah yang lebih berperan dalam menentukan segala hal yang berhubungan dengan peningkatan peroses pembelajaran. Sementara guru hanya mengikuti arahan dan intruksi dari pengawas. Jadi dalam pendekatan ini perilaku yang dominan pada pengawas adalah *demonstrating*, *directing*, *standing*, dan *reinforcing*.

Hal tersebut senada dengan apa yang dikemukakan oleh Glickman bahwa Supervisi yang berorientasi direktif menampilkan perilaku seperti:

- 1) Supervisor mengklarifikasi masalah,
- 2) Supervisor mempresentasikan gagasan mengenai apa dan bagaimana informasi yang dikumpulkan,
- 3) Supervisor mengarahkan apa yang harus dilakukan oleh guru,
- 4) Supervisor mendemonstrasikan kemungkinan perilaku guru; dan guru jika perlu diperintahkan untuk menirukan,

---

<sup>59</sup>Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 36.

<sup>60</sup>Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru* , h. 36.

- 5) Supervisor menetapkan patokan atau standar tingkah laku mengajar yang dikehendaki,
- 6) Supervisor menggunakan insentif sosial dan material.<sup>61</sup>

Oleh karena dalam pendekatan direktif, tanggung jawab pengawas lebih besar maka supervisor harus benar-benar mempersiapkan diri dengan cara membekali diri dengan ilmu pengetahuan atau kompetensi yang berkaitan dengan supervisi.

Kalau mencermati perilaku pengawas terhadap guru dalam pendekatan direktif ini memang terlihat kurang efektif dan bahkan tidak manusiawi karena mengkebiri kreatifitas guru, namun itu tidak berarti tidak dapat digunakan. Karena pendekatan ini diberlakukan hanya kepada guru tertentu. Menurut Brown bahwa ada beberapa guru memberikan reaksi yang menyenangkan terhadap pendekatan ini dengan menunjukkan perbaikan dalam proses mengajar mereka.<sup>62</sup> Hal senada dengan apa yang dikemukakan oleh Glickman bahwa guru baru ternyata lebih suka disupervisi dengan menggunakan pendekatan direktif.<sup>63</sup> Hal ini menunjukkan bahwa ada guru dengan cara pendekatan direktif kemudian dapat memperbaiki cara mengajarnya.

#### b. Pendekatan Nondirektif

Pendekatan nondirektif atau yang disebut pendekatan tidak langsung merupakan cara pendekatan terhadap permasalahan yang sifatnya tidak langsung.<sup>64</sup> Artinya pendekatan ini supervisor tidak secara langsung menunjukkan permasalahan

---

<sup>61</sup> Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan* (Cet. I; jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 76.

<sup>62</sup> Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru*, h. 77-78.

<sup>63</sup> Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru*, h. 77-78.

<sup>64</sup> Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 110.

yang sifatnya langsung. Akan tetapi, supervisor terlebih dahulu mendengarkan apa yang dikemukakan oleh guru. Pendekatan nondirektif bercirikan perilaku di mana supervisor mendengarkan guru, memotivasi guru, mengajukan pertanyaan dan menawarkan pikiran bila diminta guru. Artinya guru diberikan keluasaan untuk mengembangkan kreatifitas dan profesionalnya dalam mengajar.

Pendekatan nondirektif ini dibangun dengan menggunakan psikologi humanistik yang sangat menjunjung tinggi eksistensi manusia, seperti cinta, kreativitas, kesendirian dan perkembangan diri. Teori ini sekaligus menentang teori behavioristik yang seakan-akan mempersamakan manusia dengan hewan.<sup>65</sup>

Pendekatan nondirektif ini berangkat dari premis bahwa, belajar adalah pengalaman pribadi, sehingga pada akhirnya individu harus mampu menyelesaikan masalahnya sendiri. Pada pendekatan ini pengawas memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada guru untuk bagaimana menyelesaikan masalahnya sendiri. Namun tidak berarti bahwa pengawas lepas tanggung jawab. Hanya saja, dalam pendekatan nondirektif ini, tanggung jawab guru dalam mengembangkan dan mensupervisi dirinya sendiri lebih tinggi. Sebaliknya tanggung jawab supervisor dalam mensupervisi guru lebih rendah. Sehingga dalam supervisi yang demikian, kedaulatan lebih banyak ditangan guru dibandingkan dengan supervisor. Keberadaan supervisor sebagai fasilitator saja.

Langkah-langkah yang ditempuh supervisor dalam pendekatan nondirektif ini meliputi: mendengarkan, mengklarifikasi, mendorong, mempresentasikan dan bernegosiasi, dan yang menjadi target utama dari pendekatan supervisi nondirektif adalah bagaimana perencanaan dari guru itu sendiri (*teacher self plan*).<sup>66</sup>

---

<sup>65</sup>Syamsu Yusuf LN. dan Juntika Nurishan, *Teori Kepribadian* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 142.

<sup>66</sup>Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan* , h. 78.



Menurut Glickman dalam pendekatan nondirektif pengawas melakukan langkah-langkah sebagai berikut:

- 1) Supervisor mendengarkan masalah guru dengan serius.
- 2) Supervisor memotivasi guru untuk menyederhanakan dan bertanya,
- 3) Supervisor mengajukan pertanyaan kemudian menjelaskan masalah-masalah guru,
- 4) Supervisor mengupayakan alternatif pemecahan masalah saat guru bertanya atau meminta solusi,
- 5) Supervisor bertanya kepada guru untuk menentukan rencana tindakan pengembangan diri atau profesi.<sup>67</sup>

Pendekatan nondirektif supervisor tidak menggunakan standar pada guru, melainkan guru diberikan kemerdekaan dalam mengembangkan profesinya tanpa didikte dari supervisor.

#### c. Pendekatan Kolaboratif

Pendekatan kolaboratif merupakan cara pendekatan yang memadukan antara pendekatan direktif dan pendekatan nondirektif.<sup>68</sup> Artinya, pengawas dalam menggunakan pendekatan ini tidak mendikte guru dan tidak terlalu memberikan keluasaan kepada guru dalam hal pembelajaran. Melainkan dalam pendekatan ini antara pengawas dan guru sama-sama bersepakat untuk menetapkan struktur proses dan kriteria dalam melaksanakan proses percakapan terhadap permasalahan yang dihadapi guru.

Pendekatan kolaboratif didasarkan pada asumsi-asumsi yang digunakan dalam psikologi kognitif. Belajar siswa dalam pandangan psikologi kognitif adalah merupakan konvergensi antara pandangan behavioristik dan pandangan humanistik. Jika pandangan behavioristik lebih menekankan pada kontrol instrumental lingkungan maka pandangan humanistik memandang belajar sebagai usaha

---

<sup>67</sup> Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru*, h. 37.

<sup>68</sup> Jerry H. Makawimbang, *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*, h. 111.



penemuan sendiri atas sesuatu. Dalam pandangan psikologi kognitif, belajar sesungguhnya merupakan konvergensi antara kontrol instrumental lingkungan dan usaha penemuan diri sendiri.<sup>69</sup>

Pada pendekatan kolaboratif perilaku supervisi yang menonjol adalah, *presenting*, *problem solving*, dan *negotiating*. Tugas supervisor dalam hal ini adalah mendengarkan dan memperhatikan secara cermat akan keprihatinan masalah guru perbaikan mengajarnya dan juga gagasan-gagasan guru untuk mengatasi masalah-masalah itu. Kemudian supervisor memotivasi guru untuk mengaktualisasikan inisiatif yang dipikirkannya untuk memecahkan masalah yang dihadapinya atau peningkatan pengajarannya.

Dalam pendekatan kolaboratif maka supervisor memiliki tahapan-tahapan langkah-langkah sebagaimana yang dikemukakan oleh Glickman sebagai berikut:

- 1) Supervisor menemui guru dengan menawarkan model atau strategi pembelajaran yang perlu diperbaiki,
- 2) Supervisor menanyakan pendapat guru tentang tujuan pelaksanaan supervisi.
- 3) Supervisor mendengarkan pendapat guru.
- 4) Supervisor dan guru mengajukan alternatif pemecahan masalah.
- 5) Supervisor bersama guru membahas tindakan dan menetapkan rencana bersama.<sup>70</sup>

Pendekatan kolaboratif ini merupakan salah satu jurus jitu dalam dunia kepengawasann untuk menghapus stigma klasik yang mendorong guru untuk menghindar dari kegiatan supervisi, karena para guru lebih mendapat tekanan dari supervisor dari pada mendapatkan meningkatkan profesionalnya.

Pendekatan kolaboratif merupakan salah satu pendekatan yang paling disukai guru. Hal ini sebagaimana hasil penelitian yang dilakukan oleh Ginkel

---

<sup>69</sup>Ali Imron, *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan* , h. 81-82.

<sup>70</sup>Abd. Kadim Masaong, *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru* , h. 37.

kepada para guru SD. Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa pendekatan kolaboratif merupakan pendekatan yang paling disukai oleh guru. Kemudian dalam penelitian Glickman juga menunjukkan bahwa guru yang telah berhasil mengembangkan kompetensi dan motivasinya cenderung lebih menyukai pendekatan supervisi kolaboratif.<sup>71</sup>

Kerjasama yang harmonis antara supervisor dan guru dalam mengatasi kesulitan guru melaksanakan proses pembelajaran berkontribusi signifikan terhadap peningkatan kualitas layanan belajar. Namun demikian, pengawas dalam melaksanakan tugasnya melalui berbagai pendekatan yang tepat harus dilengkapi dengan berbagai metode, seperti metode supervisi ilmiah, supervisi artistik dan supervisi kliniks.

## 2. Berbagai Tipe Guru dan Penerapan Pendekatan

Pengawas dalam menjalankan tugasnya tidaklah ditujukan hanya kepada satu orang guru saja. Akan tetapi pengawas dalam melakukan layanan bantuan supervisi kepada beberapa guru. Dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Bab III pasal 10 ayat 2 dan 3 dikemukakan bahwa beban kerja pengawas minimal 7 satuan pendidikan (untuk pengawas madrasah/manajerial) dan minimal 20 orang guru (untuk pengawas PAI/akademik).<sup>72</sup>

Dari jumlah guru yang dikemukakan dalam PERMENAG tersebut dengan keberagamannya mulai dari kompetensi, watak dan sifatnya, sehingga pengawas dalam memberikan layanan supervisi kepada mereka memerlukan berbagai macam

---

<sup>71</sup>Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru*, h. 79.

<sup>72</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*.

pendekatan pula. Oleh sebab itu, sebelum memberikan layanan kepada guru, terlebih dahulu pengawas harus mengenali karakteristik guru yang akan disupervisi, sehingga tujuan supervisi dapat lebih efektif dan efisien.

Untuk memudahkan para supervisor dalam mengenali guru maka berikut akan diuraikan empat kelompok kategori guru sebagaimana yang dikemukakan Glikman;

a. *Guru Dropout (Teacher Dropout)*

Guru semacam ini mempunyai komitmen dan tingkat abstraksi yang rendah. Ia dapat dikategorikan sebagai guru yang kurang bermutu (*dropout*). Adapun ciri-ciri guru yang *dropout* seperti;

- 1) Dalam menjalankan tugas hanya berusaha sampai batas minimal
- 2) Memiliki sedikit sekali motivasi untuk meningkatkan kompetensinya
- 3) Ia tidak dapat memikirkan perbaikan apa yang harus dilakukan
- 4) Puas dengan melakukan tugas rutin yang dilaksanakan dari hari kehari.<sup>73</sup>

b. *Pekerja yang Tidak Terfokus (Unfocused Worker)*

Guru semacam ini memiliki tingkat komitmen yang tinggi tetapi kemampuan berfikir abstraknya rendah. Adapun ciri-ciri guru *unfocused worker* antara lain memiliki antusias yang tinggi, energik dan penuh kemauan. Ia juga pekerja keras dan biasanya ketika meninggalkan sekolah membawa pekerjaan-pekerjaan yang telah diatur untuk dikerjakan di rumah.<sup>74</sup>

Sayangnya tujuan baik tersebut terhalang oleh kurangnya kemampuan guru tersebut untuk menyelesaikan persoalan dan jarang sekali melaksanakan sesuatu secara realitas.

---

<sup>73</sup>Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru* , h. 84.

<sup>74</sup>Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru* , h. 84.

c. Pengamat yang Analitik (*Analytical Observer*)

Guru semacam ini memiliki tingkat komitmen yang rendah, tetapi kemampuan berfikir abstraknya tinggi. Ciri-cirinya antara lain mempunyai intelegensi yang tinggi, mampu memberikan gagasan yang baik tentang apa yang dapat dilakukan di kelasnya bahkan sekolah secara keseluruhan. Ia juga dapat membahas isu-isu kontemporer dan dapat memikirkan langkah demi langkah terhadap apa yang membuat kesuksesan bagi pelaksanaan ide-idenya itu, akan tetapi sering tidak sampai terlaksana, karena meski ia tahu apa yang perlu dilaksanakan, namun ia tidak menyediakan waktu, tenaga dan perhatian yang diperlukan untuk melaksanakan rencana-rencananya itu.<sup>75</sup>

Guru yang *analytical observer* biasanya dikenal sebagai guru yang kaya akan ide-ide namun miskin dalam aplikasi. Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam QS al-Shaf/61: 2-3

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لِمَ تَقُولُونَ مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦١﴾ كَبُرَ مَقْتًا عِنْدَ اللَّهِ أَنْ تَقُولُوا

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI

ALAUDDIN

MAKASSAR

مَا لَا تَفْعَلُونَ ﴿٦٢﴾

Terjemahnya

wahai orang-orang yang beriman! mengapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan?. (itu) sangatlah dibenci di sisi Allah jika kamu mengatakan apa-apa yang tidak kamu kerjakan.<sup>76</sup>

Oleh karena itu, sebaiknya sebagai seorang guru berusaha sedimikian rupa untuk menghindari apa yang dikemukakan pada ayat tersebut.

<sup>75</sup>Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru*, h. 84.

<sup>76</sup>Kementerian Agama RI., *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya* (Syamil Quran: Bandung, 2010), h. 551.

#### d. Guru Profesional

Guru profesional memiliki tingkat komitmen dan tingkat atraksi yang tinggi. Ia benar-benar profesional bersedia dan berusaha secara terus menerus meningkatkan kompetensi dan kapabilitasnya sebagai seorang guru. Dia mampu membuktikan bahawa dirinya sebagai pekerja yang profesional dibidangnya. Bahkan ia tidak hanya meningkatkan dirinya sendiri, tapi para peserta didiknya dan bahkan sampai pada rekan kerjanya.<sup>77</sup>

Untuk keefektifan pelaksanaan supervisi maka harus disesuaikan dengan keadaan guru yang disupervisi. Terhadap guru yang *dropout*, akan lebih efektif kalau disupervisi dengan menggunakan pendekatan direktif. Terhadap guru yang tergolong *analytical observer* dan *unfocused worker* akan lebih efektif kalau disupervisi dengan menggunakan pendekatan kolaboratif. Kemudian terhadap guru yang profesional, akan lebih tepat kalau disupervisi dengan menggunakan pendekatan nondirektif.

#### **D. Profesi, Tugas dan Fungsi Guru**

##### 1. Profesi Guru

Profesi dapat dimaknai sebagai suatu pekerjaan yang dikerjakan. Namun, tidak semua pekerjaan dapat dikatatakan sebagai profesi. Setidaknya ada dua persyaratan sehingga sebuah pekerjaan dikategorikan sebagai profesi. Persyaratan yang pertama adalah pekerjaan itu dilaksanakan secara rutin atau berkesinambungan. Seorang bapak misalnya, mengecat rumahnya sendiri menjelang lebaran, tidak bisa dikategorikan berprofesi tukang cat, karena pekerjaan itu tidak rutin atau hanya dilakukan jelang lebaran. Persyaratan yang kedua adalah memperoleh penghasilan dari pekerjaannya. Seorang pegawai kantor misalnya, yang tiap hari menyetir

---

<sup>77</sup>Sri Banun Muslim, *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru* , h. 85.

sendiri mobilnya, juga tidak bisa dikategorikan berprofesi sopir, walaupun pekerjaan itu rutin dilaksanakan akan tetapi tidak mendapatkan penghasilan dari menyetir mobilnya, melainkan dia mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya di kantor.

Guru atau pendidik atau orang yang akan menjadi guru, harus menjadikannya sebagai profesi. Artinya dilakukan secara rutin dan mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya sebagai guru atau pendidik. Namun tidak semua guru atau pendidik dapat dikatakan sebagai berprofesi guru. Hal tersebut dapat dilihat dari berbagai definisi guru atau pendidik yang dikemukakan Ahmad Tafsir bahwa pendidik adalah siapa saja yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik. Dalam ajaran Islam, yang paling bertanggung jawab dalam hal tersebut adalah orangtua.<sup>78</sup>

Tugas pendidik pada umumnya tidak terkecuali orangtua ialah mendidik, yaitu mengupayakan segala potensi yang dimiliki anak didik, baik potensi psikomotorik, kognitif maupun potensi afektifnya. Potensi itu harus dikembangkan secara seimbang dan setinggi mungkin, karena ketiga potensi itulah yang merupakan modal berharga yang dimiliki peserta didik.

Pada awalnya mendidik murni dilakukan oleh orangtua dan tidak mengirim anaknya ke sekolah. Akan tetapi, karena perkembangan pengetahuan, keterampilan, sikap ditambah dengan kebutuhan hidup sudah sedemikian luas, dalam dan rumit maka orang tua tidak mampu lagi melaksanakan sendiri tugas-tugas mendidik anaknya. Selain tidak mampu karena pesatnya perkembangan ilmu pengetahuan dan keterampilan, juga mendidik anak di rumah untuk saat ini sangat tidak ekonomis, tidak efisien dan efektif.<sup>79</sup>

---

<sup>78</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam* (Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 74.

<sup>79</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, h. 75.

Orangtua sebagai pendidik dalam keluarga tidak bisa dikategorikan sebagai profesi. Walaupun orangtua rutin melaksanakan tugasnya sebagai pendidik, namun tidak memenuhi syarat disebut sebagai profesi. Selain orangtua menjadi pendidik karena paktor kodrat (alami tanpa ada pendidikan sebagai orangtua) juga tidak mendapatkan penghasilan dari pekerjaannya tersebut.

Oleh karena itu, yang menjadi topik bahasan dalam tulisan ini adalah guru sebagai profesi yaitu guru yang memenuhi persyaratan-persyaratan sehingga dapat disebut sebagai berprofesi guru. Berbeda dengan orangtua yang menjadi pendidik secara alami (karena memiliki anak).

Sikun Pribadi yang dikutip oleh Oemar Hamalik mengemukakan bahwa;

profesi itu pada hakikatnya adalah suatu pernyataan atau janji terbuka, bahwa seseorang akan mengabdikan dirinya kepada suatu jabatan atau pekerjaan dalam arti biasa, karena orang tersebut merasa terpanggil untuk menjabat pekerjaan itu.<sup>80</sup>

Dari pengertian tersebut setidaknya mengandung tiga makna yaitu, pertama, profesi adalah sebuah pernyataan atau suatu janji yang terbuka. Artinya orang yang bersedia berjanji secara terbuka akan kesiapan dalam profesinya menyadari bahwa profesi yang akan digeluti merupakan profesi yang baik, dalam arti bermanfaat bagi dirinya dan orang lain. Janji yang bersifat etik berkonsekuensi sanksi bila dilanggar, baik itu datangnnya dari Tuhan, dari institusi, maupun masyarakat. Kedua, profesi mengandung unsur pengabdian, dalam artian bahwa suatu perofesi tidak sekedar mencari keuntungan bagi dirinya sendiri, tetapi untuk pengabdian masyarakat. Profesi seyogyanya menghasilkan kebaikan dan kesejahteraan bagi masyarakat, sehingga dalam pengabdian selalu mementingkan kepentingan klien dari pada diri sendiri. Ketiga, profesi merupakan suatu jabatan atau pekerjaan dalam artian suatu

---

<sup>80</sup>Oemar Hamalik, *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi* (Cet. VI; Jakarta: Bumi Akasara, 2009), h. 1-2.



profesi erat kaitannya dengan jabatan atau pekerjaan yang dengan sendirinya menuntut kompetensi dan kualifikasi.

Sejalan dengan itu, Oemar Hamalik mengemukakan berbagai persyaratan untuk menjadi guru, yakni selain memiliki keahlian khusus sebagai guru, guru harus memenuhi berbagai persyaratan-persyaratan.<sup>81</sup> Namun itu tidak berarti membatasi masyarakat secara keseluruhan untuk berprofesi sebagai guru. Peluang selalu terbuka bagi siapa saja yang ingin mengabdikan diri dalam dunia pendidikan. Sebagaimana dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 bahwa “Tenaga kependidikan adalah anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat untuk menunjang penyelenggaraan pendidikan”.<sup>82</sup>

Guru merupakan sebuah profesi yang harus dijalankan dengan profesional. Untuk menjalankan profesi guru dengan profesional, tidak cukup hanya dengan rutinitas dan memperoleh penghasilan. Akan tetapi untuk menjadikan guru profesional harus didukung dengan berbagai unsur.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 pasal 1 butir 3 dikemukakan bahwa;

Profesional adalah pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan dan memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.<sup>83</sup>

---

<sup>81</sup>Lihat Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar* (Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 177-120.

<sup>82</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, *tentang Sistem Pendidikan Nasional* (Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h. 3.

<sup>83</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen* (Cet. III; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012), h. 4.



Kemudian dalam sebuah diskusi pengembangan model pendidikan profesional tenaga kependidikan yang diselenggarakan oleh PPs IKIP Bandung, yang dikutip Nana Syaodih merumuskan 10 ciri suatu profesi yaitu;

1. Memiliki fungsi dan signifikasi sosial
2. Memiliki keahlian/keterampilan tertentu
3. Keahlian/keterampilan diperoleh dengan menggunakan metode teori dan metode ilmiah
4. Didasarkan pada disiplin ilmu yang jelas
5. Diperoleh dengan pendidikan dalam masa tertentu yang cukup lama
6. Aplikasi dan sosialisasi nilai-nilai profesional
7. Memiliki kode etik
8. Kebebasan untuk memberikan *judgment* dalam memecahkan masalah dalam lingkup kerjanya
9. Memiliki tanggung jawab profesional dan otonom
10. Ada pengakuan dari masyarakat dan imbalan atas layanan profesinya.<sup>84</sup>

Untuk menjadi pekerja yang profesional tidak terkecuali guru di dalamnya harus memenuhi kesepuluh ciri-ciri di atas. Dari sederetan syarat-syarat yang harus dipenuhi oleh guru memberikan sinyal bahwa betapa pentingnya kedudukan sebagai guru. Guru merupakan salah satu dan menjadi unsur terpenting dari berbagai komponen pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan.

Guru bukan profesi kelas dua, ia sejajar dan sebangun dengan profesi lainnya. Karena itu, guru harus berjuang untuk meletakkan kembali profesi guru sebagai posisi terhormat dan bermartabat.<sup>85</sup> Harkat dan martabat profesi guru terletak pada para guru itu sendiri. Sejauh mana guru memposisikan dirinya sebagai guru yang profesional.

Kehadiran Undang-Undang Guru dan Dosen merupakan angin segar bagi dunia pendidikan pada umumnya, dan khususnya bagi para guru dan dosen, di mana

---

<sup>84</sup>Nana Syaodih Sukmadinata, *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek* (Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 191.

<sup>85</sup>Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika* (Cet. VII; Yogyakarta: Graha Guru, 2012), h. viii.

bukan saja menjanjikan peningkatan kesejahteraan, tetapi yang lebih penting adalah peningkatan kualitas dan martabat profesi guru sebagai jaminan bagi pemenuhan hak warga negara untuk mendapatkan pendidikan yang berkualitas sesuai yang diamanatkan undang-undang.<sup>86</sup>

Jaminan undang-undang terhadap profesi guru dapat dijadikan sebagai era baru kebangkitan guru. Guru tidak lagi dipandang sebelah mata, atau di kelas duakan dari profesi lainnya, tapi disejajarkan dengan profesi lainnya.

## 2. Tugas dan Fungsi Guru

Guru merupakan profesi yang memiliki beragam tugas. Dari tugas-tugas itulah yang kemudian dijabarkan guru dalam unjuk kerja nyata. Tugas guru bukanlah hal yang mudah dikerjakan, perlu keprofesionalan dalam menyelesaikan berbagai tugas yang diimbang.

Profesi guru menuntut berbagai keahlian, karena dalam melaksanakan tugas sebagai guru dihadapkan dengan berbagai jenis pekerjaan. Selain guru berhadapan dengan benda mati seperti berbagai dokumen, guru juga selalu berhadapan dengan peserta didik dengan keanekaragaman watak dan karakteristiknya.

Guru dituntut mampu memposisikan dirinya di antara keanekaragaman watak dan karakteristik peserta didiknya. Guru harus tetap fokus pada dua aspek yaitu aspek bahan ajar (perkembangan intelektual) dan anak itu sendiri (perkembangan anak sebagai pribadi yang bulat). Anak bukan bejana atau seperti botol kosong yang serba sama yang diisi dengan air, melainkan anak merupakan makhluk hidup yang dapat bereaksi positif maupun negatif terhadap perangsang-perangsang yang diterimanya.<sup>87</sup> Guru dituntut untuk memahami bagaimana

<sup>86</sup> Abd. Rahman Getteng, *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*, h. vi.

<sup>87</sup> S. Nasution, *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar* (Cet. XV; Jakarta: Bumi Aksara, 2011), h. 122-123.

perkembangan psikis peserta didiknya agar memudahkan mengetahui apa yang diinginkan oleh peserta didiknya.

Dalam Undang-Undang guru dan dosen dikemukakan bahwa ada tujuh tugas utama guru yaitu mendidik, mengajar, mengarahkan, membimbing, melatih, menilai dan mengevaluasi.<sup>88</sup> Sementara dalam Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 menambahkan satu poin (yang dikhususkan kepada guru Pendidikan Agama Islam) sehingga menjadi delapan item sebagaimana dalam redaksinya bahwa guru Pendidikan Agama Islam adalah guru profesional yang tugas utamanya adalah mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, memberi teladan, menilai dan mengevaluasi.<sup>89</sup>

Guru sebagai pekerja holistik adalah berada pada tingkatan tertinggi dalam sistem pendidikan nasional. Karena guru dalam melaksanakan tugasnya memiliki otonomi yang kuat. Adapun tugas guru sangatlah banyak, baik yang terkait masalah kedinasan dan profesinya di sekolah sebagaimana yang terdapat dalam undang-undang, selain itu guru juga dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan mengembangkan ilmu yang menjadi bidangnya agar tidak ketinggalan zaman, ataupun tugas di luar kedinasan yang terkait dengan kemanusiaan dan kemasyarakatan secara umum di luar sekolah.

#### **E. Kualifikasi dan Kompetensi Guru**

Dalam menjalankan profesi guru sebagai pekerjaan yang profesional diperlukan berbagai syarat-syarat. Salah satu syarat yang amat penting adalah kualifikasi. Salah satu faktor dari sekian banyak faktor yang menjadi penyebab guru

---

<sup>88</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 3.

<sup>89</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, *tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*, h. 3.

tidak profesional dalam menjalankan profesinya karena kualifikasinya yang tidak memenuhi persyaratan.

Hal tersebut sekaligus menjadi jawaban terhadap berbagai pernyataan yang mengatakan bahwa siapa saja bisa berprofesi sebagai guru asal mengetahui materi yang akan diajarkan. Mereka beranggapan bahwa untuk menjadi guru itu mudah, cukup menguasai materi yang akan ditransfer/diajarkan kepada peserta didik. Padahal pendidikan bukan sekedar mentransfer ilmu pengetahuan dari guru ke peserta didik.

Dalam Undang-Undang Guru dan Dosen dikemukakan bahwa

Guru wajib memiliki kualifikasi akademik, kompetensi, sertifikasi pendidik, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki kemampuan untuk mewujudkan tujuan pendidikan nasional.<sup>90</sup>

Kemudian lebih lanjut dalam undang-undang dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kualifikasi akademik adalah diperoleh melalui pendidikan tinggi program sarjana atau program diploma empat.<sup>91</sup> Oleh karena itu, untuk menjadi guru harus melalui pendidikan terlebih dahulu, minimal diploma empat dari jurusan keguruan atau pendidikan.

Kemudian selanjutnya yang menjadi persyaratan pendidik adalah sertifikat pendidik. Akan tetapi sertifikat pendidik dapat diterima setelah memenuhi persyaratan. Sertifikat pendidik hanya dikeluarkan oleh perguruan tinggi yang memiliki program pengadaan kependidikan yang terakreditasi dan ditetapkan pemerintah.<sup>92</sup>

---

<sup>90</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 10.

<sup>91</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 11.

<sup>92</sup>Lihat Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 11.

Selain itu, Soejono yang dikutip Ahmad Tafsir mengemukakan empat syarat utama menjadi guru yaitu, dewasa, sehat jasmani dan rohani, memiliki keahlian dalam mengajar serta berkesusilaan dan berdedikasi tinggi.<sup>93</sup>

Lebih lanjut Oemar Hamalik mengemukakan bahwa untuk menjadi guru harus memenuhi syarat-syarat yang berat di antaranya;

1. Memiliki bakat sebagai guru
2. Memiliki keahlian sebagai guru
3. Memiliki kepribadian yang baik dan terintegrasi
4. Memiliki mental yang sehat
5. Berbadan sehat
6. Memiliki pengalaman dan pengetahuan yang luas
7. Berjiwa Pancasila
8. Warga negara yang baik.<sup>94</sup>

Selain dari kualifikasi dan sertifikasi yang menjadi mutlak dimiliki guru maka kompetensi juga merupakan satu keharusan dimiliki guru. Kompetensi guru merupakan kemampuan seorang guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Pekerjaan yang profesional memerlukan beberapa bidang ilmu yang sengaja dipelajari kemudian diaplikasikan bagi kepentingan umum. Tugas guru sebagai tugas profesi yang menuntut kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang keguruan, sehingga mampu melakukan tugas dan fungsinya sebagai guru dengan kemampuan optimal.<sup>95</sup>

W. Robert Houston mengemukakan definisi tentang kompetensi yang dikutip oleh Roestiyah mengemukakan bahwa kompetensi merupakan suatu tugas yang memadai atau kepemilikan pengetahuan, keterampilan dan kemampuan yang dituntut oleh sebuah jabatan seseorang.<sup>96</sup> Definisi ini mengandung arti bahwa

<sup>93</sup> Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*, h. 80.

<sup>94</sup> Oemar Hamalik, *Proses Belajar Mengajar*, h. 118.

<sup>95</sup> Moh. Uzer Usman, *Menjadi Guru Profesional* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999), h. 14-15.

<sup>96</sup> Roestiyah NK, *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan* (Jakarta: Bina Aksara, 1982), h. 12.

seorang guru perlu memiliki dan menguasai sejumlah pengetahuan, kemampuan dan keterampilan khusus yang terkait dengan profesi keguruannya, agar ia dapat menjalankan tugasnya dengan sebaik-baiknya serta dapat memenuhi keinginan dan harapan peserta didik.

Sedangkan menurut Barlow, kompetensi guru adalah *the ability to responsibly perform his or her duties appropriately*, artinya kemampuan seorang guru dalam melaksanakan kewajiban-kewajibannya secara bertanggung jawab dan layak.<sup>97</sup> Jadi kompetensi guru dapat dipahami sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya, artinya guru yang kreatif dan piawai dalam melaksanakan profesinya dapat dikatakan guru yang kompeten dan profesional. Selain itu, kompetensi juga dapat dipahami sebagai kualitas atau ciri-ciri khusus yang harus melekat dan ada pada diri orang yang bekerja secara profesional.

Dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, pada bab IV pasal 10 menyebutkan empat kompetensi guru, yakni kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional.<sup>98</sup> Adapun kompetensi yang dimaksud akan diuraikan sebagai berikut;

#### 1. Kompetensi Pedagogik

Kompetensi pedagogik merupakan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran peserta didik, kompetensi ini dapat dilihat dari kemampuan merencanakan program pembelajaran, kemampuan melaksanakan interaksi atau mengelola proses pembelajaran, dan kemampuan melakukan penilaian dan mengevaluasi proses dan hasil belajar.

---

<sup>97</sup>Roestiyah NK, *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*, h. 12.

<sup>98</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 11.

Syaiful Sagala yang dikutip Mappanganro mengemukakan bahwa kompetensi pedagogik merupakan kemampuan dalam mengelola peserta didik meliputi;

1. Pemahaman wawasan guru akan landasan dan filsafat pendidikan
2. Guru memahami potensi dan keberagaman peserta didik
3. Guru mampu mengembangkan kurikulum silabus baik dalam bentuk dokumen maupun implementasi dalam bentuk pengalaman belajar
4. Mampu menyusun rencana dan strategi pembelajaran
5. Mampu melakukan evaluasi belajar
6. Mampu mengembangkan bakat dan minat peserta didik.<sup>99</sup>

Kemudian lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 16 Tahun 2010 dikemukakan bahwa standar kompetensi pedagogik meliputi;

- a. pemahaman karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional, dan intelektual;
- b. penguasaan teori dan prinsip belajar pendidikan agama;
- c. pengembangan kurikulum pendidikan agama;
- d. penyelenggaraan kegiatan pengembangan pendidikan agama;
- e. pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan dan pengembangan pendidikan agama;
- f. pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki dalam bidang pendidikan agama;
- g. komunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik;
- h. penyelenggaraan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar pendidikan agama;
- i. pemanfaatan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran pendidikan agama; dan
- j. tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran pendidikan agama.<sup>100</sup>

Proyek Pengembangan Pendidikan Guru (P3G) menyebutkan 10 (sepuluh) kompetensi yang harus dimiliki guru, yaitu:

- 1) Menguasai bahan
- 2) Mengelola program pembelajaran
- 3) Mengelola kelas

---

<sup>99</sup>Lihat Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru* (Makassar: Alauddin Press, 2010), h. 10.

<sup>100</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, *tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*, h. 9.



- 4) Menggunakan media/sumber
- 5) Menguasai landasan-landasan kependidikan
- 6) Mengelola interaksi belajar mengajar
- 7) Menilai prestasi siswa
- 8) Mengenal fungsi dan program pelayanan bimbingan dan penyuluhan.
- 9) Mengenal dan menyelenggarakan administrasi sekolah.
- 10) Memahami prinsip-prinsip dan menafsirkan hasil-hasil penelitian pendidikan guna keperluan pengajaran.<sup>101</sup>

Dari sederatan panjang indikator kompetensi pedagogik maka dapat disimpulkan bahwa menjadi guru tidak mudah. Karena untuk memiliki kompetensi pedagogik perlu pendidikan khusus keguruan, karena hanya perguruan tinggi yang memiliki program keguruan yang mengajarkan tentang apa dan bagaimana pedagogik.

Kompetensi pedagogik berorientasi pada kemampuan guru dalam berbagai hal, mulai dari mempersiapkan pembelajaran, proses pembelajaran dan penilaian serta evaluasi, sampai pada mengenal karakteristik serta kepribadian peserta didik, termasuk di dalamnya bakat dan minat serta kemampuan yang dimiliki untuk kemudian dikembangkan.

## 2. Kompetensi Kepribadian

Dalam kehidupan sehari-hari kata kepribadian digunakan untuk menggambarkan tiga hal yaitu, identitas diri atau jati diri, kesan umum tentang diri sendiri atau orang lain, dan fungsi-fungsi kepribadian yang sehat atau bermasalah.<sup>102</sup>

---

<sup>101</sup>Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), h. 239-240.

<sup>102</sup>Syamsu Yusuf LN. dan Achmad Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian* (Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), h. 3.



Kemudian lebih lanjut Woodworth mengemukakan bahwa kepribadian merupakan kualitas tingkah laku total individu. Sementara Dashiell mengartikannya sebagai total tingkah laku yang terorganisasi.<sup>103</sup> Dengan demikian, kepribadian dapat diartikan sebagai seperangkat asumsi tentang tingkah laku manusia.

Guru sebagai pendidik merupakan sosok yang akan menjadi panutan. Segala tingkah lakunya akan selalu menjadi sorotan, terutama di dalam kelas. Perilakunya dapat berpengaruh terhadap peserta didiknya.<sup>104</sup> Hal itu penting dikarenakan apapun perbuatan guru, mulai dari cara bertutur kata, cara bersikap dan cara bersosialisasi dengan lingkungan peserta didik dan masyarakat selalu mendapat penilaian dari orang sekitarnya tidak terkecuali para peserta didiknya.

Seorang guru harus memelihara dirinya dari berbagai sikap dan tingkah laku yang dapat mengundang reaksi negatif dari lingkungan sekitarnya. Contoh, ketika suatu pelanggaran dilakukan oleh masyarakat biasa, biasanya tidak mendapat reaktif yang begitu besar, akan tetapi bila seorang guru melakukan pelanggaran seperti amoral maka kemudian akan menjadi bahan perbincangan yang hangat dalam lingkungan masyarakat sekitar.

Setiap langkah-langkah yang ditempuh, setiap tindakan dan tingkah laku serta perkataan dianggap positif akan meningkatkan citra diri dan kepribadian seorang guru, selama hal itu dilakukan dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab. Kepribadian merupakan hal yang abstrak, tidak dapat dilihat secara nyata, tapi dapat dinilai dengan melihat penampilan secara nyata melalui perkataan,

---

<sup>103</sup>Lihat Syamsu Yusuf LN. Dan Achmad Juntika Nurihsan, *Teori Kepribadian*, h. 3.

<sup>104</sup>Lihat Sudarwan Danim dan Khairil, *Psikologi Pendidikan (dalam Perspektif Baru)* (Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011), h. 157.

perbuatan dan tingkah lakunya. Oleh sebab itu, setiap tindakan, tingkah laku, gerak gerik, ucapan seseorang merupakan cerminan dari kepribadian.<sup>105</sup>

Pribadi guru memiliki andil yang sangat besar terhadap keberhasilan pendidikan, khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Pribadi guru juga sangat berperan dalam membentuk pribadi peserta didik. Ini dapat dimaklumi karena manusia merupakan makhluk yang suka mencontoh, termasuk mencontoh pribadi guru dalam membentuk pribadinya. Semua itu menunjukkan bahwa kompetensi personal atau kepribadian guru sangat dibutuhkan oleh peserta didik dalam proses pembentukan pribadinya.

Setiap guru dituntut untuk memiliki kompetensi kepribadian yang memadai, bahkan kompetensi ini akan melandasi atau menjadi landasan bagi kompetensi-kompetensi lainnya. Dalam hal ini, guru tidak hanya dituntut untuk memaknai pembelajaran, tetapi yang paling penting adalah bagaimana dia menjadikan pembelajaran sebagai ajang pembentukan kompetensi dan perbaikan kualitas pribadi peserta didik.

Dalam penjelasan Undang-Undang Guru dan Dosen Nomor 14 Tahun 2005 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi kepribadian adalah kompetensi kepribadian yang mantap, berkhilak mulia, arif dan bijaksana serta menjadi teladan peserta didik.<sup>106</sup>

Kemudian lebih lanjut diuraikan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 bahwa kompetensi kepribadian meliputi;

1. Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.

---

<sup>105</sup>Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru*, h. 50.

<sup>106</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 67.

2. Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
3. Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
4. Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.<sup>107</sup>

Tugas seorang guru bukan sekedar menumpahkan semua ilmu pengetahuan, tetapi guru juga bertugas untuk mendidik. Mendidik bukan hanya mentransfer ilmu pengetahuan akan tetapi juga mentransfer nilai-nilai kepada peserta didiknya. Ia bukan saja pembawa ilmu pengetahuan, akan tetapi juga menjadi contoh seorang pribadi manusia teladan. Karenanya, pribadi guru sering dianggap sebagai model atau panutan.

Banyak masalah pendidikan yang disebabkan oleh faktor kepribadian guru yang kurang mantap, kurang stabil dan kurang dewasa. Kondisi kepribadian yang demikian sering membuat guru melaksanakan tindakan-tindakan yang tidak profesional, tidak terpuji, bahkan tindakan-tindakan yang tidak senonoh yang merusak citra dan martabat guru. Berbagai kasus yang disebabkan oleh kepribadian guru yang tidak baik tersebut sehingga sering terdengar di media elektronik, dimuat pada media cetak, misalnya adanya guru yang berbuat amoral, penipuan dan kasus-kasus lainnya yang tidak pantas dilakukan oleh seorang guru.

Uraian di atas hanyalah ilustrasi, para guru dapat menambah aspek-aspek tingkah laku yang sering muncul dalam kehidupan bersama peserta didik. Memang setiap profesi mempunyai tuntutan-tuntutan khusus, dan sebagai guru seseorang harus siap menerima tanggung jawab untuk menjadi teladan. Akan tetapi jangan sampai hal tersebut menjadikan guru tidak memiliki kebebasan sama sekali, atau akan menjadi beban karena harus selalu menunjukkan teladan yang terbaik, dan

---

<sup>107</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2010, *tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, h. 8.

moral yang sempurna. Guru juga manusia biasa, dalam batasan-batasan tertentu, tentu saja memiliki berbagai kelemahan dan kekurangan, sehingga ia tidak terlepas dari kekhilafan.

### 3. Kompetensi Sosial

Guru adalah makhluk sosial yang dalam kehidupannya tidak akan terlepas dari kehidupan sosial masyarakat dan lingkungannya. Oleh karena itu, guru diuntut memiliki kompetensi sosial yang memadai, terutama dalam kaitannya dengan pendidikan, yang tidak terbatas pada pembelajaran di sekolah, tetapi juga pada pendidikan yang terjadi dan berlangsung pada masyarakat.

Dalam penjelasan Undang-Undang Guru dan Dosen dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan kompetensi sosial adalah kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orang tua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.<sup>108</sup>

Sementara dalam Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 16 Tahun 2010 mengemukakan indikator-indikator kompetensi sosial sebagai berikut;

- a. sikap inklusif, bertindak objektif, serta tidak diskriminatif berdasarkan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi;
- b. sikap adaptif dengan lingkungan sosial budaya tempat bertugas; dan
- c. sikap komunikatif dengan komunitas guru, warga sekolah dan warga masyarakat.<sup>109</sup>

Kompetensi sosial terkait dengan kemampuan guru sebagai makhluk sosial dalam berinteraksi dengan orang lain. Sebagai makhluk sosial guru berperilaku santun, mampu berkomunikasi dan berinteraksi dengan lingkungan secara efektif dan menarik, mempunyai rasa empati terhadap orang lain. Kompetensi sosial

---

<sup>108</sup>Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 67.

<sup>109</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, *tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*, h. 10.

merupakan kemampuan guru berkomunikasi dan berinteraksi dengan peserta didik, sesama pendidik dan tenaga kependidikan atau segenap *stakeholder*. Kondisi objektif ini yang menggambarkan bahwa kemampuan guru tampak ketika bergaul dan melakukan interaksi sebagai profesi maupun sebagai masyarakat, dan kemampuan mengimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari.

Sentuhan sosial menunjukkan seseorang termasuk guru profesional dalam menjalankan profesinya karena dilandasi dengan nilai-nilai kemanusiaan dan kesadaran akan dampak lingkungan hidup dari efek pekerjaannya, serta mempunyai nilai ekonomi bagi kemaslahatan masyarakat secara luas. Menurut Slamet yang dikutip Syaiful sagala bahwa kompetensi sosial terdiri dari sub-kompetensi sebagai berikut;

1. memahami dan menghargai perbedaan serta memiliki kemampuan mengelola konflik dan benturan
2. melakukan kerjasama secara harmonis dengan kawan sejawat, pimpinan dan pihak-pihak lain
3. membangun kerja tim yang kompak, cerdas, dinamis dan lincah
4. melaksanakan komunikasi secara efektif dan menyenangkan dengan seluruh warga sekolah
5. memiliki kemampuan untuk memahami dan menginternalisasikan perubahan lingkungan yang berpengaruh terhadap tugasnya
6. memiliki kemampuan untuk menundukkan dirinya dalam sistem nilai yang berlaku di masyarakat sekitarnya
7. memiliki prinsip-prinsip tata kelola yang baik.<sup>110</sup>

Jika di sekolah guru diamati dan dinilai oleh peserta didik dan oleh teman sejawat serta atasannya maka di masyarakat ia dinilai dan diawasi oleh masyarakat. Dalam kesempatan tertentu sejumlah peserta didik membicarakan kebaikan gurunya, tetapi dalam situasi yang lain mereka membicarakan kekurangan gurunya, demikian halnya pada masyarakat. Oleh karena itu, sebaiknya guru sering meminta pendapat teman sejawat atau peserta didik tentang penampilan dan sikapnya sehari-hari, baik di sekolah maupun di masyarakat, dan segera memanfaatkan pendapat

---

<sup>110</sup>Syaiful sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*, h. 38.

yang telah diterima dalam upaya mengubah atau memperbaiki penampilan dan sikapnya yang kurang tepat.

#### 4. Kompetensi Profesional

Guru merupakan salah satu faktor penting dalam penyelenggaraan pendidikan. Meningkatkan kualitas pendidikan berarti juga harus meningkatkan kualitas guru. Namun peningkatan kualitas guru bukan hanya kesejahteraannya, tetapi juga profesionalitasnya.

Profesional yang dimaksud adalah seorang guru memiliki komitmen meningkatkan profesionalitasnya atau keahlian yang dimilikinya secara terus menerus dan tidak terpisahkan dengan pribadinya. Profesionalitas dimaksudkan dengan menunjuk kepada peningkatan kualifikasi dan kemampuan dalam usaha mencapai kriteria atau standar profesi, sehingga profesionalisasi ini merupakan serangkaian proses dalam pengembangan profesionalitas menunjuk kepada sikap-sikap tertentu bagi orang yang memiliki profesi, terhadap profesinya dalam rangka mengerjakan pekerjaannya.<sup>111</sup>

Dalam peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2007 dijabarkan komponen-komponen kompetensi profesional sebagai berikut;

- a. Menguasai materi, struktur, konsep, dan pola pikir keilmuan yang mendukung mata pelajaran yang diampu.
- b. Menguasai standar kompetensi dan kompetensi dasar mata pelajaran/ bidang pengembangan yang diampu.
- c. Mengembangkan materi pembelajaran yang diampu secara kreatif.
- d. Mengembangkan keprofesionalan secara berkelanjutan dengan melakukan tindakan reflektif.
- e. Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk berkomunikasi dan mengembangkan diri.<sup>112</sup>

<sup>111</sup> Mappanganro, *Pemilikan Kompetensi Guru*, h. 80.

<sup>112</sup> Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2010, *tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, h. 10.

Kompetensi profesional merupakan kemampuan yang berhubungan dengan tugas-tugas keguruan. Kemampuan profesional seorang guru pada hakikatnya adalah muara dari keterampilan dasar dan pemahaman yang mendalam tentang anak sebagai peserta didik, objek belajar dan situasi kondusif berlangsungnya kegiatan pembelajaran.<sup>113</sup> Kemudian yang terpenting lagi dalam kompetensi profesional adalah bagaimana seorang guru selalu mengasah dan mengembangkan pengetahuannya. Guru tidak boleh merasa ilmu yang dimiliki sudah cukup, akan tetapi selalu berupaya mencari informasi baru yang berhubungan dengan apa yang diajarkannya, karena ilmu pengetahuan selalu mengalami perkembangan dan kemajuan. Atas dasar pengertian tersebut, dikatakan bahwa pekerjaan seorang guru dalam arti yang seharusnya adalah pekerjaan profesional, yaitu pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh mereka yang secara khusus disiapkan menjadi guru.

Sementara itu, dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen disebutkan bahwa kompetensi profesional adalah kemampuan penguasaan materi pelajaran luas dan mendalam.<sup>114</sup> Penguasaan materi pelajaran terdiri atas penguasaan bahan yang harus diajarkan, dan konsep dasar keilmuan dari bahan yang diajarkan.<sup>115</sup>

Peranan guru yang digugu dan ditiru adalah suatu profesi yang mengutamakan intelektualitas, kepandaian, kecerdasan, keahlian berkomunikasi, kebijaksanaan dan kesabaran tinggi. Tidak semua orang dapat menekuni profesi guru dengan baik, karena kepandaian dan kecerdasan bukan penentu keberhasilan orang tersebut menjadi guru.

---

<sup>113</sup> Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*, h. 134.

<sup>114</sup> Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, *tentang Guru dan Dosen*, h. 67.

<sup>115</sup> Martinis Yamin, *Profesionalisme Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi* (Jakarta: Gaun Persada Press, 2006), h. 5.



Menurut Slamet yang dikutip Syaiful Sagala bahwa kompetensi profesional berkaitan dengan bidang studi yang memiliki sub-kompetensi sebagai berikut;

- a. Memahami pata pelajaran yang telah disiapkan untuk mengajar
- b. Memahami standar isi mata pelajaran yang tertera dalam peraturan pemerintah serta bahan ajar yang ada dalam kurikulum
- c. Memahami struktur, konsep dan metode keilmuan yang menaungi materi ajar
- d. Memahami hubungan konsep antara mata pelajaran terkait, dan
- e. Menerapkan konsep-konsep keilmuan dalam kehidupan sehari-hari.<sup>116</sup>

Dari berbagai indikator yang menyertai kompetensi profesional memberikan gambaran bahwa betapa guru profesional harus diperkaya dengan berbagai kemampuan. Dengan demikian, perlu menjadi perhatian bersama dari *stakeholder* bahwa untuk pemenuhan berbagai kemampuan pada diri guru maka guru perlu melengkapi dirinya dengan berbagai persyaratan yang harus dimilikinya. *Stakeholder* perlu memotivasi, membimbing sampai pada memberikan layanan seperti supervisi kepada guru demi peningkatan kompetensi profesionalnya.

Selain empat kompetensi yang menjadi syarat dimiliki guru sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen yang dijabarkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2007 maka Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 16 Tahun 2010 menambah satu kompetensi lagi untuk guru Pendidikan Agama Islam yaitu kompetensi kepemimpinan.

Adapun indikator-indikator dalam kompetensi kepemimpinan menurut Peraturan Menteri Agama RI. sebagai berikut;

- a. kemampuan membuat perencanaan pembudayaan pengamalan ajaran agama dan perilaku akhlak mulia pada komunitas sekolah sebagai bagian dari proses pembelajaran agama;
- b. kemampuan mengorganisasikan potensi unsur sekolah secara sistematis untuk mendukung pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah;

---

<sup>116</sup>Syaiful Sagala, *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan, Ih. 39-40.*

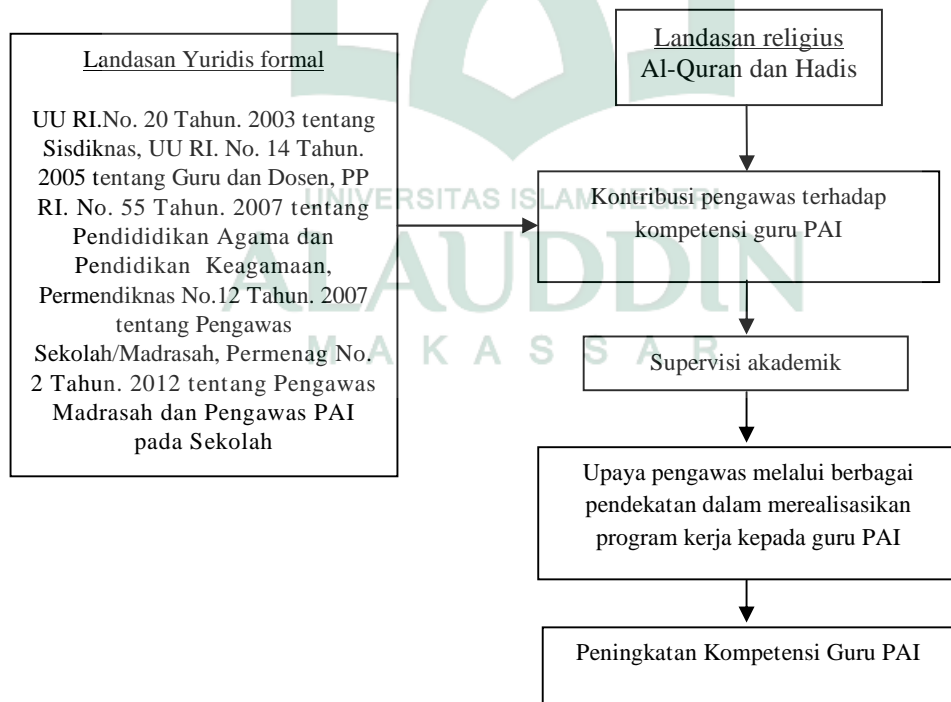


- c. kemampuan menjadi inovator, motivator, fasilitator, pembimbing dan konselor dalam pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah; serta
- a. kemampuan menjaga, mengendalikan, dan mengarahkan pembudayaan pengamalan ajaran agama pada komunitas sekolah dan menjaga keharmonisan hubungan antar pemeluk agama dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.<sup>117</sup>

Menteri Agama menilai bahwa betapa pentingnya kepemimpinan dalam profesi sebagai guru, sehingga ditambahkan kompetensi kepemimpinan, yang walaupun dalam kompetensi kepemimpinan tidak hanya penting bagi guru agama saja akan tetapi juga penting dimiliki oleh semua guru. Peserta didik, selain butuh dididik, diajar, dibimbing, diarahkan, dilatih, diberikan teladan, dinilai dan dievaluasi, peserta didik juga perlu untuk dipimpin dalam hal mencapai tujuan pendidikan sebagaimana yang dicita-citakannya.

#### **F. Kerangka Konseptual**

##### Bagan Kerangka Konseptual



Gambar 1 kerangka konseptual

<sup>117</sup> Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010, *tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*, h. 10-11.

### BAB III

#### METODOLOGI PENELITIAN

##### **A. Jenis dan Lokasi Penelitian**

###### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, yakni penelitian yang dimaksudkan untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian, misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain-lain, secara holistik dan dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah.<sup>1</sup> Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa penelitian ini bersifat deskriptif. Artinya, penulis menganalisis dan menggambarkan penelitian secara objektif dan mendetail untuk mendapatkan hasil yang akurat.

Secara teoretis, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status suatu gejala yang ada, yaitu keadaan gejala menurut apa adanya pada saat penelitian dilakukan, sehingga hanya merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data yakni data yang diperoleh dari informan.<sup>2</sup> Artinya, data diperoleh dari pengamatan atau wawancara terhadap sumber informasi yaitu informan dan dokumen yang relevan.

###### **2. Lokasi Penelitian**

Karena dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu pengawas PAI dan Guru PAI Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang maka lokasi penelitian juga diarahkan kepada dua macam tempat. Adapun tempat yang dimaksud adalah kantor Kementerian Agama Republik Indonesia Kabupaten Pinrang yang menjadi tempat

---

<sup>1</sup>Lihat Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012), h. 6.

<sup>2</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 234.

berkantornya pengawas PAI dan sekolah menengah di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang yang menjadi tempat mengajarnya para guru Pendidikan Agama Islam dan sekaligus tempat para pengawas melakukan supervisi terhadap para guru Pendidikan Agama Islam. Dalam penelitian ini penulis menjadikan sekolah menengah sebagai lokasi penelitian dan memilih beberapa sekolah menengah yang dijadikan sebagai sumber data/informasi sesuai dengan kondisi sosial sekolah tersebut. Hal ini dimaksudkan untuk membatasi lokasi penelitian sekaligus memudahkan penulis dalam melakukan penelitian.

Adapun sekolah sasaran yang menjadi lokasi penelitian sebagai berikut

Tabel 3.1

Daftar sekolah menengah Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

NO	NAMA SEKOLAH	ALAMAT
1	SMPN 1 Patampanua	Jl. Poros Pinrang Polmas, Leppangang
2	SMPN 2 Patampanua	Jl. Poros Benteng-Malimpung, Urung
3	SMPN 4 Patampanua	Jl. Poros Pinrang Malimpung, Malimpung
4	SMP 1 Atap Bonne	Bonne, Desa Sipatuo
5	SMAN 1 Patampanua	Jl. Poros Benteng-Malimpung, Urung
6	SMKN 4 Pinrang	Maccobbu, Kecamatan Patampanua

Sumber: Data Kasi Pendis Kemenag Pinrang 2013

Adapun pertimbangan penulis memilih Kabupaten Pinrang sebagai lokasi penelitian adalah karena Pinrang merupakan kabupaten kelahiran penulis. Selain itu, penulis menilai bahwa Kabupaten Pinrang lebih maju dalam pengelolaan pendidikan dari tempat tugas penulis di Kabupaten Raja Ampat yang baru saja berdiri sendiri menjadi kabupaten, sehingga masih diperhadapkan dengan berbagai kekurangan dan keterbatasan. Dengan demikian penulis bisa membandingkan antara kabupaten

tempat penulis bertugas dan kabupaten tempat penulis meneliti, sehingga kemudian dapat menjadi pembelajaran berharga dan menjadi bekal penulis dalam menjalankan tugas di Kabupaten Raja Ampat yang sampai sekarang belum memiliki pengawas Pendidikan Agama Islam untuk sekolah menengah.

### **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan pendekatan keilmuan yang meliputi;

#### **1 Pendekatan Teologis Normatif**

Pendekatan teologis normatif merupakan pendekatan dasar yang sesuai ajaran agama Islam.<sup>3</sup> Dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa dalil naqli baik dari al-Qu'an maupun hadis sebagai referensi dan sekaligus sebagai dasar penulis dalam melakukan penelitian.

#### **2 Pendekatan Pedagogis**

Pendekatan pedagogis ini digunakan oleh penulis mengkaji pendapat atau pemikiran praktisi pendidikan (pengawas PAI dan guru PAI serta kepala sekolah). Pendekatan ini digunakan untuk mengkaji segala hal yang berhubungan dengan tugas dan kontribusi pengawas dalam melaksanakan program kerjanya terhadap guru Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan guru Pendidikan Agama Islam yang berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, yang selanjutnya guru PAI dapat mengajar sesuai dengan apa yang dibutuhkan peserta didik sehingga Pendidikan Agama Islam dapat dicintai peserta didik dengan menjadi unsur utama dalam tercapainya tujuan pendidikan sesuai dengan al-Qur'an dan hadis serta undang-undang.

---

<sup>3</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 234.

Pendekatan ini juga digunakan penulis mengkaji segala hal yang dilakukan oleh para guru Pendidikan Agama Islam yang berkaitan dengan berbagai kegiatan mereka yang berkenaan dengan profesi keguruannya, sehingga dapat memperoleh data yang dibutuhkan dari para guru Pendidikan Agama Islam.

### 3. Pendekatan Psikologis

Pendekatan ini digunakan penulis untuk mempelajari perilaku seseorang yang tampak secara lahiriah karena dipengaruhi oleh proses dan mental terhadap keyakinan.<sup>4</sup> Pendekatan psikologis ini dimaksudkan untuk mendalami berbagai gejala psikologis yang muncul dari pengawas dan guru Pendidikan Agama Islam pada saat meneliti pengawas dan guru melakukan interaksi.

### C. Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian ini terdiri atas dua, yaitu:

#### 1. Sumber Data Primer

Sumber data primer adalah Kasi Pendis, Ketua Pokjawas, dan pengawas PAI pada Kantor Kementerian Agama di Kabupaten Pinrang, kemudian kepala sekolah, dan guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang serta berbagai dokumen-dokumen penting. Dari Semua informan dan dokumen tersebut yang penulis memperoleh data atau informasi berkenaan dengan masalah yang diteliti.

Dalam pengambilan sumber data, penulis lakukan dengan teknik *nonprobability sampling*, artinya penentuan informan dengan tidak memberikan peluang/kesempatan yang sama dari setiap sumber/informan yang ada.<sup>5</sup> Kemudian

<sup>4</sup>Lihat Dzakiah Daradjat, *Ilmu Jiwa Agama* (Jakarta: Bulan Bintang, 2005), h. 12.

<sup>5</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)* (Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012), h. 301.

dalam teknik *nonprobability sampling*, penulis menggunakan teknik *purposive sampling*, yakni Kasi Pendis, Ketua Pokjawas, dan pengawas PAI Kementerian Agama Kabupaten Pinrang pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang. hal ini dilakukan karena penulis menilai bahwa merekalah yang dapat memberikan informasi terhadap data yang penulis butuhkan. Kemudian dalam menentukan guru PAI sebagai informan penulis menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni pada awalnya penulis hanya menjadikan satu informan untuk satu satuan pendidikan, namun untuk mendapatkan informasi yang lebih akurat lagi maka ada beberapa satuan pendidikan (lebih dari satu orang) penulis jadikan informan, yaitu SMKN 4 Pinrang, SMPN 1 Patampanua dan SMPN 2 Patampanua.

## 2. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data saat pengumpulan data, misalnya melalui dokumentasi atau melalui orang yang tidak terlibat langsung dalam fokus yang diteliti.<sup>6</sup> Selain itu termasuk data sekunder seperti data yang bersifat dokumen penunjang yang dinilai dapat menambah akurasi data yang diperoleh dari sumber data primer

### **D. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu penulis mengumpulkan data dengan mengadakan penelitian langsung pada objek yang diteliti dengan menggunakan berbagai instrumen sebagai berikut :

#### 1. Observasi (Pengamatan)

Observasi adalah pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap unsur-unsur yang tampak dalam suatu gejala atau gejala-gejala pada objek

---

<sup>6</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2011), h. 193.

penelitian untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.<sup>7</sup> Observasi atau pengamatan difokuskan pada aktifitas kegiatan pengawas Pendidikan Agama Islam dalam melaksanakan supervisi dan guru Pendidikan Agama Islam. Pelaksanaan observasi ini dilakukan dengan cara observasi terus terang. Observasi terus terang yaitu keberadaan penulis dalam kegiatan yang dilakukan oleh pengawas dan guru dalam melaksanakan supervisi dan pembelajaran diketahui oleh informan bahwa mereka dalam memberikan informasi kapasitasnya sebagai informan dalam penelitian yang sedang dilakukan oleh penulis.

## 2. Wawancara Mendalam

Wawancara yaitu mengajukan pertanyaan lisan yang dilakukan untuk memperoleh informasi dengan cara mewawancarai langsung orang-orang yang dianggap dapat memberikan keterangan yang aktual dan akurat, dalam hal ini Kasie Pendis, Ketua Pokjawas dan Pengawas pada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, serta kepala sekolah dan guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Menurut Sugiono, ada tiga model wawancara yaitu, wawancara terstruktur, wawancara semi struktur dan wawancara tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara dengan menggunakan instrumen pertanyaan yang jawabannya bisa berupa pilihan dan wawancara tidak terstruktur adalah mengajukan pertanyaan bebas yang hanya berpedoman pada garis besar permasalahan yang akan diperoleh dari informan. Sedangkan wawancara semi struktur adalah wawancara yang menggabungkan anatar wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur.<sup>8</sup>

---

<sup>7</sup>Hadari Nawawi dan Martini Hadari, *Instrumen Penelitian Bidang Sosial* (Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006), h. 74.

<sup>8</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 318.

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan model wawancara terstruktur dan wawancara tidak terstruktur. Untuk pelaksanaan wawancara dengan informan secara luwes dan kondusif, pewawancara telah memperhatikan keadaan informan yang diwawancarai dengan terlebih dahulu menyiapkan daftar pertanyaan atau daftar garis besar permasalahan untuk menjadi pedoman wawancara.

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel berupa catatan, transkrip, buku, notulen rapat, agenda dan sebagainya.<sup>9</sup> Dokumentasi berasal dari kata dokumen, yang artinya barang-barang tertulis, dalam menggunakan dokumentasi, penulis menyelidiki benda-benda tertulis seperti peraturan-peraturan, buku profil, catatan harian dan dokumentasi lainnya.<sup>10</sup>

Dokumen yang dijelaskan sebagai sumber data dalam penulisan ini meliputi: keadaan pengawas, program supervisi akademik, keadaan guru dan semua yang terkait dengan struktur organisasi kepengawasan, dan foto-foto pelaksanaan supervisi yang dilaksanakan di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

### **E. Instrumen Penelitian**

Penelitian yang bermutu dapat dilihat dari hasil penelitian, sedangkan kualitas hasil penelitian sangat tergantung pada instrumen dan kualitas pengumpulan data. Sugiyono menyatakan, bahwa ada dua hal utama yang memengaruhi kualitas hasil penelitian yaitu kualitas instrumen penelitian dan kualitas pengumpulan data.<sup>11</sup> Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian

---

<sup>9</sup>Joko Subagyo, *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek* (Jakarta: Rineka Cipta, 1991), h. 202.

<sup>10</sup>Suharsimi Arikunto, *Manajemen Penelitian*, h. 158.

<sup>11</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*, h. 305.



kualitatif, sehingga penulis sendiri yang menjadi Instrumen penelitian atau yang biasa disebut sebagai *key instrument* artinya penulis sendiri sebagai instrumen kunci. Dengan demikian untuk memvalidasi penulis sebagai instrumen maka penulis mempersiapkan diri dengan berbagai hal yang berhubungan dengan penelitian. Validasi terhadap penulis meliputi memahami berbagai metode yang digunakan dalam penelitian kualitatif, memahami atau memiliki wawasan terhadap objek penelitian, mempersiapkan diri untuk memasuki lokasi penelitian baik secara akademik maupun secara logistik.

Untuk memantapkan kesiapan penulis dalam meneliti maka penulis selalu melakukan evaluasi diri tentang pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan teori dan wawasan terhadap bidang yang diteliti, seperti memahami berbagai teori tentang kepemimpinan dan keguruan, serta kesiapan bekal dalam memasuki lapangan penelitian, seperti kamera, pedoman wawancara, instrumen observasi dan lain-lain yang penting disertakan dalam penelitian.

#### ***F. Pengolahan dan Analisis Data***

Penelitian ini menggunakan analisis deskriptif kualitatif, yakni penyusunan data untuk kemudian dijelaskan dan dianalisis serta dilakukan bersamaan dengan pengumpulan data. Analisis deskriptif ini dimaksudkan untuk menemukan dan mendeskripsikan tentang penerapan kontribusi pengawas dalam meningkatkan kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Penelitian ini mendeskripsikan serta menginterpretasikan secara faktual dan akurat mengenai fakta-fakta yang ada.

Proses pengolahan data mengikuti teori Miles dan Huberman, sebagaimana yang dikutip oleh Sugiyono, bahwa proses pengolahan data melalui tiga tahap, yaitu reduksi data, penyajian data (*display data*) dan verifikasi data atau penarikan

kesimpulan.<sup>12</sup> Data yang dikumpulkan kemudian diolah dan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

### 1. Reduksi Data

Reduksi data, yaitu penulis merangkum atau memfokuskan serta memilih beberapa data pokok dari informan dan hasil observasi yang berkaitan dengan kompetensi pengawas dan upayanya dalam mewujudkan guru PAI yang berkompetensi. Data yang telah direduksi kemudian disajikan dalam bentuk teks yang bersifat naratif dalam laporan penelitian. Dengan demikian, gambaran hasil penelitian akan lebih jelas.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data yang dimaksud adalah penyajian data yang sudah disaring dan diorganisasikan secara keseluruhan dalam bentuk tabulasi dan kategorisasi. Dalam penyajian data dilakukan interpretasi terhadap hasil data yang ditemukan sehingga kesimpulan yang dirumuskan menjadi lebih objektif.

Setelah data direduksi, langkah selanjutnya adalah mendisplaykan data. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data biasa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono, yang paling sering digunakan dalam menyajikan data dalam penelitian kualitatif dalam bentuk teks yang bersifat *naratif*, dapat juga berupa *grafik*, *matrik*, *network*, dan *chart*.<sup>13</sup>

Penyajian data, yaitu data yang sudah diedit diorganisir secara keseluruhan. Data yang sifatnya kuantitatif seperti jumlah pengawas, jumlah guru, sarana

---

<sup>12</sup>Lihat Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 246.

<sup>13</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 249.

prasarana disajikan dalam bentuk tabel. Sedangkan data yang sifatnya kualitatif seperti sikap, perilaku, dan pernyataan disajikan dalam bentuk *deskriptif naratif*.

### 3. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi Data

Verifikasi data, yaitu penulis membuktikan kebenaran data yang dapat diukur melalui informan yang memahami masalah yang diajukan secara mendalam dengan tujuan menghindari adanya unsur *subjektifitas* yang dapat mengurangi bobot tesis.

### **G. Pengujian Keabsahan Data**

Uji keabsahan data dalam penelitian, sering ditekankan pada uji valisasi dan rehabilitasi. Dalam penelitian kualitatif, temuan atau data dinyatakan valid apabila tidak ada perbedaan antara data yang dilaporkan penulis dengan apa yang terjadi sesungguhnya pada objek yang diteliti. Namun dalam penelitian kualitatif kebenaran realitas data tidak bersifat tunggal, tetapi jamak, tergantung pada kontruksi manusia, dibentuk dalam diri seseorang sebagai proses mental setiap individu dengan berbagai latar belakangnya.<sup>14</sup>

Dalam pengujian keabsahan data penulis menggunakan teknik sebagai berikut;

#### 1. Memperpanjang pengamatan

Dalam hal ini, penulis menguji kebenaran data dengan cara memperpanjang pengamatan. Dalam memperpanjang pengamatan penulis kembali pada objek penelitian (walaupun waktu penelitian yang ditentukan sudah habis) untuk membuktikan apakah data yang diperoleh pada penelitian pertama sama atau berbeda dengan penlitian kedua (pada saat memperpanjang pengamatan). Dalam

---

<sup>14</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, h. 269.

memperpanjang pengamatan, penulis kembali melakukan observasi dan melakukan wawancara terhadap informan.

## 2. Trianggulasi

Selain memperpanjang pengamatan, penulis juga menggunakan metode triangulasi untuk menguji keabsahan data. Artinya penulis kembali melakukan pengecekan data atau triangulasi sumber yang artinya setelah penulis memperoleh data dari seorang informan maka penulis akan mengujinya dengan mencocokkan data tersebut dengan informan yang lain. Selain itu, penulis juga menggunakan teknik triangulasi teknik artinya, setelah penulis memperoleh data melalui wawancara dengan informan maka untuk menguji data yang diperoleh dengan observasi atau mencocokkannya dengan dokumen yang terkait.

## 3. Menggunakan Bahan Referensi.

Dalam metode ini penulis akan menggunakan bahan referensi seperti rekaman hasil wawancara dan dokumentasi serta dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan saat penelitian untuk menguji kembali kebenaran hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI YANG BERKOMPETENSI**

#### ***A. Kompetensi Pengawas PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang***

Kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi merupakan persyaratan yang harus dimiliki seseorang ketika akan menjabat sebagai pengawas. Berbagai kebijakan pemerintah, baik yang dikemas dalam undang-undang maupun dalam kemas peraturan pemerintah (yang membicarakan masalah kepengawasan) selalu memberikan penekanan terhadap kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi pengawas. Hal ini menunjukkan bahwa ketiga komponen tersebut merupakan penunjang utama bagi pengawas dalam menjalankan tugas supervisinya kepada para guru.

Kompetensi merupakan hal yang urgen dalam mengembangkan tugas kepengawasan. Tanpa kompetensi menyertai tugas kepengawasan maka akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil supervisi yang dilakukan pengawas, sehingga ungkapan yang menyatakan bahwa pengawas adalah gurunya guru tidak dapat terwujud karena pengawasnya sendiri yang berkompetensi.

Pengawas dalam memberikan layanan supervisi kepada guru, seyogyanya dibekali dengan berbagai kemampuan dasar. Artinya, ketika menjabat sebagai pengawas, sebelumnya harus menjadi guru minimal 8 (delapan) tahun<sup>1</sup>. Hal ini menunjukkan bahwa pengawas sebelum melaksanakan tugas kepengawasan terlebih dahulu menjadi guru minimal 8 (delapan) tahun. Hal ini dimaksudkan untuk membekali pengawas tentang pendidikan dengan segala rangkaiannya.

---

<sup>1</sup> Lihat Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 12 Tahun 2007 *tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah*. Lihat juga Peraturan Menteri Agama RI. Nomor 2 Tahun 2012 *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*.

Pengalaman menjadi guru, merupakan modal utama pengawas dalam memberikan layanan supervisi kepada para guru. Pengalaman sebagai guru menjadikan pengawas mengetahui banyak tentang berbagai persoalan yang dihadapi guru dalam mengajar. Dari pengalaman tersebut menjadikan pengawas dapat bertukar pengalaman atau dapat berbagi ilmu mengajar dengan guru latihnya. Oleh sebab itu, regulasi yang diterbitkan pemerintah sangat menekankan kepada calon pengawas harus berlatar belakang guru, sehingga dapat menutup peluang pengangkatan pengawas dari PNS non guru atau dari jabatan struktural.

Pengawas Pendidikan Agama Islam yang bertugas di Kabupaten Pinrang, termasuk Kecamatan Patampanua semuanya berasal dari pegawai Kementerian Agama Kabupaten Pinrang yang secara mendasar sudah memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Agama RI., bahwa kualifikasi pengawas di antaranya memiliki pengalaman mengajar minimal 8 (delapan) tahun, memiliki pangkat/golongan minimum penata/III/c, memiliki sertifikat yang diperoleh melalui seleksi dan sebagainya.<sup>2</sup> Adapun kualifikasi pengawas PAI pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang tergambar pada tabel berikut.

Tabel 4.1

Daftar Nama pengawas Pendidikan Agama Islam Pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang

N O	NAMA	Gol.	Lama Mengajar	Umur	Kualifikasi Akademik	Mulai Mengawas	Tahun Sertifikasi
1	Drs. H. Muh. Rizal, M.A. 19680708 199303 1 004	IV/a	20 tahun	46 thn	Magister	2011	2011
2	Drs. Samonding, M.A. 19660823 199403 1 012	IV/a	17 tahun	48 thn	Magister	2011	2011

Sumber: Data Pendis Kementerian Agama Kabupaten Pinrang 2013

<sup>2</sup>Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012, *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*.

Data tersebut menunjukkan bahwa kedua pengawas PAI yang bertugas di Kabupaten Pinrang mulai dari pangkat/golongan, lama mengajar, umur maksimal, sampai pada kualifikasi pendidikan sudah terpenuhi. Lebih lanjut lagi bahwa kedua pengawas tersebut sudah tersertifikasi khusus pada bidang kepengawasan, walaupun sebelumnya mereka telah tersertifikasi sebagai guru.

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Samonding bahwa dia sudah tersertifikasi sebanyak dua kali. Sertifikasi yang pertama saat dia sebagai guru dan yang kedua atau pada tahun 2011 dia ikut lagi sertifikasi saat mereka sebagai pengawas dan sertifikasi yang diikuti khusus kepengawasan.<sup>3</sup>

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam untuk sekolah menengah di Kabupaten Pinrang sudah memenuhi persyaratan secara kualifikasi. Sehingga dengan demikian, pengawas di Kabupaten Pinrang tidak sama dengan anggapan selama ini bahwa posisi pengawas hanya sebagai penundaan masa pensiun. Hal ini terbukti dari data pada tabel di atas menunjukkan bahwa usia dari pengawas yang bertugas pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang semuanya berusia di bawah 55 tahun bahkan belum ada yang sampai pada usia maksimal yang ditetapkan.

Pengalaman menjadi guru di atas delapan tahun bahkan sampai tujuh belas (17) tahun dan dua puluh (20) menjadikan pengawas di Kabupaten Pinrang memiliki kompetensi sebagai pendidik yang kemudian menjadi bekal utama bagi mereka dalam menjalankan supervisi kepada para guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Pengalaman menjadi pendidik/guru

---

<sup>3</sup>Samonding (48 tahun), Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah di Kabupaten Pinrang, *wawancara*, Pinrang, 15 Januari 2014.

memudahkan pengawas untuk berinteraksi dengan para guru dalam memberikan layanan supervisi.

Lebih lanjut dikemukakan oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam bahwa untuk meningkatkan kompetensi pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Pinrang maka dari pihak Kementerian selalu mengikutkan para pengawas Pendidikan Agama Islam dalam berbagai kegiatan yang berorientasi pada peningkatan kompetensi pengawas. Salah satu contoh kegiatan yang baru-baru ini adalah *Trainig Of Trainer* (TOT) yang dilaksanakan di Bandung. Dalam kegiatan tersebut Kementerian Agama Kabupaten Pinrang mengirim pengawas Pendidikan Agama Islam untuk mengikutinya. Dengan kegiatan itu, pengawas Pendidikan Agama Islam dapat memperoleh berbagai informasi dan pangalaman baru yang berorientasi dengan tugas kepengawasannya termasuk kompetensi pengawas itu sendiri. Selain itu, baru-baru ini juga mereka telah mengikuti pelatihan penerapan kurikulum 2013 di Makassar.<sup>4</sup>

Penuturan kepala seksi pendidikan Islam tersebut menunjukkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang selalu mengembangkan kompetensinya. Dalam meningkatkan kompetensinya, selain mereka aktif memperbaharui pengetahuannya dengan perkembangan dunia pendidikan, juga dilakukan dengan berbagai kegiatan, seperti kegiatan yang dilakukan oleh Kementerian Agama kabupaten, wilayah, maupun kegiatan yang dilaksanakan oleh Kementerian Agama pusat.

Kompetensi pengawas, terutama yang berorientasi pada kompetensi akademik juga dapat dilihat dari aktivitas pengawas dalam memberikan layanan

---

<sup>4</sup>H. Muhammad Ihwan (46 tahun), Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 30 Desember 2013.



supervisi kepada para guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang.

Dalam hal ini, Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patampanua mengemukakan bahwa, pengawas Pendidikan Agama Islam bila datang berkunjung ke sekolah untuk mensupervisi guru Pendidikan Agama Islam dilakukan secara terstruktur. Artinya, ketika pengawas datang, diawali dengan berkoordinasi dengan kepala sekolah dan membicarakan kondisi proses pembelajaran Pendidikan Agama Islam. Kemudian selanjutnya melakukan layanan supervisi kepada guru dengan memeriksa kelengkapan perangkat pembelajaran kemudian pengawas memberikan bimbingan kepada guru Pendidikan Agama Islam yang berkaitan dengan penyusunan perangkat pembelajaran.<sup>5</sup>

Penuturan Kepala SMPN 2 Patampanua tersebut, memberikan gambaran bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang memiliki kompetensi akademik, terutama dalam memberikan bimbingan kepada para guru dalam menyusun perangkat pembelajaran, seperti, penentuan alokasi waktu efektif, penyusunan program semester, RPP, silabus, KKM, dan hal-hal yang berkaitan dengan dokumen perangkat pembelajaran. adapun bentuk layanan supervisi akademik yang dilakukan pengawas di Kecamatan Patampanua sebagaimana pada tabel berikut.

---

<sup>5</sup> H. Amiruddin (55 tahun), Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Patampanua *Wawancara*, Pinrang, 11 Januari 2014.

Tabel 4.2  
 Observasi Realisasi Kompetensi Akademik Pengawas PAI  
 pada Sekolah Menengah di Kecamatan Patampanua

Nama/Nip	Bentuk bimbingan pada guru PAI/pembuatan										
	Kalender Pendidikan	Alokasi Waktu efektif	Program Tahunan	Program Semester	Silabus	RPP	KKM	PTK	Pembuatan soal	Proses Pembelajaran	LKS
Drs. Samonding, M.A. 19660823 199403 1 012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengawas PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang melakukan bimbingan kepada para guru PAI seperti pembuatan kalender pendidikan, alokasi waktu efektif, program semester, program tahunan, silabus, RPP, dan KKM yang sekaligus sebagai realisasi dari kompetensi akademiknya, yakni mampu memberikan bimbingan kepada guru dalam membuat dokumen perangkat pembelajaran. Data tersebut sekaligus menunjukkan kompetensi akademik yang dimiliki pengawas PAI karena kemampuannya memberikan bimbingan kepada para guru PAI terhadap pembuatan perangkat pembelajaran.

Pada dasarnya pengawas PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang memberikan bimbingan kepada guru PAI terhadap pembuatan/penyusunan perangkat pembelajaran. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Suryani bahwa pengawas PAI ketika datang memberikan bimbingan dalam hal pembuatan perangkat pembelajaran, akan tetapi mereka tidak sampai masuk dalam kelas melihat proses pembelajaran.<sup>6</sup> Kemudian dari penuturan Suryani tersebut diperkuat

---

<sup>6</sup>Suryani (36 tahun), Guru PAI pada SMK Negeri 4 Pinrang, *Wawancara*, Maccobbu, 15 Januari 2014.

dengan keterangan Muslimin bahwa bentuk bimbingan yang diberikan pengawas PAI kepada guru pendidikan Agama Islam baru seputar pembuatan perangkat Pembelajaran. Pengawas belum memberikan bimbingan kepada guru terhadap proses pembelajaran, karena pengawas belum masuk dalam kelas mengamati bagaimana cara guru mengajar.<sup>7</sup>

Kemudian hal senada juga dikemukakan oleh Randi Sabang guru Pendidikan Agama Islam SMPN 4 Patampanua yang mengemukakan bahwa, ketika Pengawas Pendidikan Agama Islam mensupervisinya maka pengawas biasanya memeriksa perangkat pembelajarannya, kemudian memberikan arahan atau petunjuk tentang perangkat pembelajaran. Pengawas memberikan petunjuk tentang bagaimana membuat perangkat pembelajaran yang baik yang sesuai dengan KTSP.<sup>8</sup>

Namun demikian, dari data tersebut pula tergambar bahwa bimbingan pengawas terhadap para guru PAI, baru sebatas tahap persiapan pembelajaran guru, yakni berupa dokumen perangkat pembelajaran. Akan tetapi, pengawas belum melakukan pembimbingan pada proses pembelajaran serta berbagai kegiatan yang penting dilakukan oleh guru seperti pembuatan soal, Penelitian Tindakan Kelas (PTK) dan Lembar Kerja Siswa (LKS). Sementara menurut penulis, pencapaian tujuan pendidikan tidak hanya sebatas melakukan persiapan seperti pembuatan perangkat pembelajaran. Karena sebagus atau selengkap apapun sebuah perangkat pembelajaran kalau tidak direalisasikan dalam proses pembelajaran maka perangkat pembelajaran tersebut tidak memiliki arti apa-apa. Bisa saja dalam perangkat pembelajaran mencantumkan berbagai metode yang akan digunakan, tapi saat

---

<sup>7</sup> Muslimin (58 tahun), Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patampanua, *Wawancara*, Leppang, 17 Januari 2014.

<sup>8</sup> Randi Sabang (54 tahun), Guru PAI SMPN 4 Patampanua, *Wawancara*, Malimpung, 18 Januari 2014.

proses pembelajaran berlangsung tidak menggunakan metode yang tercantum dalam perangkat pembelajaran. Atau bisa saja dalam perangkat pembelajaran mencantumkan berbagai media pembelajaran yang akan digunakan, tetapi saat proses pembelajaran tidak menggunakan media sebagai mana dalam perangkat pembelajaran.

Keterangan di atas menunjukkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua dalam melakukan supervisi kepada para guru Pendidikan Agama Islam memberikan arahan atau petunjuk dalam pembuatan atau penyusunan dokumen perangkat pembelajaran sebagai pedoman para guru dalam melakukan pembelajaran dalam kelas. Akan tetapi, pengawas belum sampai pada memberikan bimbingan terhadap proses pembelajaran yang dilakukan guru dalam kelas. Hal ini karena pengawas belum masuk dalam kelas mengamati cara guru saat mengajar, apakah sesuai dengan perangkat pembelajaran yang telah dibuatnya atau tidak, kemudian dilakukan evaluasi bersama terhadap apa-apa yang perlu diperbaiki atau ditingkatkan dari pengamatan pengawas terhadap guru saat proses pembelajaran berlangsung.

Namun demikian, hal tersebut dapat dimaklumi karena keterbatasan jumlah pengawas yang hanya dua orang tidak sebanding dengan jumlah guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah, baik pada tingkat SMP maupun pada tingkat SMA/SMK sangat banyak, ditambah lagi dengan kondisi geografis Kabupaten Pinrang yang cukup luas, membuat para pengawas Pendidikan Agama Islam tidak memiliki hasil kerja yang maksimal.

Pada dasarnya pengawas Pendidikan Agama Islam untuk sekolah menengah di Kabupaten Pinrang terdiri dari dua orang yaitu Drs. H. Muh. Rizal, M.A. dan Drs. Samonding, M.A. Namun secara yuridis formal yang bertugas untuk mensupervisi para guru PAI di Kecamatan Patampanua hanya satu orang saja yaitu Drs.

Samonding, M.A. Dalam melaksanakan kunjungan sekolah, mereka telah memiliki wilayah tugas masing-masing, namun demikian, kedua pengawas tersebut saling bekerja sama dalam memberikan pembinaan terhadap semua guru PAI pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang, terutama kalau dalam pertemuan kelompok (semua guru PAI berkumpul) maka kedua pengawas tersebut memberikan bimbingan semua peserta tanpa melihat wilayah tugas masing-masing. Oleh karena Kabupaten Pinrang terdiri atas 12 kecamatan maka Kementerian Agama Pinrang dalam hal pembagian tugas pengawas PAI pada sekolah menengah dibagi dalam dua wilayah. Wilayah I terdiri dari Kecamatan Mattiro Bulu, Mattiro Sompe, Sawitto, Lanrisang, Tiroang, dan Suppa. Wilayah II terdiri dari Kecamatan Lembang, Duampanua, Patampanua, Batu Lappa, Cempa dan Paleteang.

Berikut gambaran pembagian tugas kedua pengawas pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang:

Tabel 4.3

Wilayah kerja pengawas PAI pada sekolah menengah

Kabupaten Pinrang

No	Nama Pengawas	Tempat Tugas	Kecamatan
1	Drs. H. Muh. Rizal, M.A. 19680708 199303 1 004	Wilayah I	Mattiro Bulu
			Mattiro Sompe
			Sawitto
			Lanrisang
			Tiroang
			Suppa
2	Drs. Samonding, M.A. 19660823 199403 1 012	Wilayah II	Batulappa
			Cempa
			Duampanua
			Lembang
			Paleteang
			Patampanua

Sumber: Data Pendis Kementerian Agama Kabupaten Pinrang 2013

Karena penelitian ini difokuskan pada Kecamatan Patampanua yang masuk dalam wilayah II maka berikut akan digambarkan kondisi objektif/keadaan sekolah dan guru PAI wilayah II

Tabel 4.4

Wilayah kerja/jumlah supervisee pengawas PAI pada sekolah menengah di  
Kabupaten Pinrang wilayah II

No	Wilayah II/Kecamatan	JUMLAH SEKOLAH dan GURU				Jumlah guru
		SMP	GURU	SMA/SMK	GURU	
1	Batu Lappa	2	2 orang	1	1 orang	3 orang
2	Cempa	3	5 orang	1	2 orang	7 orang
3	Duampanua	6	12 orang	3	6 orang	18 orang
4	Lembang	5	12 orang	1	3 orang	15 orang
5	Paleteang	3	9 orang	1	2 orang	11 orang
6	Patampanua	3	8 orang	2	6 orang	14 orang
Total		22	48 orang	9	20 orang	68 orang

Sumber: Data Pengawas PAI pada sekolah menengah Kabupaten Pinrang 2013

Berikut daftar nama guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Pinrang yang sekaligus menjadi guru latih pengawas Pendidikan Agama Islam di wilayah II.

Tabel 4.5

Daftar nama guru PAI Sekolah Menengah Pertama wilayah II

Kabupaten Pinrang

NO	NAMA/NIP	SEKOLAH	KET. SERTIFIKASI
1	Alwi, S.Ag. 19701010 200801 1 024	SMPN 2 Batulappa	Sudah
2	Rabaiya 19730511 200701 2 015	SMPN 3 Batulappa	Sudah

NO	NAMA/NIP	SEKOLAH	KET. SERTIFIKASI
3	Abdul Waris, S.Pd.I 7315083008820001	SMPN 1 Cempa	Belum
4	Dra. Patimang 19631271 199403 2 002	SMPN 2 Cempa	Sudah
5	Ridwan, S.Pd.I 7315042007770002	SMPN 1 Cempa	Belum
6	Rusni, S.Ag.	SMPN 1 Cempa	Belum
7	Suharni, S.Ag. 19690227 200801 2 005	SMPN 3 Cempa	Belum
8	Agussalim, S.Ag. 19710801 200701 1 018	SMPN 6 Duampanua	Sudah
9	Dra. Manniga 19531121 198703 2 014	SMPN 1 Duampanua	Sudah
10	Dra. Ramlah 19690718 199412 2 002	SMPN 5 Duampanua	Sudah
11	Drs. Muhammad Nur 19690911 200701 1 207	SMPN 5 Duampanua	Sudah
12	Firman, S.Pd.I. 19730301 200701 1 017	SMPN 3 Duampanua	Belum
13	Hamsina, S.Ag. 19690306 199802 2 003	SMPN 1 Duampanua	Sudah
14	Jumrawati, S.Ag. 7315064201730003	SMPN 4 Duampanua	Belum
15	Muhsin, S.Ag. 19701226 200701 1 014	SMPN 3 Duampanua	Sudah
16	Nurhayati, S.Pd.I. 19591231 198603 2 069	SMPN 2 Duampanua	Sudah
17	Qamar Firmayanti, S.Pd.I 7315065911890001	SMPN 2 Duampanua	Belum
18	Sitti Rahma, S.Pd.I. 19700502 200701 2 021	SMPN 6 Duampanua	Sudah
19	St. Mu'min T, S.Pd.I. 19580227 198303 2 004	SMPN 1 Duampanua	Sudah
20	Abustan, S.Pd.I. 7315071005750001	SMPN 3 Lembang	Sudah
21	Drs. Abdul Kadir L 19601231 199203 1 070	SMPN 2 Lembang	Sudah
22	Haris, S.Pd.I.	SMPS Miftahurrazaq/Lembang	Belum
23	Irwan, S.Pd.I 19800705 200701 1 013	SMPN 3 Lembang	Belum
24	Jumania, S.Ag. 19700909 200701 2 021	SMPN 1 Lembang	Sudah
25	Lukman, S.Pd.I. 19770201 200604 1 013	SMPN 2 Lembang	Belum
26	Mansyur M, S.Pd.I.	SMP Satu Atap Lembang	Belum



NO	NAMA/NIP	SEKOLAH	KET. SERTIFIKASI
27	Misbah Rauf, S.Ag. 19710724 200701 2 013	SMPN 3 Lembang	Belum
28	Nurhidayah Mantong, S.Pd.I 19750508 200804 2 002	SMPN 1 Lembang	Sudah
29	Rusmia, S.Ag. 7315075205720001	SMPN 1 Lembang	Sudah
30	Sabariah, S.Ag. 19700215 200701 2 030	SMPN 1 Lembang	Sudah
31	Zubair, S.Pd.I. 19791215 200804 1 002	SMPN 2 Lembang	Belum
32	Aisyayu Basra, S.Pd.I. 7315040306770004	SMPN 2 Pinrang/Paleteang	Belum
33	Aljinnah, S.Ag. 19710622 199702 2 002	SMPN 2 Pinrang/Paleteang	Sudah
34	Burhanuddin, S.Pd.I 7315040306770004	SMP AL Mazzakhirah Barang/Paleteang	Sudah
35	Dra. Hadrah 19561231 199003 2 006	SMPN 2 Pinrang/Paleteang	Sudah
36	Haba, S.Ag. 7315042205700001	SMP Al Mazzakhirah Barang/Paleteang	Sudah
37	Hasanuddin, S.Ag. 19720801 199802 1 001	SMPN 2 Pinrang/Paleteang	Sudah
38	Masda, S.Ag. 7315116606710001	SMPN 2 Pinrang/Paleteang	Sudah
39	Satriana, S.Pd.I. 19800401 200801 2 025	SMPN 7 Pinrang/Paleteang	Belum
40	Suherman, SH. 19771231 200903 1 004	SMPN 2 Pinrang/Paleteang	Belum
41	Abbas Sauda, BA., S.Pd. 19581231 198603 1 157	SMPN 2 Patampanua	Sudah
42	Dra. Halpiah 19581231 199001 2 003	SMPN 2 Patampanua	Sudah
43	Dra. St. Hawa 19581231 198703 2 024	SMPN 2 Patampanua	Sudah
44	Drs. Randi Sabang 19601231 198703 1 153	SMPN 4 Patampanua	Sudah
45	Iryani, S.Ag. 19710729 200801 2 010	SMPN 4 Patampanua	Sudah
46	Marwah, S.Pd.I. 19551231 199003 2 002	SMPN 2 Patampanua	Sudah
47	Rahnawati, S.Ag. 1970010 199802 2 010	SMPN 1 Patampanua	Sudah
48	Tajuddin, S.Ag. 19740810 200701 1 024	SMPN 1 Atap Bonne, Patampanua,	Belum

Sumber: Data Pendidik Kemenag Kabupaten Pinrang 2013



Tabel 4.6

## Daftar nama guru Sekolah Menengah Atas wilayah II

## Kabupaten Pinrang

NO	NAMA/NIP	SEKOLAH	KET. SERTIFIKASI
1	Dra. Marwah 19601231 198903 2 023	SMAN 1 Duampanua	Sudah
2	Drs. Mahmud, MA. 19571231 198803 1 059	SMAN 1 Duampanua	Sudah
3	Drs. Sulaiman Parajai 19650509 198803 1 003	SMAN 1 Duampanua	Sudah
4	Mukmin, S.Ag. 7315061907690001	SMAN 1 Duampanua	Sudah
5	Rasni, S.Ag 19750307 200604 2 012	SMAN 1 Duampanua	Belum
6	Abdul Razak, S.Ag. 7315040503690001	SMAN 1 Lembang	Sudah
7	Adriwati, S.Ag. 19750124 200312 2 007	SMAN 1 Lembang	Sudah
8	Agusnaini, S.Ag. 19691231 200604 2 055	SMAN 1 Lembang	Sudah
9	Fahri Nohong, S.Ag. 19750509 201011 1 011	SMAN I Cempa	Belum
10	Sunarti, S.H.I 7315084905780001	SMAN 1 Cempa	Belum
11	Darma, S.Pd.I 19791002 201001 2 003	SMAN 1 Patampanua	Belum
12	Hanisa Senreng, S.Pd.I. 19591231 198903 2 017	SMAN 1 Patampanua	Sudah
13	Syamsinar, S.Pd.I. 7315044612790001	SMAN 1 Patampanua	Belum
14	Abd. Muis, S.Pd.I.	SMAN 1 Patampanua	Sudah

Sumber: Data Pendis Kementerian Agama Kabupaten Pinrang 2013

Tabel 4.7

## Daftar nama guru Sekolah Menengah Kejuruan wilayah II

## Kabupaten Pinrang

NO	NAMA/NIP	SEKOLAH	KET. SERTIFIKASI
1	Drs. Makmur 7315041011660007	SMK DDI Kaballangan	Sudah
2	Drs. Syamsuddin Syah 19570517 198310 1 000	SMK DDI Kaballangan	Sudah
3	Muh. Adzan L, S.Ag. 19730318 200701 1 016	SMKN 6 Pinrang/Batulappa	Sudah
4	Rusdi, S.Ag. 19770205 201001 1 000	SMKN Baramuli/Paleteang	Belum
5	Suparman, S.Ag. 19771108 200701 1 009	SMK Baramuli/Paleteang	Belum
6	Suryani S., S.Ag. 19780221 200312 2 004	SMKN 4 Pinrang/Patampanua	Belum
7	Suriati, S.Ag. 19770601 201001 2 014	SMKN 4 Pinrang/Patampanua	Belum

Sumber: Data Pendis Kementerian Agama Kabupaten Pinrang 2013

Data tersebut menunjukkan bahwa beban kerja, atau jumlah guru latih pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah terlalu banyak, sehingga menjadi salah satu faktor kurang maksimalnya kerja pengawas dalam memberikan layanan supervisi kepada para guru Pendidikan Agama Islam.

Untuk meminimalisir persoalan tersebut, Kementerian Agama Kabupaten Pinrang melakukan upaya untuk penambahan jumlah pengawas. Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh Kepala Seksi Pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Pinrang bahwa, upaya Kementerian Agama Kabupaten Pinrang untuk penambahan pengawas Pendidikan Agama Islam maka baru-baru ini kementerian agama mengutus guru Pendidikan Agama Islam sebanyak 25 orang untuk mengikuti tes/seleksi calon pengawas yang dilaksanakan di Kota Makassar, dan 25 orang yang ikut seleksi semuanya lulus dan mendapatkan sertifikat pengawas. Dengan demikian diharapkan setelah mereka memperoleh sertifikat,

mereka dapat diangkat menjadi pengawas untuk menutupi kekurangan pengawas yang ada sekarang ini.<sup>9</sup>

Penuturan Kepala Seksi Pendidikan Islam menunjukkan bahwa pada dasarnya mereka menyadari bahwa tidak sebandingnya antara jumlah pengawas dan guru merupakan salah satu faktor tidak maksimalnya kerja pengawas.

**B. Kondisi Objektif Guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang**

Guru Pendidikan Agama Islam yang bertugas di sekolah menengah umum Kecamatan Patampanua memiliki kualifikasi Sarjana pada jurusan pendidikan, selain itu, rata-rata dari guru Pendidikan Agama Islam tersebut sudah tersertifikasi, kecuali hanya beberapa guru saja yang belum mengikuti sertifikasi. Berikut data guru Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah di Kecamatan Patampanua.

Tabel 4.8

Daftar nama guru PAI pada sekolah menengah  
di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

NO	NAMA/NIP	SEKOLAH	Kualifikasi Pendidikan	KET. SERTIFIKASI
1	Dra. St. Hawa 19581231 198703 2 024	SMPN 1 Patampanua	Sarjana	Sudah
2	Rahmawati, S.Ag. 1970010 199802 2 010	SMPN 1 Patampanua	Sarjana	Sudah
3	Abbas Sauda, BA., S.Pd. 19581231 198603 1 157	SMPN 2 Patampanua	Sarjana	Sudah
4	Dra. Halpiah 19581231 199001 2 003	SMPN 2 Patampanua	Sarjana	Sudah
5	Marwah, S.Pd.I. 19551231 199003 2 002	SMPN 2 Patampanua	Sarjana	Sudah
6	Drs. Randi Sabang 19601231 198703 1 153	SMPN 4 Patampanua	Sarjana	Sudah

<sup>9</sup>H. Muhammad Ihwan (46 tahun), Kepala Seksi Pendidikan Islam Kantor Kemeterian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara*. Pinrang, 30 Desember 2013.

NO	NAMA/NIP	SEKOLAH	Kualifikasi Pendidikan	KET. SERTIFIKASI
7	Iryani, S.Ag. 19710729 200801 2 010	SMPN 4 Patampanua	Sarjana	Sudah
8	Tajuddin, S.Ag. 19740810 200701 1 024	SMPN Satu Atap Bonne, Patampanua,	Sarjana	Belum
9	Suryani S., S.Ag. 19780221 200312 2 004	SMKN 4 Pinrang	Sarjana	Belum
10	Suriati, S.Ag. 19770601 201001 2 014	SMKN 4 Pinrang	Sarjana	Belum
11	Darna, S.Pd.I 19721002 201001 2 003	SMAN 1 Patampanua	Sarjana	Belum
12	Hanisa Senreng, S.Pd.I. 19591231 198903 2 017	SMAN 1 Patampanua	Sarjana	Sudah
13	Abdul Muis	SMAN 1 Patampanua	Sarjana	Sudah
14	Syamsinar, S.Pd.I. 7315044612790001	SMAN 1 Patampanua	Sarjana	Belum

Sumber: Data Pendis Kementerian Agama Kabupaten Pinrang 2013

Data tersebut menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua semuanya Sarjana Pendidikan Agama Islam. Dengan demikian para guru Pendidikan Agama Islam tersebut secara kualifikasi sudah terpenuhi sebagai guru.

Data tersebut diperkuat dengan keterangan Samonding bahwa, guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Pinrang adalah guru yang memiliki kualifikasi pendidikan Sarjana pada Pendidikan Agama Islam, sehingga secara kualifikasi mereka berhak dan layak menjadi guru. Lebih khusus di Kecamatan Patampanua, semua guru Pendidikan Agama Islamnya berasal dari guru yang berkualifikasi sarjana Pendidikan Agama Islam. Tidak satupun sekolah di sana yang mengajarkan bidang studi Pendidikan Agama Islam dari guru yang tidak berlatar belakang Sarjana Pendidikan Agama Islam.<sup>10</sup>

<sup>10</sup>Samonding (48 tahun), Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah di kabupaten Pinrang, *wawancara*, Pinrang, 15 Januari 2014.

Data guru Pendidikan Agama Islam pada tabel tersebut dan penuturan Samonding menunjukkan bahwa guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua sudah memiliki kualifikasi sesuai yang dipersyaratkan undang-undang. Data tersebut pula dapat dilihat bahwa dari 14 guru Pendidikan Agama Islam yang bertugas di Kecamatan Patampanua hanya dua orang yang belum berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Adapun mengenai kompetensi, menurut Samonding, Pengawas Pendidikan Agama Islam yang bertugas di Kecamatan Patampanua mengemukakan bahwa, Secara umum, guru pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua sudah memiliki kompetensi dasar sebagai guru, walaupun untuk memenuhi semua indikator yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah tidak terpenuhi secara keseluruhan, namun sebagian besar sudah terpenuhi, walaupun masih perlu peningkatan-peningkatan. Dengan demikian mereka akan selalu di arahkan untuk bagaimana melengkapi kekurangan yang ada.<sup>11</sup>

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa para guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua secara umum sudah memiliki kompetensi dasar sebagai pendidik. Namun dari kompetensi yang dimiliki sekarang masih perlu peningkatan-peningkatan untuk menuju kesempurnaan terutama kekompetensi pedagogik.

Hasil observasi penulis menunjukkan bahwa para guru PAI di Kecamatan Patampanua semuanya memiliki dokumen perangkat pembelajaran, sebagaimana pada tabel berikut;

---

<sup>11</sup> Samonding (48 tahun), Pengawas PAI Pada Sekolah Menengah Kabupaten Pinrang, Wawancara, tanggal 15 Januari 2014.

Tabel 4.9  
Observasi Perangkat Pembelajaran Guru PAI  
Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang

NO	Nama/Nip	Tempat Tugas	Pearangkat pembelajaran guru PAI						
			Kalender Pendidikan	Alokasi Waktu . efektif	Program Tahunan	Program Semester	Silabus	RPP	KKM
1	Dra. St. Hawa 19581231 198703 2 024	SMPN 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	Rahmawati, S.Ag. 1970010 199802 2 010	SMPN 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	Abbas Sauda, BA., S.Pd. 19581231 198603 1 157	SMPN 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	Dra. Halpiah 19581231 199001 2 003	SMPN 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
5	Marwah, S.Pd.I. 19551231 199003 2 002	SMPN 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	Drs. Randi Sabang 19601231 198703 1 153	SMPN 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	Iryani, S.Ag. 19710729 200801 2 010	SMPN 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	Tajuddin, S.Ag. 19740810 200701 1 024	SMP 1 atap	-	✓	✓	✓	✓	✓	-
9	Suryani S., S.Ag. 19780221 200312 2 004	SMKN 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	Suriati, S.Ag. 19770601 201001 2 014	SMKN 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	Darna, S.Pd.I 19721002 201001 2 003	SMAN 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-
12	Hanisa Senreng, S.Pd.I. 19591231 198903 2 017	SMAN 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	Syamsinar, S.Pd.I. 7315044612790001	SMAN 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	Abul Muis, S.Pd.I	SMAN 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Data tersebut sekaligus menunjukkan bahwa upaya pengawas dalam melakukan bimbingan terhadap para guru PAI dalam pembuatan perangkat

pembelajaran dinilai berhasil. Hal tersebut dapat dilihat hampir semua guru PAI di Kecamatan Patampanua sudah melengkapi berbagai komponen dalam perangkat pembelajarannya seperti kalender pendidikan, prota, perosem, silabus, RPP dan KKM.

Selain kompetensi pedagogik, kompetensi yang lain juga pada dasarnya sudah dimiliki oleh para guru PAI, walaupun tidak semua indikator-indikator yang terdapat pada setiap kompetensi terpenuhi secara utuh. Namun berdasarkan pengamatan penulis mereka sudah layak menjadi guru walaupun masih perlu ditingkatkan kompetensinya agar semua indikator-indikator pada setiap kompetensi dapat terpenuhi, seperti pada kompetensi kepribadian rata-rata guru PAI di Kecamatan Patampanua mampu memosisikan dirinya sebagai teladan yang baik bagi para peserta didiknya, hal ini terlihat ketika masuk waktu shalat zuhur maka guru PAI memberikan teladan kepada para peserta didiknya untuk shalat berjamaah di mushallah sekolah.

Kemudian pada kompetensi sosial, menurut pengamatan penulis juga sudah memadai, hal ini terlihat ketika penulis melakukan wawancara dengan para guru PAI mereka semuanya komunikatif dan inklusif dalam menerima penulis di sekolahnya. Bahkan tidak hanya kepada penulis terjalin komunikatif yang baik, tapi kepada para peserta didik dan teman sejawatnya juga penulis nilai sudah baik. Kemudian pada kompetensi profesional, sama dengan kompetensi yang lain, bahwa para guru PAI di Kecamatan Patampanua menunjukkan kompetensinya dengan baik, hal ini terlihat bagai mana penguasaan mereka terhadap standar kompetensi dan kompetensi dasar, atau materi-materi yang berhubungan dengan materi yang di ampu. Namun, sekali lagi bahwa itu tidak menunjukka kesempurnaan kompetensi

yang dimiliki para guru PAI, karena masih ada indikator-indikator dari tiap-tiap kompetensi yang tidak terpenuhi secara utuh.

Hal ini sebagaimana dikemukakan oleh kepala SMPN 1 Patampanua bahwa, guru Pendidikan Agama Islam di SMPN 1 Patampanua sudah memiliki kompetensi sebagai Pendidik. Namun tidak berarti bahwa sudah maksimal, melainkan masih perlu peningkatan-peningkatan, atau minimal mereka mempertahankan kompetensi yang dimilikinya sekarang.<sup>12</sup>

dari penjelasan tersebut memberikan gambaran bahwa untuk guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua memiliki kompetensi sebagai pendidik, walaupun tidak memenuhi semua indikator-indikator yang disyaratkan dalam peraturan pemerintah. Namun, itu tidak berarti bahwa sudah tidak membutuhkan pengawas lagi untuk dibimbing. Walaupun secara umum mereka layak menjadi guru dengan kualifikasi dan kompetensi yang dimilikinya, mereka masih membutuhkan pengawas untuk membantu mereka meningkatkan kompetensinya, terutama membantu mereka dalam memahami berbagai informasi dan perkembangan baru dalam dunia pendidikan. Hal ini dikarenakan guru PAI dituntut untuk memiliki kompetensi pada perencanaan, proses dan evaluasi dalam pembelajaran.

Dalam menjalankan tugas sebagai pendidik terutama guru Pendidikan Agama Islam, tidak cukup hanya dengan kualifikasi, kompetensi dan sertifikasi, melainkan selain dari ketiga syarat tersebut mereka harus didukung dengan sarana dan prasarana yang dapat menunjang dan sekaligus membantu mereka dalam

---

<sup>12</sup> Muslimin (58 tahun), Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri 1 Patampanua, *Wawancara*, Leppang, 17 Januari 2014.



mengaplikasikan atau mempraktekkan berbagai tata cara dari berbagai ibadah yang dimuat dalam standar isi.

Kompetensi guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua didukung dengan berbagai faktor, seperti beban mengajar yang dibebankan kepada mereka tidak melebihi jam minimal, serta didukung pula dengan sarana dan prasarana seperti buku-buku, al-Qur'an dan Mushollah untuk menjadi tempat menyelenggarakan berbagai kegiatan keagamaan.

Untuk mengetahui beban kerja guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua maka berikut akan digambarkan dalam tabel sebagai berikut:

Tabel 4.10

Beban kerja Pendidikan Agama Islam SMPN 2 Patampanua

N0	Nama Guru	Kelas yang diajar	Jumlah Rombel
1	Abbas Sauda, BA., S.Pd. 19581231 198603 1 157	IX	Tujuh rombel dengan 14 jam pelajaran
2	Dra. Halpiah 19581231 199001 2 003	VIII	Enam rombel dengan 12 jam pelajaran
3	Dra. St. Hawa 19581231 198703 2 024	VII	Enam rombel dengan 12 jam pelajaran

Sumber: Data pembagian tugas SMPN 2 Patampanua 2013

Tabel 4.11

Beban kerja Pendidikan Agama Islam SMAN 1 Patampanua

N0	Nama Guru	Kelas yang diajar	Jumlah Jam Pelajaran
1	Hanisa Senreng, S.Pd.I. 19591231 198903 2 017	X	Enam rombel dengan 12 jam pelajaran
2	Darna, S.Pd.I 19721002 201001 2 003	XI	Enam rombel dengan 12 jam pelajaran
3	Syamsinar, S.Pd.I. 7315044612790001	XII	Enam rombel dengan 12 jam pelajaran

Sumber : Data pembagian tugas SMAN 1 Patampanua 2013

Tabel 4.12

## Beban kerja Pendidikan Agama Islam SMPN 1 Patampanua

N0	Nama Guru	Kelas yang diajar	Jumlah Jam Pelajaran
1	Rahmawati, S.Ag. 1970010 199802 2 010	VII dan VII	sembilan rombel dengan 18 jam pelajaran
2	Dra. St. Hawa 19581231 198703 2 024	VII dan VIII	Sembilan rombel dengan 18 jam pelajaran

Sumber : Data pembagian tugas SMPN 1 Patampanua 2013

Dari ketiga data tersebut menunjukkan bahwa semua beban mengajar yang diimbang oleh para guru Pendidikan Agama Islam tidak ada yang melebihi batas minimal. Dengan demikian, hal tersebut dapat menjadi salah satu faktor pendukung keberhasilan guru dalam menjalankan tugasnya. Beban mengajar yang berlebihan, akan membuat guru kewalahan dan akan berdampak pada kurang maksimalnya hasil yang diperoleh.

Adapun tuntutan sertifikasi yang mewajibkan guru yang tersertifikasi dengan minimal 24 jam pelajaran, maka guru Pendidikan Agama Islam yang tidak terpenuhi diberikan tugas yang tambahan yang sesuai dengan peraturan untuk memenuhi jam minimal yang diwajibkan.

### ***C. Upaya Pengawas PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam Mewujudkan Kompetensi Guru PAI***

#### **1. Penyusunan Program Kerja**

Pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang dalam melaksanakan tugas kepengawasannya berdasarkan pada program kerja yang telah disusun sebelumnya. Program kerja pengawas Pendidikan Agama Islam disusun dengan mengacu kepada panduan program kerja dari pusat kemudian dikembangkan berdasarkan kebutuhan guru Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Pinrang secara keseluruhan.

Hal ini sebagaimana yang dikemukakan oleh Amriyani bahwa, program kerja pengawas di Kementerian Agama Kabupaten Pinrang baik itu pengawas madrasah maupun pengawas Pendidikan Agama Islam disusun dengan mengacu pada panduan program kerja dari Kementerian Agama RI., kemudian dikembangkan berdasarkan kebutuhan para guru Pendidikan Agama Islam.<sup>13</sup>

Keterangan tersebut memberikan gambaran bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang melaksanakan tugas supervisinya berdasarkan pada program kerja yang telah disusun. Dengan demikian, para pengawas memiliki persiapan yang matang karena memiliki jadwal yang jelas, baik itu waktu maupun bentuk supervisi yang diberikan kepada para guru.

Lebih lanjut Samonding mengemukakan bahwa program kerja yang disusun untuk 1 (satu) tahun kedepan berdasarkan pada kebutuhan guru yang disimpulkan berdasarkan hasil supervisi yang telah dilaksanakan 1 (satu) tahun sebelumnya. Jadi, program kerja tersebut disusun berdasarkan hasil atau data-data yang dikumpulkan selama melakukan supervisi kepada para guru Pendidikan Agama Islam.<sup>14</sup>

Keterangan tersebut menunjukkan bahwa program kerja disusun berdasarkan hasil observasi setiap melakukan supervisi terhadap para guru. Pengawas ketika melakukan supervisi akan selalu mengamati dan memperhatikan secara seksama dari kondisi objektif guru yang disupervisi. Dari setiap kondisi yang ada dicatat kemudian dikumpulkan untuk menjadi referensi dalam menyusun program kerja. Adapun program kerja pengawas PAI pada sekolah menengah di Kabupaten Pinrang sebagai berikut:

---

<sup>13</sup>Amriyani (51 tahun), Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 31 Desember 2013.

<sup>14</sup>Samonding (48 tahun), Pengawas PAI Pada Sekolah Menengah Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 15 Januari 2014.

Tabel 4.13  
Program kerja pengawas PAI pada sekolah menengah  
di Kabupaten Pinrang

NO	KEGIATAN
A	PERENCANAAN
	1 Menyusun program kepengawasan
	2 Menyusun metode kerja dan Instrumen
	3 Menyusun jadwal pelaksanaan program supervisi
	4 Melaksanakan program kepengawasan
B	PELAKSANAAN PEMANTAUAN/PEMBINAAN BID. AKADEMIK
	1 Standar Isi
	2 Standar Proses
	3 Standar Penilaian
	4 Standar Kompetensi Lulusan
C	PELAPORAN/EVALUASI
	1 Menyusun laporan hasil kepengawasan Tahunan
	2 Evaluasi

Sumber Data: Pengawas PAI Kabupaten Pinrang Tahun 2013

Program kerja tersebut menggambarkan tentang tahap kegiatan pengawas mulai dari tahap perencanaan yaitu menyusun rencana program supervisi dan menyusun instrumen supervisi yang akan digunakan saat kunjungan ke sekolah, selanjutnya tahap pelaksanaan tugas yaitu pemantauan dan pembinaan berdasarkan standar nasional pendidikan, kemudian tahap evaluasi dan tahap pelaporan sebagai akhir dan sebagai alat ukur ketercapaian program kerja pengawas.

Program kerja tahunan pengawas tersebut kemudian dijabarkan oleh pengawas PAI dalam program kerja lanjutan. Dalam penelitian ini penulis hanya menfokuskan pada penjabaran program kerja tahap proses pemantauan dan pembinaan yang berkaitan dengan pelaksanaan supervisi akademik yang dilaksanakan oleh pengawas PAI. Adapun penjabaran pergram kerja tahunan pengawas PAI tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.14

Penjabaran perogram kerja pengawas PAI pada sekolah menengah  
di Kabupaten Pinrang

No	Jenis Kegiatan	Sasaran dan Target
1	Sosialisasi program kerja pengawas	Para guru PAI diharapkan mengetahui program kerja pengawas PAI
2.	Pemantauan dan pembinaan perencanaan pembelajaran	Para guru PAI diharapkan mengetahui dan memiliki perencanaan pembelajaran yang turtuang dalam dokumen perangkat pembelajaran
3.	Pemantauan dan pembinaan proses pembelajaran	Para guru PAI diharapkan mampu merealisasikan perencanaan pembelajarannya dalam proses pembelajaran
4	Memantau dan membimbing pelaksanaan ulangan semseter, ujian sekolah dan USBN	Para guru PAI diharapkan mampu melaksanakan penilaian melalui ujian semester/ujian sekolah dan USBN
5	Pemantauan dan pembinaan dalam evaluasi pembelajaran	Guru PAI mampu melakukan analisa dan mengevaluasi dan melakukan langkah tindak lanjut
6	Memberikan saran penyelesain kasus khusus di sekolah	Diskusi dalam kunjungan khusus

No	Jenis Kegiatan	Sasaran dan Target
7	Membina dan memantau pelaksanaan ekstra kurikuler dan bimbingan ibadah siswa	Monitoring, supervisi/pembimbingan
8	Melaksanakan evaluasi hasil pengawasan mata pelajaran PAI dari seluruh sekolah	Menyusun dan menganalisis catatan hasil pengawasan mata pelajaran PAI.

Sumber: Data program kerja Pengawas PAI Kabupaten Pinrang 2013

Data tersebut menunjukkan bahwa program kerja pengawas PAI tersebut menjelaskan secara rinci mengenai bentuk kegiatan dengan sasaran dan target pencapaian realisasi yang dijalankan secara sistematis dari perencanaan supervisi, pelaksanaan supervisi, dan evaluasi atau pelaporan hasil supervisi.

Penyusunan program kepengawasan diawali dengan rapat musyawarah dengan sesama pengawas yang dipandu oleh ketua Pokjawas dengan mendiskusikan hal-hal yang berkaitan dengan program kerja pengawas atau tugas pokok pengawas. Hal ini sebagaimana dikemukakan Amriyani bahwa Penyusunan Program kerja pengawas dihasilkan melalui rapat kerja yang dilaksanakan pada awal tahun ajaran baru, dengan menyusun program kerja pengawas selama satu tahun yang merujuk pada visi dan misi pengawas yang telah disusun secara bersama.<sup>15</sup> Lebih lanjut menurut Muh. Rizal mengemukakan bahwa penyusunan program kerja pengawas didasarkan pada analisis kebutuhan guru PAI di lapangan yang diperoleh pada pelaksanaan observasi, melalui analisis kebutuhan guru diharapkan program kerja yang disusun pengawas berdampak pada peningkatan kompetensi guru PAI.<sup>16</sup>

<sup>15</sup>Amriyani (51 tahun), Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 30 Desember 2013.

<sup>16</sup>H. Muhammad Rizal (46 Tahun), Pengawas PAI Pada Sekolah Menengah Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 15 Januari 2014.

Ungkapan tersebut memperjelas tugas dan pelaksanaan kegiatan kepengawasan dibuat atau dirumuskan melalui rapat kerja pengawas yang merancang dan merumuskan program kepengawasan yang menjadi acuan pengawas dalam kegiatan supervisi.

Mengacu pada program kerja pengawas PAI yang telah disusun dengan baik dan matang untuk melaksanakan pengawasan pembelajaran Pendidikan Agama Islam di sekolah. Pengawas PAI sebagai pejabat fungsional yang diberi tugas membimbing guru dalam menyusun perangkat pembelajaran. Namun demikian Terkait dengan program kerja yang telah disusun oleh pengawas, Samonding menuturkan bahwa dari beberapa program kerja pengawas yang ada, tidak semuanya terlaksana secara maksimal, hal itu disebabkan karena terkadang ada hal-hal yang menghambatnya sehingga program kerja tersebut tidak berjalan dengan maksimal.<sup>17</sup> Termasuk yang telah dikemukakan sebelumnya bahwa tidak seimbangnya antara jumlah pengawas dan guru PAI serta geografis yang menjadi faktor tidak maksimalnya kinerja pengawas dalam memberikan layanan supervisi kepada para guru PAI menjadi faktor penghambat terealisasinya program kerja pengawas dengan baik.

Menurut Amriyani bahwa program kerja pengawas Pendidikan Agama Islam disusun berdasarkan data yang dikumpulkan oleh pengawas saat mensupervisi para guru. Kemudian dari data tersebut dibahas di kementerian dengan menerima berbagai saran dan pertimbangan dari rekan sejawat. Kemudian setelah itu dirumuskanlah program kerja dari hasil pembahasan tersebut.<sup>18</sup>

---

<sup>17</sup>Samonding (48 tahun), Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah di kabupaten Pinrang, *wawancara*, Pinrang, 15 Januari 2014.

<sup>18</sup>Amriyani (51 tahun), Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 30 Desember 2013.

Penuturan ketua kelompok kerja pengawas tersebut menunjukkan bahwa program kerja pengawas Pendidikan Agama Islam disusun dengan betul-betul memperhatikan kebutuhan guru Pendidikan Agama Islam. Kemudian selain itu program kerja juga disusun dengan mempertimbangkan saran-saran dari pihak-pihak lain demi kesempurnaan program kerja.

Selain program kerja yang telah disusun tersebut, ada juga program kerja lain seperti melaksanakan kegiatan lomba guru berprestasi, memfasilitasi dan melibatkan diri dalam kegiatan Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) yang dilakukan juga biasanya 1 kali 1 bulan. Kemudian selain itu, pengawas juga menjadikan pentas PAI sebagai ajang untuk mensupervisi para guru Pendidikan Agama Islam.<sup>19</sup> Dengan demikian dari data tersebut menunjukkan bahwa Kementerian Agama memiliki program kerja yang sesuai dengan kebutuhan guru PAI di Kabupaten Pinrang saat ini.

## 2. Pendekatan-pendekatan dalam Merealisasikan Program Kerja

Program kerja yang telah disusun sedemikian rupa tidak berarti bahwa sesuatu yang sudah pinal. Program kerja yang disusun hanya sebagai pedoman atau acuan pengawas dalam melaksanakan tugas kepengawasan. Sebaik apapun sebuah program kerja masih perlu berbagai teknik atau cara sampai pada pendekatan dalam mewujudkannya.

Program kerja pengawas yang orientasi kerjanya adalah peningkatan kompetensi guru, sehingga sasaran utama pengawas adalah guru. Dalam bab sebelumnya telah dibahas bahwa terkadang antara pengawas dan guru sering terjadi benturan konflik antara otonom yang dimiliki oleh guru dan kewenangan yang

---

<sup>19</sup>Data dari Program Kerja Pengawas pendidikan Islam Kementerian Agama Kabupaten Pinrang.



dimiliki oleh pengawas. Sehingga benturan antara otonom dan wewenang itulah yang membuat program kerja tidak bisa terealisasi dengan maksimal.<sup>20</sup>

Selain itu, tugas berat pengawas juga adalah bagaimana menjalin komunikasi yang baik antara guru dengan mereka, sehingga antara keduanya saling komunikatif. Artinya pengawas tidak merasa arogan dengan wewenangnya dan guru juga tidak merasa didikte oleh pengawas.

Di Kabupaten pinrang, khususnya Kecamatan Patampanua pengawas pendidikan Agama Islam membangun komunikasi dengan guru Pendidikan Agama Islam dengan baik. Dari hasil penelitian penulis, tidak satupun informan (guru) yang penulis wawancarai yang merasa terbebani dengan kedatangan pengawas. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Sitti Hawa bahwa ketika pengawas datang mensupervisinya maka dia merasa terbantu. Karena dengan datangnya pengawas, dia selalu diberikan arahan dan masukan mulai dari pembuatan perangkat pembelajaran sampai pada hal-hal yang berkaitan dengan tugas profesinya.<sup>21</sup>

Dari penjelasan tersebut menggambarkan bahwa pengawas pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua telah berhasil menerapkan pendekatan terhadap para guru Pendidikan Agama Islam, sehingga mereka justru merasa senang ketika dikunjungi oleh pengawas. Kedatangan pengawas bagi mereka merupakan sesuatu yang baik karena justru dapat membantu mengatasi berbagai kesulitan-kesulitan yang dialami dalam melakukan aktivitasnya di sekolah.

---

<sup>20</sup>Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Pendidikan* (Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010), h. 177-178.

<sup>21</sup> Hj. Sitti Hawa (56 tahun), Guru PAI pada Negeri SMP Negeri 1 Patampanua, *Wawancara*, Leppang, 13 Januari 2014.

Lebih lanjut Hanisah Senreng mengemukakan bahwa

Saya merasa senang apabila pengawas datang berkunjung mensupervisi saya, karena dengan datangnya pengawas dapat bertukar pikiran dan menanyakan berbagai kendala yang saya hadapi di sekolah. Malah tidak hanya pengawas Pendidikan Agama Islam, pengawas dari Dinas Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrangpun ketika datang mensupervisi guru selain guru Pendidikan Agama Islam, saya juga selalu menyodorkan perangkat pembelajaran saya untuk diperiksa dan meminta mereka memberikan masukan atau saran-saran.<sup>22</sup>

Penuturan kedua guru tersebut yang secara umum mewakili arugemen dari semua informan (guru) yang penulis wawancarai menunjukkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang telah berhasil membangun komunikasi yang baik dengan para guru Pendidikan Agama Islam. Karena tidak satupun informan yang penulis mintai informasi yang mengatakan bahwa tidak senang dengan kedatangan pengawas.

Komunikasi antara pengawas dan guru Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang menurut hasil pengamatan penulis cukup baik. Hal ini ditandai dengan terjalinnya komunikasi yang baik antara mereka tidak hanya di sekolah saat pengawas melakukan kunjungan di sekolah, tetapi bahwa di luar kunjunganpun komunikasi antara guru pendidikan Agama Islam dan pengawas sering terjadi. Terkadang guru menghubungi pengawas melalui telepon seluler untuk menanyakan berbagai hal yang dianggap oleh guru butuh ditanyakan kepada pengawas, begitupula sebaliknya, terkadang pengawas berkomunikasi dengan para guru juga melalui telepon seluler bila ada informasi baru yang perlu disampaikan kepada para guru Pendidikan Agama Islam. Dari hasil penelusuran penulis tersebut menunjukkan bahwa memang antara guru Pendidikan Agama Islam dengan pengawas terjalin komunikasi yang baik.

---

<sup>22</sup>Hanisa Senreng (55 tahun), Guru Pendidikan Agama Islam Pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN 1) Patampanua, *Wawancara*, Urung, 16 Januari 2014.

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Marwah bahwa dia sering berkomunikasi dengan pengawas melalui telepon apabila ada hal-hal yang perlu ditanyakan dan dia merasa pengawas dapat memberikan solusinya. Begitupula sebaliknya pengawas juga biasa menghubunginya apabila ada informasi baru yang akan disampaikan.<sup>23</sup>

Dari penuturan salah satu informan tersebut (yang semua informan baik dari guru Pendidikan Agama Islam maupun pengawas) yang penulis wawancarai mengutarakan hal yang sama bahwa komunikasi antara mereka tidak hanya di sekolah saat supervisi berlangsung, tetapi juga di luar jadwal supervisi seperti melalui telepon seluler.

Lebih lanjut lagi Randi Sabang mengemukakan bahwa, apabila dia menanyakan sesuatu kepada pengawas baik itu saat disupervisi maupun lewat telepon maka pengawas selalu memberikan respon yang baik. Pengawas akan selalu membantunya mencari solusi apabila yang dia sampaikan berupa kendala.<sup>24</sup>

Dari penjelasan tersebut menunjukkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sangat komunikatif dengan Para guru Pendidikan Agama Islam. Mereka selalu memberikan respon yang baik terhadap berbagai keluhan yang dihadapi guru, terlebih lagi bila keluhan itu disampaikan sendiri oleh para guru.

Komunikasi yang baik yang terjalin antara para guru dan pengawas terjadi disebabkan karena pengawas berhasil melakukan pendekatan terhadap guru terutama pendekatan nondirektif yang disertai dengan pendekatan keagamaan.

---

<sup>23</sup>Hj. Marwah (59 tahun), Guru PAI pada SMP Negeri 2 Patampanua, *Wawancara*, Urung, 11 Januari 2014.

<sup>24</sup>Randi Sabang (54 tahun), Guru PAI pada SMP Negeri 4 Patampanua, *Wawancara*, Malimpung, 18 Januari 2014.

Dengan demikian dari pendekatan tersebut membuat para guru tidak merasa digurui walaupun secara tidak langsung mereka berguru kepada pengawas. Akan tetapi suasana yang terjadi tidak tampak seperti guru yang mengajar peserta didiknya, akan tetapi lebih bersifat diskusi atau saling tukar pikiran antara guru dan pengawas.

### 3. Realisasi Program Kerja

Dari program kerja yang telah disusun dan menerapkannya dengan berbagai pendekatan dengan menggunakan berbagai teknik kepada para guru maka berdasarkan hasil observasi penulis tergambar pada tabel berikut:

Tabel 4.15

Observasi penerapan program kerja pengawas PAI dengan berbagai teknik

No	Jenis Teknik Supervisi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1	Teknik Individu		
	A Kunjungan sekolah	✓	
	B Pertemuan individual	✓	
	C Kunjungan kelas/observasi kelas		✓
	D Kunjungan antar kelas/inter visitasi		✓
	E Menilai diri sendiri	✓	
	F Demonstrasi mengajar		✓
2	G Buletin supervisi		✓
	Teknik Kelompok		
	A Pertemuan Ilmiah	✓	
	B Rapat guru latih		✓
	C Studi kelompok antar guru		✓
	D Diskusi	✓	
	E Seminar	✓	
	F Simposium		✓

Data tersebut menunjukkan bahwa pengawas PAI di Kabupaten Pinrang termasuk Kecamatan Patampanua dalam memberikan bimbingan kepada guru PAI dilakukan dengan beberapa cara/teknik, yaitu:

a. Kunjungan Sekolah/Pertemuan Pribadi

Kunjungan sekolah untuk menemui guru Pendidikan Agama Islam di sekolah merupakan program kerja utama. Program kerja inilah yang selalu dan rutin dilakukan oleh pengawas dengan melakukan kunjungan paling tidak satu kali/bulan untuk setiap guru.

Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Muhammad Rizal bahwa, kunjungan sekolah untuk melakukan supervisi akademik merupakan program kerja utama pengawas Pendidikan Agama Islam di Kabupaten Pinrang. Program ini dikatakan utama karena rutin dilakukan dan selain melihat kerja guru juga dapat berkomunikasi langsung dengan para guru Pendidikan Agama Islam di sekolah.<sup>25</sup>

Kemudian hal tersebut diperkuat dengan penuturan Rahmawati bahwa, pengawas Pendidikan Agama Islam setiap bulan datang mengunjungi kami di sekolah kadang satu kali satu bulan, malah untuk sekolah kami terkadang dua kali satu bulan karena ketika pengawas ke kantor Kementerian Agama selalu melewati sekolah kami, sehingga sering beliau singgah/berkunjung ke sekolah untuk menemui kami.<sup>26</sup>

Penuturan Rahmawati menunjukkan bahwa pengawas Pendidikan Agama Islam di Kecamatan Patampanua betul-betul melaksanakan program kerjanya yang berkaitan dengan kunjungan sekolah atau kunjungan pada guru Pendidikan Agama

---

<sup>25</sup> Muhammad Rizal (46 tahun), Pengawas pendidikan Agama Islam pada Sekolah Menengah Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 15 Januari 2014.

<sup>26</sup> Rahmawati (44 tahun), Guru PAI pada SMP Negeri 1 Patampanua, *Wawancara*, Leppang, 13 Januari 2014.

Islam. Dengan seringnya kunjungan kesekolah oleh pengawas, sehingga terjalin keakraban antara mereka. Antara guru dan Pengawas sangat komunikatif. Sehingga dengan demikian antara guru dan pengawas tidak canggung-canggung menyampaikan permasalahan atau saran-saran yang dibutuhkan dalam meningkatkan kompetensi guru pendidikan Agama Islam.

Pengawas dalam melakukan kunjungan kepada para guru Pendidikan Agama Islam selalu disertai dengan berbagai dokumen, seperti instrumen penilaian. Instrumen-instrumen itulah yang digunakan pengawas untuk memberikan penilaian kepada para guru dalam supervisi. Kemudian dari hasil penilaian itu yang kemudian menjadi referensi antara guru dan pengawas untuk dibahas dalam pertemuan tersebut.

Hal sebagaimana dikemukakan oleh Suryani bahwa, ketika pengawas datang melakukan supervisi kepada kami selalu membawa instrumen. Instrumen itulah yang menjadi pedoman dalam mensupervisi. Dari instrumen itulah yang kemudian akan menjadi pedoman pengawas untuk memberikan masukan kepada kami saat melakukan diskusi pada akhir pertemuan.<sup>27</sup>

Penuturan pengawas dan guru Pendidikan Agama Islam menunjukkan bawah pengawas mempersiapkan diri dengan berbagai dokumen sebelum melakukan supervisi kepada para guru. Bahkan selain instrumen pengawas juga dilengkapi dengan Rencana Kerja Pengawasan Akademik (RKA). RKA inilah yang menjadi pedoman pengawas dalam melakukan kegiatan di sekolah.

Pengawas ketika datang berkunjung kesekolah menemui para guru Pendidikan Agama Islam, sebelumnya menemui kepala sekolah. Pertemuan tersebut

---

<sup>27</sup>Suriati (37 tahun), Guru PAI pada SMK Negeri 4 Pinrang, *Wawancara*, Maccobbu, 15 Januari 2014.

dimanfaatkan pengawas untuk mendapatkan informasi tentang gambaran kinerja guru yang akan disupervisi. Informasi dari kepala sekolah tersebut yang akan menjadi referensi tambahan bagi pengawas dalam melakukan supervisi selain yang diperoleh saat supervisi berlangsung. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Muslimin bahwa, ketika pengawas datang kesekolah, baik itu pengawas dari dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pinrang maupun dari Kementerian Agama maka sebelum melakukan supervisi kepada para guru maka mereka sebelumnya menemuinya (sebagai kepala sekolah). Kemudian dalam pertemuan tersebut dia memberikan berbagai informasi tentang guru yang akan disupervisi. Informasi itu penting bagi pengawas karena dia (kepala sekolah) mengetahui tentang guru yang akan disupervisi.<sup>28</sup>

Kerjasama antara pengawas dengan kepala sekolah dalam mensupervisi para guru sangat diperlukan. Hal tersebut dikarenakan antara pengawas dan kepala sekolah masing-masing memiliki tugas sebagai supervisor. Oleh karena itu, kerjasama antara mereka akan memudahkan dan sangat membantu kesuksesan tujuan supervisi.

#### b. Musyawarah Guru Mata Pelajaran (MGMP PAI)

Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) pada dasarnya merupakan kegiatan para Guru Pendidikan Agama Islam. MGMP PAI di Kabupaten Pinrang termasuk aktif. Mereka sering melakukan berbagai kegiatan-kegiatan. Namun di Kabupaten Pinrang yang termasuk di dalamnya Kecamatan Patampanua kegiatan tersebut juga dijadikan para pengawas untuk memberikan layanan supervisi kepada para guru.

---

<sup>28</sup>Muslimin (58 tahun), Kepala Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN 1) Patampanua, *Wawancara*, Leppang, Januari 2014.

Setiap pertemuan rutin MGMP selalu dipasilitasi oleh Kementerian Agama melalui para pengawasnya. Hal ini dapat dilihat dari setiap MGMP melakukan pertemuan selalu dilakukan di Kantor Kementerian Agama Kabupaten Pinrang. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Amriyani bahwa, koordinasi antara pengawas dan pengurus MGMP PAI terjalin dengan baik. Oleh karena itu, setiap pengurus akan melakukan kegiatan MGMP PAI maka dari Kementerian Agama selalu merespon dengan baik dengan memfasilitasi mereka dengan aula untuk mereka tempat melakukan pertemuan di aula tersebut.<sup>29</sup>

Penuturan ketua POKJAWAS tersebut menunjukkan bahwa MGMP PAI di Kabupaten Pinrang aktif dalam melakukan kegiatan. Bahkan menurut Samonding bahwa, MGMP PAI di Kabupaten Pinrang termasuk aktif. Keaktifan mereka ditandai dengan seringnya melakukan kegiatan seperti pertemuan antara para guru Pendidikan Agama Islam. Mereka melakukan kegiatan paling kurang satu kali/tiga bulan, bahkan biasa juga mereka melakukan kegiatan satu kali satu bulan.<sup>30</sup>

Dalam kegiatan MGMP PAI yang walaupun kegiatan para guru Pendidikan Agama Islam, namun setiap mereka melakukan kegiatan maka pengawas selalu dilibatkan dan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut. Melalui kegiatan tersebut para pengawas ikut memberikan motivasi, masukan, saran atau informasi baru yang dibutuhkan oleh para guru Pendidikan Agama Islam. Hal tersebut sebagaimana yang dikemukakan oleh Sitti Hawa bahwa dalam kegiatan MGMP PAI yang selalu dilakukan di Kementerian Agama maka ada sesi tertentu yang diisi oleh pengawas untuk menyampaikan berbagai hal kepada para peserta MGMP PAI. Selain itu,

---

<sup>29</sup>Amriyani (51 tahun), Ketua Kelompok Kerja Pengawas Kementerian Agama Kabupaten Pinrang, *Wawancara*, Pinrang, 21 Januari 2014.

<sup>30</sup>Samonding (48 tahun), Pengawas Pendidikan Agama Islam untuk Sekolah Menengah di Kabupaten Pinrang, *wawancara*, Pinrang, 15 Januari 2014.



tidak jarang juga kami berdiskusi dengan para pengawas dengan berbagai hal melalui forum tersebut.<sup>31</sup>

Penuturan tersebut menunjukkan bahwa salah satu upaya yang dilakukan oleh para pengawas Pendidikan Agama Islam dalam meningkatkan kompetensi guru melalui kegiatan MGMP PAI. Walaupun kegiatan tersebut merupakan kegiatan para guru, namun para pengawas di Kabupaten Pinrang dilibatkan dan melibatkan diri dalam kegiatan tersebut, sehingga kemudian dari momen tersebut dijadikan pengawas untuk memberikan layanan supervisi kepada para guru walaupun jenis kegiatannya bukanlah murni kegiatan supervisi.

Dalam kegiatan MGMP PAI, biasanya diisi dengan berbagai kegiatan seperti diskusi dan seminar. Dengan demikian teknik dari beberapa teknik kelompok yang digunakan pengawas tersebut bukan murni kegiatan pengawas, akan tetapi hanya memanfaatkan kegiatan MGMP PAI dengan mengisinya berbagai kegiatan.



---

<sup>31</sup> Sitti Hawa (56 tahun), Guru PAI pada SMP Negeri 1 Patampanua, *Wawancara*, Leppangang, 13 Januari 2014.

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Dari pembahasan yang telah dipaparkan pada bab-bab sebelumnya maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pada dasarnya pengawas PAI di Kecamatan Patampanua memiliki kompetensi, terutama kompetensi akademik, hal tersebut terlihat dari bimbingan yang dilakukan kepada para guru PAI dalam menyusun perangkat pembelajaran, akan tetapi, Kompetensi Pengawas PAI di Kecamatan Patampanua tidak didukung dengan beban kerja yang memadai, sehingga pengawas PAI tidak dapat memberikan bimbingan kepada guru PAI dalam hal proses pembelajaran dan evaluasi pembelajaran, karena tidak masuk dalam kelas mensupervisi guru.
2. Guru PAI di Kecamatan Patampanua semuanya memiliki kualifikasi pendidikan dan didukung dengan beban kerja yang memadai. Guru PAI di Kecamatan Patampanua pada dasarnya juga sudah memiliki kompetensi dasar terutama kompetensi pedagogik dan kompetensi profesional, namun masih perlu pembinaan dari pengawas untuk selalu meningkatkan kompetensi yang dimilikinya.
3. Upaya yang dilakukan Pengawas PAI di Kecamatan Patampanua dalam meningkatkan kompetensi kepada para guru Pendidikan Agama Islam diawali dengan menyusun peroram kerja, kemudian perogram kerja itu direalisasikan dengan menggunakan pendekatan dan teknik terutama memberikan bimbingan kepada para guru PAI dalam membuat perangkat pembelajaran. Namun dari upaya yang dilajukan oleh pengawas PAI,

ternyata belum menunjukkan kontribusi yang signifikan terhadap peningkatan kompetensi guru PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. hal itu dikarenakan pengawas PAI baru memberikan supervisi dalam hal pembuatan perencanaan pembelajaran dan belum sampai pada tahap proses dan evaluasi pembelajaran.

### ***B. Implikasi Penelitian***

Berdasar dari hasil penelitian yang dilakukan penulis maka ada beberapa catatan yang perlu penulis sampaikan kepada pihak-pihak yang berkompeten terhadap kontribusi pengawas dalam meningkatkan profesionalisme pembelajaran Pendidikan Agama Islam sebagai berikut:

1. Melihat keterbatasan dan kekurangan tenaga pengawas pada pendidikan menengah, kiranya pihak Kementerian Agama memberikan perhatian yang maksimal terhadap keberadaan pengawas terutama memperjuangkan para guru PAI yang telah mengikuti seleksi kepengawasan di Makassar untuk diangkat menjadi pengawas, mengingat jumlah sekolah dan guru makin meningkat seiring dengan perkembangan penduduk. Pengawas Pendidikan Agama Islam berdasarkan temuan di lapangan, ternyata sangat kurang.
2. Untuk pengawas Pendidikan Agama Islam agar supaya lebih memaksimalkan kerjanya dalam memberikan layanan supervisi kepada para Guru PAI. Perlu meningkatkan pelayanannya dengan masuk kedalam kelas/observasi kelas untuk memperhatikan proses pembelajaran, selain itu, pengawas perlu menerapkan berbagai teknik supervisi dan tidak hanya terfokus pada teknik pertemuan individual, akan tetapi membuat langkah tindak lanjut pembinaan kepada para guru PAI di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang. Selain itu pengawas perlu melakukan kerjasama yang intensif dengan para kepala

sekolah yang juga sebagai supervisor di sekolah karena kerja sama antara mereka dapat menambah kualitas dari hasil supervisi mereka.

3. Untuk para guru Pendidikan Agama Islam agar supaya tetap selalu meningkatkan kompetesinya seiring dengan perkembangan dan kemajuan zaman. Selain bantuan dari supervisor, para guru juga harus berupaya sendiri untuk selalu meningkatkan kompetensinya. Walaupun mereka selalu mendapat layanan supervisi dari pengawas atau kepala sekolah mereka, namun itu tidak berarti sudah cukup. Memadukan antara apa yang didapat dari supervisor dan kepala sekolah dengan apa yang didapat sendiri akan mendapatkan hasil yang lebih maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. *Dasar-dasar Supervisi*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- , *Manajemen Penelitian*. Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Danim, Sudarwan dan Khairil. *Profesi Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010.
- , *Psikologi Pendidikan (dalam Perspektif Baru)*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Danim, Sudarwan. *Pedagogik, Andragogi, dan Heutagogi*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2013.
- Daradjat, Zakiah. *Ilmu Jiwa Agama*. Jakarta: Bulan Bintang, 2005.
- Departemen Agama RI. *Pedoman Pengawasan Pendidikan Agama Islam pada Sekolah Tingkat Dasar dan Menengah (SD, SMP, SMA dan SMK)*. Direktorat Jenderal Pendidikan Agama Islam, 2009.
- Departemen Pendidikan Nasional. *Metode dan Teknik Supervisi*. Direktorat Tenaga Kependidikan, Direktorat Jenderal Peningkatan Mutu Pendidik dan Tenaga Kependidikan, 2008.
- , *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Cet. IV; Bandung: Balai Pustaka, 2007.
- Engkoswara dan Aan Komariah. *Administrasi Pendidikan*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fathurrohman, Pupuh dan AA Suryana. *Supervisi Pendidikan dalam Pengembangan Proses Pengajaran*. Cet. I; Bandung: Refika Aditama, 2011.
- Getteng, Abd. Rahman. *Menuju Guru Profesional dan Ber-Etika*. Cet. VII; Yogyakarta: Graha Guru, 2012.
- Hamalik, Oemar. *Pendidikan Guru Berdasarkan Pendekatan Kompetensi*. Cet. VI; Jakarta: Bumi Aksara, 2009.
- , *Proses Belajar Mengajar*. Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Huntua, Ismail. *Kinerja Supervisor dalam Meningkatkan Kreativitas Guru PAI SMP Negeri di Kabupaten Bone Bolango Provinsi Gorontalo*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2013.
- Idris. *Pengaruh Supervisi Terhadap Peningkatan Kemampuan Profesionalisme Guru pada Madrasah Aliyah di Watampone*. Tesis. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2008.
- Imron, Ali. *Supervisi Pembelajaran Tingkat Satuan Pendidikan*. Cet. I; Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Al-Ja'fi, Imam Abi Abdillah Muhammad Ibn Ismail Ibn Ibrahim Ibn Mughirah, Bardizbah al Bukhari, *Shahih Bukhari* Juz I. Beirut: Dar al-Kutb al-Ilmiyah, 1992.
- Kementerian Agama RI. *Al-Qur'an Tajwid dan Terjemahnya*. Syamil Quran: Bandung, 2010.

- LN., Syamsu Yusuf Dan Achmad Juntika Nurihsan. *Teori Kepribadian*. Cet. III; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Makawimbang, Jerri H. *Supervisi dan Peningkatan Mutu Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Mappanganro. *Pemilikan Kompetensi Guru*. Makassar: Alauddin Press, 2010).
- Maryono. *Dasar-dasar dan Teknik Menjadi Supervisor Pendidikan*. Jogjakarta: Ar-ruzz Media, 2011.
- Masaong, Abd. Kadim. *Supervisi Pembelajaran dan Pengembangan Kapasitas Guru Memberdayakan Pengawas Sebagai Gurunya Guru*. Cet. I; Bandung, Alfabeta, 2012.
- Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kuantitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Muhaimin, *Paradigma Pendidikan Islam*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Mujub, Abdul dan Jusuf Mudzakkir. *Ilmu Pendidikan Islam*, dengan kata pengantar oleh Suyanto. Cet. III; Jakarta: Kencana Prenada Media, 2010.
- Mulyasa, E. *Menjadi Guru Profesional Menciptakan Pembelajaran Kreatif dan Menyenangkan*. Cet. XI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Mulyasana, Dedi. *Pendidikan Bermutu dan Berdaya Saing*. Cet. II; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Musdalifa, Implementasi Tugas Pengawas dalam Meningkatkan Kinerja Guru Pendidikan Agama Islam di Madrasah Tsanawiyah Negeri Model Makassar. *Disertasi*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Muslim, Sri Banun. *Supervisi Pendidikan Meningkatkan Kualitas Profesional Guru*. Cet. II; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Nasution, S. *Berbagai Pendekatan dalam Proses Belajar Mengajar*. Cet. XV; Jakarta: Bumi Aksara, 2011.
- Nawawi, Hadari dan Martini Hadari. *Instrumen Penelitian Bidang Sosial*. Pontianak: Gajah Mada University Press, 2006.
- Parenrengi, M. Arsyad. Pengaruh Kinerja Pengawas Terhadap Kinerja Guru PAI pada Sekolah Menengah Atas dan Madrasah Aliyah di Kabupaten Sinjai. *Disertasi*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2007.
- Partono, Pius A. dan M. Dahlan al Barry. *Kamus Ilmiah Populer*. Surabaya: Arkola, 2011.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010. *tentang Pengelolaan Pendidikan Agama pada Sekolah*.
- Nomor 2 Tahun 2012. *tentang Pengawas Madrasah dan Pengawas Pendidikan Agama Islam pada Sekolah*.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010. *tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya*. Cet. II; Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga

- Kependidikan, Badan PSDM dan PMP Kemeterian Pendidikan Nasional, 2011.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2010. *tentang Standar Kualifikasi Akademik dan Kompetensi Guru*, h. 8.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2007 *tentang Standar Pengawas Sekolah dan Madrasah*.
- Pidarta, Made. *Supervisi Pendidikan Kontekstual*. Cet. I; Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- Purwanto, M. Ngalim. *Administrasi dan Supervisi Pendidikan*. Cet. XXI; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2012.
- Republik Indonesia. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005. *tentang Guru dan Dosen*. Cet. III; Yogyakarta: Pustaka pelajar, 2012.
- . Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. *tentang Sistem Pendidikan Nasional*. Cet. V; Jakarta: Sinar Grafika, 2013.
- Roestiyah NK. *Masalah-Masalah Ilmu Keguruan*. Jakarta: Bina Aksara, 1982).
- Sagala, Syaiful. *Kemampuan Profesional Guru dan Tenaga Kependidikan*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2011.
- . *Supervisi Pembelajaran dalam Profesi Pendidikan*. Cet. I; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sanjaya, Wina. *Strategi Pembelajaran Berorientasi Standar Proses Pendidikan*. Cet. IX; Jakarta: Kencana, 2012.
- Saud, Udin Syaifuddin. *Pengembangan Profesi Guru*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2011.
- Shihab, Quraish. *Membumikan al-Quran*. Cet. XXVII; Bandung: Mizan, 2004.
- Subagyo, Joko. *Metode Penelitian dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Rineka Cipta, 1991.
- Sudarma, Momon. *Profesi Guru Dipuji, Dikritisi, dan Dicaci*. Cet. I; Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Methods)*. Cet. III; Bandung: Alfabeta, 2012.
- . *Metode Penelitian Pendidikan; Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta, 2011.
- Suhardang, Dadang. *Supervisi Profesional Layanan dalam Meningkatkan Mutu Pembelajaran di Era Otonomi Daerah*. Cet. IV; Bandung: Alfabeta, 2010.
- Sujana, Nana, dkk. *Buku Kerja Pengawas Sekolah*. Cet. II; Jakarta: Pusat Pengembangan Tenaga Kependidikan, Badan PSDM dan PMP Kemeterian Pendidikan Nasional, 2011.
- Sukmadinata, Nana Syaodih. *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Cet. XIV; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.



- Sunaryo. Strategi Pengawas Sekolah Menengah Kejuruan dalam Upaya Peningkatan Mutu SMK Muhammadiyah Tolitoli di Kabupaten Tolitoli. *Tesis*. Makassar: Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar, 2012.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan dalam Perspektif Islam*. Cet. X; Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011.
- Usman, Moh. Uzer. *Menjadi Guru Profesional*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 1999.
- Wiles, Kimbal. *Supervision for Better School*. New Jersey: Englewood Cliffts Prentice Hall, 1983.
- Yamin, Martinis. *Profesionalisme Guru dan Implementasi Kurikulum Berbasis Kompetensi*. Jakarta: Gaun Persada Press, 2006.







Papan nama Kantor Kementerian Agama  
Kabupaten Pinrang



Wawancara dengan H. Muhammad. Ihwan, M.A. (Kasi Pendis) Kemenag,  
Pinrang 30 Desember 2013



Wawancara dengan Drs. Amriyani (Ketua POKJAWAS) Kemenag,  
Pinrang 30 Desember 2013



Wawancara dengan Drs. H.Muhammad Rizal (Pengawas PAI) Kemenag,  
Pinrang 20 Januari 2014



Wawancara dengan Drs. Samonding, M.A. (Pengawas PAI) Kemenag,  
Pinrang 20 Januari 2014



Papan nama SMKN 4 Kabupaten Pinrang





Wawancara dengan Suryani, S.Ag. (Guru PAI SMKN 4 Pinrang),  
Maccobbu 15 Januari 2014



Wawancara dengan Suriati, S.Ag. (Guru PAI SMKN 4 Pinrang),  
Maccobbu 15 Januari 2014



Papan nama SMPN 1 Patampanua



Wawancara dengan Rahmawati, S.Ag. (Guru PAI SMPN 1 Patampanua),  
Leppangan, 15 Januari 2014



Wawancara dengan Dra. Hj. Sitti Hawa (Guru PAI SMPN 1 Patampanua),  
Leppangan, 15 Januari 2014



Wawancara dengan Muslimin, S.Pd., M.Pd. (KEPSEK SMPN 1 Patampanua),  
Leppangan, 15 Januari 2014





Papan nama SMPN 2 Patampanua



Wawancara dengan H. Amiruddin, S.Pd., M.M. (KEPSEK SMPN 2 Patampanua), Urung, 11 Januari 2014



Wawancara dengan Dra. Hj. Halfiah (Guru PAI SMPN 2 Patampanua),  
Urung, 11 Januari 2014



Wawancara dengan Hj. Marwah, S.Pd.I. (Guru PAI SMPN 2  
Patampanua), Urung, 11 Januari 2014





Papan nama SMPN 4 Patampanua



Wawancara dengan Drs. Randi Sabang (Guru PAI SMPN 4 Patampanua), Malimpung, 18 Januari 2014



Papan nama SMAN 1 Patampanua



Wawancara dengan Hanisa Senreng, S.Pd.I (Guru PAI SMAN 1 Patampanua), Urung, 16 Januari 2014



Wawancara ke 2 (memperpanjang pengamatan) dengan Drs. Samonding, M.A. (Pengawas PAI) Kemenag, Pinrang, 24 Februari 2014



Wawancara ke 2 (memperpanjang pengamatan) dengan Hj. Marwah, S.Pd.I. (Guru PAI SMPN 2 Patampanua), Urung, 24 Februari 2014



Proses Pembelajaran PAI oleh Abbas Sauda, BA., S.Pd.I (Guru PAI kelas IX SMPN 2 Patampanua, 11 Januari 2014



Proses Pembelajaran PAI oleh Hanisa Senreng., S.Pd.I (Guru PAI kelas X SMAN 1 Patampanua, 16 Januari 2014





Proses Pembelajaran PAI oleh Hanisa Senreng., S.Pd.I (Guru PAI  
kelas X SMAN 1 Patampanua, 16 Januari 2014

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
**ALAUDDIN**  
M A K A S S A R

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**(Kasi Pendis)**

### **KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

#### **I. Identitas Informan**

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### **II. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Bagaimana prosedur pengangkatan pengawas PAI?
2. Apakah pengangkatan pengawas PAI sesuai dengan kebutuhan dan memenuhi kualifikasi, kompetensi dan sertifikat pengawas?
3. Apakah beban kerja pengawas PAI pada sekolah menengah sesuai dengan standar kerja?
4. Bagaimana upaya Kementerian Agama dalam meningkatkan kompetensi pengawas PAI pada sekolah menengah?
5. Menurut pengamatan bapak, apakah kinerja pengawas PAI pada sekolah menengah sudah sesuai dengan tujuan kepengawasan?
6. Apakah menurut bapak, pengawas PAI pada sekolah menengah punya kontribusi dalam meningkatkan kompetensi guru PAI?
7. Menurut bapak, apa yang menjadi kendala utama pengawas dalam melaksanakan tugasnya memberikan layanan supervisi kepada guru PAI?
8. Bagaimana pandangan bapak tentang guru PAI pada sekolah menengah di Kec. Patampanua dalam hal kompetensi?

## PEDOMAN WAWANCARA

(Ketua POKJAWAS)

### KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPAU KABUPATEN PINRANG

#### I> Identitas Informan

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### II. Pertanyaan-pertanyaan

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pengawas PAI pada sekolah umum dalam melaksanakan tugas supervisinya?
6. Apakah beban kerja pengawas PAI pada sekolah menengah sesuai dengan standar kerja?
9. Bagaimana prosedur penyusunan program kerja peangawas PAI pada sekolah umum?
10. Bagaimana teknik-teknik yang ditetapkan pengawa PAI pada sekolah umum dalam melaksanakan supervisi?
11. Apa menurut bapak program kerja yang ada sudah dilaksanakan secara maksimal?
12. Menurut bapak, apa kendala utama yang dialami pengawas dalam merealisasikan program kerja kepengawasan?
13. Bagaimana upaya dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas PAI pada sekolah menengah?



## PEDOMAN WAWANCARA

(Pengawas PAI pada sekolah menengah)

### KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

#### III. Identitas Informan

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### IV. Pertanyaan-pertanyaan

1. Apakah beban kerja pengawas PAI pada sekolah menengah sesuai dengan standar kerja?
2. Bagaimana prosedur penyusunan program kerja peangawas PAI pada sekolah umum?
3. Bagaimana volume kunjungan kesekolah dalam memberikan supervisi kepada guru PAI pada sekolah umum?
4. Apakah komunikasi/pemberian layanan supervisi antara pengawas dengan guru PAI selalu terjalin selain di sekolah(tidak hanya di sekolah)?
5. Bagaimana teknik-teknik yang ditepakan pengawa PAI pada sekolah umum dalam melaksanakan supervisi?
6. Bagaimana menurut bapak guru PAI pada sekolah umum di kecamatan Patampanua sudah berkualifikasi, berkompetensi dan tersertifikasi?
7. Menurut bapak, bantuan supervisi dalam bentuk bagaimana yang paling dibutuhkan guru PAI pada sekolah umum di Kec. Patampanua?
8. Apa menurut bapak program kerja yang ada sudah dilaksanakan secara maksimal?
9. Menurut bapak, apa kendala utama yang dialami pengawas dalam merealisasikan program kerja kepengawasan?

10. Bagaimana upaya dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas PAI pada sekolah menengah?

## PEDOMAN WAWANCARA

(Kepala Sekolah)

### KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG

#### **V. Identitas Informan**

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### **VI. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Bagaimana tanggapa bapak tentang kontribusi pengawas pendidikan agama Islam dalam mewujudkan guru PAI yang berkompetensi terutama di sekolah bapak?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang kompetensi guru PAI di sekolah bapak?
3. Bagaimana volume kunjungan pengawas PAI di sekolah bapak dalam rangka mensupervisi guru PAI?
4. Bagaimana bentuk kegiatan supervisor dalam memberikan layanan supervisi kepada guru PAI?
5. Apakah menurut bapak, supervisi yang dilakukan supervisor berorientasi pada supervisi administrasi atau pendidikan (melihat cara-cara guru dalam menjalankan proses pembelajaran)?
6. Apakah menurut bapak, ada peningkatan kompetensi guru PAI setelah disupervisi?
7. Menurut pengamatan bapak (selaku supevervisor) bagaimana sebaiknya bentuk supervisi yang dilakukan oleh supervisi PAI?

## PEDOMAN WAWANCARA

(Guru PAI sekolah menengah)

### KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPAK NUA KABUPATEN PINRANG

#### **VII. Identitas Informan**

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan : Guru PAI
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### **VIII. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu tentang kontribusi pengawas pendidikan agama Islam dalam mewujudkan guru PAI yang berkompetensi terutama di sekolah bapak?
2. Bagaimana volume kunjungan pengawas PAI di sekolah bapak/ibu dalam rangka mensupervisi guru PAI?
3. Bagaimana bentuk kegiatan supervisor dalam memberikan layanan supervisi kepada guru PAI?
4. Apakah menurut bapak/ibu, supervisi yang dilakukan supervisor berorientasi pada supervisi administrasi atau pendidikan (melihat cara-cara guru dalam menjalankan proses pembelajaran)?
5. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan pengawas setelah melakukan supervisi administrasi/pendidikan?

6. Apakah pengawas memberikan respon ketika guru meminta petunjuk kepada pengawas?
7. Apakah tetap terjalin komunikasi (berkenaan dengan peningkatan proses pembelajaran) antara pengawas dengan bapak/ibu di luar sekolah
8. Apakah menurut bapak/ibu guru, ada peningkatan kompetensi yang dirasakan setelah di supervisi oleh pengawas PAI?
9. Menurut bapak/ibu mana yang lebih besar peranannya dalam meningkatkan kompetensi guru antara pengawas dan kepala sekolah?
10. Menurut pengamatan bapak (selaku supervisor) bagaimana sebaiknya bentuk supervisi yang dilakukan oleh supervisi PAI?



## **PEDOMAN WAWANCARA**

**(Ketua POKJAWAS)**

### **KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

#### **I. Identitas Informan**

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### **II. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Bagaimana tanggapan bapak terhadap pengawas PAI pada sekolah umum dalam melaksanakan tugas supervisinya?
2. Apakah beban kerja pengawas PAI pada sekolah menengah sesuai dengan standar kerja?
3. Bagaimana prosedur penyusunan program kerja peangawas PAI pada sekolah umum?
4. Bagaimana teknik-teknik yang ditetapkan pengawa PAI pada sekolah umum dalam melaksanakan supervisi?
5. Apa menurut bapak program kerja yang ada sudah dilaksanakan secara maksimal?
6. Menurut bapak, apa kendala utama yang dialami pengawas dalam merealisasikan program kerja kepengawasan?
7. Bagaimana upaya dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas PAI pada sekolah menengah?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**(Pengawas PAI pada sekolah menengah)**

### **KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

#### **I. Identitas Informan**

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### **II. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Apakah beban kerja pengawas PAI pada sekolah menengah sesuai dengan standar kerja?
2. Bagaimana prosedur penyusunan program kerja pengawas PAI pada sekolah umum?
3. Bagaimana volume kunjungan kesekolah dalam memberikan supervisi kepada guru PAI pada sekolah umum?
4. Apakah komunikasi/pemberian layanan supervisi antara pengawas dengan guru PAI selalu terjalin selain di sekolah(tidak hanya di sekolah)?
5. Bagaimana teknik-teknik yang diterapkan pengawa PAI pada sekolah umum dalam melaksanakan supervisi?
6. Bagaimana pandangan bapak terhadap guru PAI pada sekolah umum di kecamatan Patampanua sudah berkualifikasi, berkompetensi dan tersertifikasi?
7. Menurut bapak, bantuan supervisi dalam bentuk bagaimana yang paling dibutuhkan guru PAI pada sekolah umum di Kec. Patampanua?
8. Apa menurut bapak program kerja yang ada sudah dilaksanakan secara maksimal?
9. Menurut bapak, apa kendala utama yang dialami pengawas dalam merealisasikan program kerja kepengawasan?
10. Bagaimana upaya dalam menanggulangi kendala-kendala yang dihadapi oleh pengawas PAI pada sekolah menengah?

## **PEDOMAN WAWANCARA**

**(Kepala Sekolah)**

### **KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

#### **I. Identitas Informan**

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### **II. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Bagaimana tanggapa bapak tentang kontribusi pengawas Pendidikan Agama Islam dalam mewujudkan guru PAI yang berkompetensi terutama di sekolah bapak?
2. Bagaimana pandangan bapak tentang kompetensi guru PAI di sekolah bapak?
3. Bagaimana volume kunjungan pengawas PAI di sekolah bapak dalam rangka mensupervisi guru PAI?
4. Bagaimana bentuk kegiatan supervisor dalam memberikan layanan supervisi kepada guru PAI?
5. Apakah menurut bapak, supervisi yang dilakukan supervisor berorientasi pada supervisi administrasi atau pendidikan (melihat cara-cara guru dalam menjalankan proses pembelajaran)?
6. Apakah menurut bapak, ada peningkatan kompetensi guru PAI setelah disupervisi?
7. Menurut pengamatan bapak (selaku supevervisor) bagaimana sebaiknya bentuk supervisi yang dilakukan oleh supervisi PAI?



## **PEDOMAN WAWANCARA**

**(Guru PAI sekolah menengah)**

### **KONTRIBUSI PENGAWAS PENDIDIKAN AGAMA ISLAM DALAM MEWUJUDKAN GURU PAI DI KECAMATAN PATAMPANUA KABUPATEN PINRANG**

#### **I. Identitas Informan**

1. Nama :
2. NIP :
3. Jabatan :
4. Pendidikan terakhir :
5. Umur :

#### **II. Pertanyaan-pertanyaan**

1. Bagaimana tanggapan bapak/ibu/ibu tentang kontribusi pengawas pendidikan agama Islam dalam mewujudkan guru PAI yang berkompetensi terutama di sekolah bapak/ibu?
2. Bagaimana volume kunjungan pengawas PAI di sekolah bapak/ibu/ibu dalam rangka mensupervisi guru PAI?
3. Bagaimana bentuk kegiatan supervisi dalam memberikan layanan supervisi kepada guru PAI?
4. Apakah menurut bapak/ibu/ibu, supervisi yang dilakukan supervisor berorientasi pada supervisi administrasi atau pendidikan (melihat cara-cara guru dalam menjalankan proses pembelajaran)?
5. Bagaimana tindak lanjut yang dilakukan pengawas setelah melakukan supervisi administrasi/pendidikan?
6. Apakah pengawas memberikan respon ketika guru meminta petunjuk kepada pengawas?
7. Apakah tetap terjalin komunikasi (berkenaan dengan peningkatan proses pembelajaran) antara pengawas dengan bapak/ibu/ibu di luar sekolah?
8. Apakah menurut bapak/ibu/ibu guru, ada peningkatan kompetensi yang dirasakan setelah di supervisi oleh pengawas PAI?
9. Menurut bapak/ibu/ibu mana yang lebih besar peranannya dalam meningkatkan kompetensi guru antara pengawas dan kepala sekolah?
10. Menurut pengamatan bapak/ibu (selaku supervisor) bagaimana sebaiknya bentuk supervisi yang dilakukan oleh supervisi PAI?

### PEDOMAN WAWANCARA TIDAK TERSTRUKTUR

No.	Pertanyaan Pokok	Sub Pertanyaan Pokok
1	Kompetensi pengawas PAI di Kec. Patampanua Kab. Pinrang	a. Kompetensi Akademik b. Kompetensi Profesional
2	Kondisi objektif guru Pendidikan Agama Islam di Kec. Patampanua Kab. Pinrang	a. Kualifikasi b. Kompetensi guru PAI c. Cakupan tugas dan beban kerja
3	Upaya pengawas PAI di Kec. Patampanua Kab. Pinrang dalam mewujudkan kompetensi guru PAI	a. Penyusunan program kerja b. Melakukan pendekatan-pendekatan c. Realisasi program kerja

**Pedoman Observasi**  
**Realisasi Kompetensi Akademik Pengawas PAI**  
**pada Sekolah Menengah di Kab. Pinrang**

N O	Nama pengawas /Nip	Bentuk bimbingan pada guru PAI/pembuatan										
		Kalender Pendidikan	Alokasi Waktu efektif	Program Tahunan	Program Semester	Silabus	RPP	KKM	PTK	Pembuatan soal	Proses Pembelajaran	LKS
1												
2												
3												
4												
5												
6												
7												

**Pedoman Observasi**  
**Perangkat Pembelajaran Guru PAI**  
**Kec. Patampanua Kab. Pinrang**

NO	Nama/Nip	Tempat Tugas	Pearangkat pembelajaran guru PAI						
			Kalender Pendidikan	Alokasi Waktu . efektif	Program Tahunan	Program Semester	Silabus	RPP	KKM
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									
11									
12									
13									

### Pedoman Observasi

#### Penerapan program kerja pengawas PAI dengan berbagai teknik

No	Jenis Teknik Supervisi	Keterangan	
		Ya	Tidak
1	Teknik Individu		
	A Kunjungan sekolah		
	B Pertemuan individual		
	C Kunjungan kelas/observasi kelas		
	D Kunjungan antar kelas/inter visitasi		
	E Menilai diri sendiri		
	F Demonstran mengajar		
	G Buletin supervisi		
2	Teknik Kelompok		
	A Pertemuan Ilmiah		
	B Rapat guru latih		
	C Studi kelompok antar guru		
	D Diskusi		
	E Seminar		
	F Simposium		
	G <i>Workshof</i>		

Pedoman observasi kompetensi guru PAI

Pada sekolah menengah di Kecamatan Patampanua

No.	Nama guru PAI	Kompetensi				
		Pedagogik	Kepribadian	Sosial	Profesional	Kepemimpinan
1						
2						
3						
4						
5						
6						
7						
8						
9						
10						
11						
12						
13						
14						

Item pengamatan:

Indikator pada tiap kompetensi guru

## JADWAL PENELITIAN/TIME SCEDULE

No	TAHAPAN KEGIATAN	Juli				Agustus				September				Oktober				November				Desember				Januari				Februari				Maret				April				Mei				Juni				Ket
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4													
	TAHAP AWAL/PERSIAPAN																																																	
1	Observasi Awal																																																	
2	Identifikasi Masalah																																																	
3	Pengajuan Judul																																																	
4	Penyusunan Proposal																																																	
5	Seminar Proposal																																																	
6	Perbaikan Proposal																																																	
7	Izin Penelitian																																																	
	TAHAP PELAKSANAAN																																																	
1	Pengumpulan Data																																																	
2	Interpretasi Data																																																	
3	Penulisan Laporan																																																	
	TAHAP AKHIR																																																	
1	Seminar Hasil																																																	
2	Koreksi dan Perbaikan																																																	
3	Munaqasyah																																																	

■ Tahap Awal  
■ Tahap Pelaksanaan  
■ Tahap Akhir

Makassar, 2 Juni 2014  
 Peneliti,

Suparman Toaha  
 Nim: 80100212143



## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

### I. Biodata



1. Nama : Suparman Toaha, S.Ag.
2. NIP : 19781110 200502 1 010
3. NIM : 80100212143
4. Tempat/Tgl. Lahir : Urung, 10 November 1978
5. Pekerjaan : Guru PAI SMA Negeri 1 Raja Ampat
6. Pangkat/Golongan : Penata, III/d
7. Alamat : BPS Blok D 2 No. 2 Makassar
8. Nomor Telepon/ HP : 081248839744

### II. Keluarga

#### A. Anggota Keluarga

1. Rafika ( Istri )
2. Muhammad Chairul Qadry ( Anak )
3. Ahmad Chaidir Mirza ( Anak )

#### B. Orang tua

1. Toaha ( Ayah/Almarhum )
2. Hj. Hanawiah ( Ibu )
3. Amiruddin ( Kakak Kandung )
4. Hj. Yadati ( Kakak Kandung )
5. Damris ( Kakak Kandung )
6. Hj. Hariaty ( Kakak Kandung )
7. Hj. Hasni ( Kakak Kandung )
8. Hj. Hadira ( Kakak Kandung )
9. Harianto ( Adik Kandung )
10. Zainal ( Adik Kandung )
11. Hamsinar, S.Pd. ( Adik Kandung )

### **III. *Riwayat Pendidikan***

1. Sekolah Dasar Negeri Inpres 259 Urung Tahun 1984-1991
2. Madrasah Tsanawiyah DDI Kaballangan Pinrang Tahun 1991-1994
3. Madrasah Aliyah DDI Kaballangan Pinrang Tahun 1994-1997
4. Program Sarjana Fakultas Tarbiyah Jurusan Pendidikan Agama Islam STAIN Parepare Tahun 1997-2002
5. Program Magister Konsentrasi Pendidikan Kepengawasan PAI Program Pascasarjana Universitas Islam Negeri ( UIN ) Alauddin Makassar Tahun 2012 s/d sekarang

### **IV. *Riwayat Pangkat/Jabatan Fungsional***

1. Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) Tahun 2005
2. Pegawai Negeri Sipil ( PNS ), Penata Muda ( III/a ) Tahun 2006
3. Penata muda Tk. I ( III/b ) Tahun 2008
4. Penata ( III/c ) Tahun 2010
5. Penata Tk. I ( III/d ) Tahun 2012

### **V. *Penelitian/ Karya Tulis Ilmiah***

1. Pengaruh Pendidikan Keluarga Terhadap Pembentukan Kepribadian Anak di Desa Sipatuo Kec. Patampanua Kab. Pinrang (Skripsi), Program Sarjana, Jurusan Tarbiyah STAIN Parepare Tahun 2002
2. Kontribusi Pengawas Pendidikan Agama Islam dalam Mewujudkan Guru PAI yang Berkompetensi di Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang (Tesis), Program Pascasarjana UIN Alauddin Makassar Tahun 2012-2014